

MILIK DEPDIKBUD  
Tidak Diperdagangkan

# SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH ISTIMEWA ACEH



ektorat  
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

~~310-419-11~~

MILIK DEPKIBUD  
Tidak Diperdagangkan

# SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
JAKARTA, 1984



PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT MUSEUM

TANGGAL 22 Mei 1984

ASAL 776/04 201.

## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

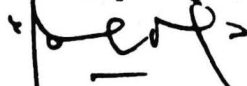
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Zakaria Akmad; Drs. Muhammad Ibrahim; Drs. Rusdi Sufi; Drs. Nasrudin Sulaiman; Drs. Isa Sulaiman; Drs. M. Thamrin Z. ; Drs. T. Ibrahim Alfia. MA dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Sutrisno Kutoyo; Drs. Anhar Gonggong.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek.



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589.

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan |Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepastakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Budaya Masyarakat .....	1
B. Garis Besar Perkembangan Pendidikan .....	4
<b>BAB II. PENDIDIKAN TRADISIONAL DI DAERAH ACEH .....</b>	<b>7</b>
A. Pendidikan Sebelum Kedatangan Agama Islam .....	7
B. Pengaruh Agama Islam .....	11
1. Kelembagaan .....	11
2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sampai Abad ke-20 .....	16
3. Pengelolaan Lembaga Pendidikan dan Program .....	23
4. Tokoh Guru .....	30
<b>BAB III. PENDIDIKAN DI DAERAH ACEH PADA ZAMAN PEME- RINTAHAN HINDIA BELANDA .....</b>	<b>36</b>
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH .....	36
1. Pengaruh Politik Etika dan Konsepsi C. Snouck Hurgronje .....	36
2. Pendidikan Sekolah Dasar .....	39
3. Pendidikan Menengah Umum .....	51
4. Pendidikan Kejuruan .....	52
B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL .....	54
1. Motivasi .....	54
2. Kelembagaan .....	57
3. Tokoh-tokoh dan Pemikirannya .....	70
<b>BAB IV. PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA .....</b>	<b>73</b>
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH .....	74
1. Pendidikan Dasar .....	74
2. Pendidikan Menengah Umum .....	81
3. Pendidikan Menengah Kejuruan .....	90
4. Pendidikan Tinggi .....	100
5. Pendidikan Non Formal .....	104

B. PENDIDIKAN SWASTA . . . . .	108
1. Pendidikan Dasar . . . . .	109
2. Pendidikan Menengah Umum . . . . .	112
3. Pendidikan Menengah Kejuruan . . . . .	114
4. Pendidikan Tinggi . . . . .	115
5. Pendidikan Non Formal . . . . .	117
BAB V. KESIMPULAN . . . . .	118
DAFTAR KEPUSTAKAAN . . . . .	123
DAFTAR INFORMAN . . . . .	129

--- 000 ---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT

Sebelum kita membahas pendidikan di daerah Aceh ditinjau dari proses perjalanan sejarahnya, ada baiknya tulisan ini diawali dengan suatu uraian singkat mengenai budaya masyarakat yang pernah hidup di daerah tersebut. Hal ini mengingat, bahwa antara pendidikan dan kebudayaan selalu terdapat hubungan yang erat dan antara keduanya tidak dapat dipisahkan : pendidikan sendiri merupakan bagian dari kebudayaan, sedang kebudayaan selalu dikembangkan melalui pendidikan.

Bila ditinjau dari segi budaya masyarakat, dalam wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, setidak-tidaknya terdapat tujuh sistem budaya etnis<sup>1</sup>) yang mempunyai masyarakat pendukungnya serta batas-batas daerahnya sendiri, meskipun, terutama di masa akhir-akhir ini mereka telah menyebar melampaui batas daerahnya, namun pada umumnya mereka masih tetap sebagai pendukung sistem budaya warisan leluhurnya. Adapun ke tujuh sistem budaya tersebut ialah: sistem budaya Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Kluet, Tamiyang dan Simeulue.

Meskipun antara ke tujuh sistem budaya etnis itu saling berbeda, namun ada suatu kesamaan fundamental yang penting, yaitu, bahwa banyak dari unsur-unsur budaya tersebut telah menyerap unsur-unsur ajaran Islam, bahkan dalam beberapa hal termasuk tambahan dari Islam yang datang kemudian (sejak agama tersebut dikembangkan di sana).

Kapan timbulnya keanekaragaman budaya masyarakat di daerah Aceh itu, belum berhasil diungkapkan secara meyakinkan. Tetapi suatu kesimpulan

---

1) Istilah "sistem budaya etnis" berasal dari Harsja W. Bachtiar, "Sistem-sistem budaya di Indonesia : Konsensus dan Konflik", *Kompas*, 6 Juni 1978, hal. IV.



agakny dapat diterima, bahwa sejak tahapan awal pra-sejarah daerah Aceh yang letak geografisnya di tepi Selat Malaka – suatu terusan penting dalam gerak migrasi manusia-manusia di Asia sejak mesolitikum – secara bertahap telah didatangi serta dihuni oleh manusia pendatang yang terdiri dari berbagai ras atau sub ras (tentu dengan budaya mereka yang berbeda pula). Hasil penelitian pada bukit kerang di sepanjang pesisir timur Aceh yang dilakukan oleh para ahli, seperti Meer Mohr, H.M.E. Schurmann dan lain-lain pada awal abad ke-20 dan kemudian dilanjutkan oleh Teuku Jacob pada tahun 1973–1974 membenarkan, bahwa tradisi mesolitikum dari kala post-pleistosen telah tumbuh dan berkembang di daerah Aceh Timur dan Aceh Utara. Schurmann, dari ekskavasi yang pernah dilaksanakan pada situs Tamiyang, telah menemukan antara lain cat merah, abu, pasir biru kelabu dan kuning bercampur tanah liat, kerang, tulang dan kapak genggam Sumatera (*Sumatralith*). Demikian juga yang pernah ditemukan di Lhok Seumawe, berupa kapak genggam Sumatera yang berbentuk lonjong, bulat dan meruncing serta beberapa situs baru yang berhasil ditemukan oleh Teuku Jacob di daerah Langsa. Hasil temuan tersebut menunjukkan, bahwa kehidupan masa itu sudah ada dalam taraf berburu dan mengumpulkan bahan makanan serta pencarian bahan makanan dari laut. Selanjutnya tahapan masa bercocok tanam dan tradisi megalit, berdasarkan survai kepurbakalaan yang pernah dilakukan pada tahun 1975, terdapat indikasi temuan artefak di daerah Pidie dan Aceh Utara, tetapi sangat besar kemungkinan juga ditemukan di pedalaman daerah Aceh Tengah, Tenggara dan Selatan.

Kemudian pengaruh Hindu dan Budha turut memperkaya budaya asli masyarakat di sana dalam berbagai aspeknya. Diperkirakan selama waktu itu beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Lamuri yang menurut pendapat para ahli lokasinya di daerah Aceh Besar, telah berperanan dalam mengembangkan berbagai unsur kebudayaan Hindu/Budha di sana. Namun peninggalan kedua agama tersebut, selain dari beberapa anasir yang nampak pada adat kebiasaan sehari-hari terutama di daerah terpencil, yang berupa bangunan seperti candi dan lain-lain, sampai sekarang belum dijumpai. Hal ini mungkin disebabkan pernah terjadi semacam revolusi kepercayaan akibat berkembangnya agama Islam, sehingga bangunan-bangunan yang berbau kepercayaan lama dihancurkan. Beberapa peninggalan purbakala seperti benteng Indrapatra, Indrapuri dan masih banyak lagi memiliki beberapa indikasi sebagai peninggalan zaman Hindu/Budha. Tetapi hal ini masih memerlukan penelitian purbakala lebih lanjut. Penemuan guci-guci berisi abu jenazah di Lamno Daya (Aceh Barat) serta cerita rakyat di daerah itu mengenai Pahlawan Syah sebagai penguasa Hindu yang dengan gigih menentang orang-orang Islam mungkin akan banyak memberi keterangan baru mengenai pengaruh Hindu dan Budha di daerah Aceh.

Kedatangan agama Islam merupakan awal dari perombakan budaya masyarakat yang telah hidup sebelumnya. Bersamaan dengan tersiarnya

Agama Islam, berbagai unsur budaya asli itu mulai memperlihatkan wajah baru sebagai akibat dari terserapnya berbagai unsur kebudayaan Islam. Pengaruh kebudayaan Islam itu semakin nampak setelah Islam muncul sebagai kekuatan politik di daerah Aceh. Pada mulanya didirikan beberapa kerajaan kecil, seperti Peurelak, Samudera Pasai, Aceh, Daya dan lain-lain, kemudian pada awal abad ke-16 kerajaan-kerajaan tersebut dipersatukan ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan-kerajaan inilah yang telah turut berperan dalam mewujudkan sendi-sendi masyarakat Islam di daerah Aceh.

Puncak kemajuan kebudayaan Islam dalam arti yang sesungguhnya berlangsung selama abad ke-17, terutama pada waktu Kerajaan Aceh Darussalam diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Sultan Iskandar Thani (1636–1641) dan Sultanah Syafiatuddin (1641–1675). Pada masa itu pusat-pusat pengembangan kebudayaan Islam tersebar di seluruh kerajaan, seperti *Meunasah* pada tingkat *Gampong* (wilayah terkecil yang diperintah oleh seorang *Keuchiek*), Mesjid dan Dayah pada tingkat *Mukim* (gabungan beberapa gampong diperintah oleh *Imum Mukim*), *Nanggro* (gabungan beberapa mukim diperintah oleh seorang *Ulëëbalang*), *Sagi* (gabungan beberapa *nanggro* diperintah oleh *Panglima Sagi*) dan terutama sekali di ibu-kota kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Pada masa itu juga para ulama dan pujangga, selain yang berasal dari daerah Aceh, juga banyak yang datang dari luar dan bertempat tinggal di sana, seperti Hamzah Fansuri, Syiah Kuala, Nuruddin Ar-Raniry, Muhammad Azhari dan masih banyak lagi.

Sejak awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda yang telah berhasil mengkokohkan kekuasaannya di daerah Aceh, di samping tetap mempertahankan lembaga pemerintahan adat, mulai giat pula menginstruksi berbagai unsur kebudayaan Barat, seperti sistem pemerintahan modern, pengobatan modern, sistem pendidikan modern dan sebagainya. Pada waktu itu terjadi kegoncangan nilai dalam masyarakat Aceh, namun nilai budaya masyarakat yang telah berurat berakar selama berabad-abad itu tidak banyak mengalami perubahan.

Dalam pada itu kegiatan pergerakan nasional bergelora juga di daerah Aceh. Para pemimpin rakyat giat mengadakan pembaharuan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, sambil tetap berpijak pada landasan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sedang pada waktu pendudukan Jepang tampaknya ada usaha ke arah japanisasi oleh pihak Jepang, tetapi usaha mereka ini disambut oleh rakyat dengan aksi-aksi perlawanan sampai akhir pendudukannya di sana.

Sejak meletusnya Revolusi Kemerdekaan sampai sekarang telah banyak terjadi perubahan. Para pemimpin baik yang duduk dalam pemerintahan, maupun di luarnya bersama rakyat giat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Hasil dari pembangunan itu tampak dalam berbagai segi kehidupan, antara lain dalam bidang pendidikan dengan semakin tinggi tingkat kecerdasan rakyat. Tetapi akibatnya, bila di-

lihat dari segi budaya masyarakat, terdapat kecenderungan yang tak dapat dihindari, hilangnya beberapa unsur nilai budaya, terutama yang dapat dianggap dapat menghambat pembangunan, yang selama ini dimiliki oleh rakyat Aceh. Namun secara keseluruhan ke tujuh sistem budaya masyarakat yang telah kita sebutkan di muka tampaknya akan tetap bertahan dalam masyarakat di sini berhubung adanya nilai-nilai yang diyakini – setidaknya oleh penduduk setempat – sesuai dengan keadaan masa.

## B. GARIS BESAR PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Di atas telah dikemukakan, bahwa sejak tahapan awal pra-sejarah di daerah Aceh telah berkembang tradisi mesolitik, di samping terdapat indikasi adanya tradisi bercocok tanam dan megalitik. Kalau demikian halnya dapat diduga bahwa pada waktu itu di sana juga telah berlangsung kegiatan pendidikan dalam rangka pewarisan tradisi-tradisi tersebut, meskipun keberlangsungannya mungkin hanya terbatas dalam bentuk pendidikan informal.

Kemudian datang pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha. Selama berabad-abad berakar di daerah Aceh, tidak mustahil apabila di sana juga telah tumbuh lembaga-lembaga pendidikannya baik formal maupun non-formal. Tetapi sayangnya mengenai pendidikan Hindu dan Budha di Aceh sampai sekarang belum berhasil direkonstruksikan berhubung peninggalan-peninggalannya, sebagaimana telah disinggung di muka tidak dijumpai. Beberapa anasir tradisi yang sampai sekarang masih dijumpai di beberapa tempat di daerah Aceh, seperti yang terdapat dalam sistem religi, pandai besi, kerajinan dan teknologi tradisional kemungkinan besar merupakan hasil pewarisan pendidikan Hindu dan Budha di masa itu, atau mungkin juga pada masa sebelumnya.

Setelah agama Islam bertapak di daerah Aceh dan seiring dengan proses islamisasi pendidikan Islam juga mulai tumbuh subur. Anak-anak menjelang usia sekolah mulai diajarkan dasar-dasar kepercayaan Islam oleh orang tuanya atau diantar kepada salah seorang *Teungku* di gamponnya (guru mengaji ini – umumnya wanita – biasa disebut *Teungku di rumoh*). Pendidikan formal untuk tingkat dasar umumnya diberikan di *Meunasah* dan *Meusjid* (Mesjid) yang masing-masing didirikan di tiap-tiap gampong dan mukim. Sedang untuk tingkat menengah anak-anak dapat belajar di lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama *Rangkang*. Dan apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi terdapat juga lembaga pendidikan tinggi yang disebut *Dayah* dan *Dayah Teungku Chiek*. Tidak selalu nama-nama lembaga pendidikan tersebut serupa di seluruh Aceh, namun sistem pendidikan Islam itu pada dasarnya sama; perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan dan tampaknya juga sejauh mungkin disesuaikan dengan keadaan budaya masyarakat setempat.

Lembaga pendidikan Islam yang mulai dirintis sejak awal terbentuknya masyarakat Islam itu – setidaknya-tidaknya sekitar abad ke-12 atau ke-13 –

memperoleh kemajuan pesat setelah Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya (abad ke-17). Kemajuannya tidak saja dari segi kuantitas lembaga, tetapi juga dari segi kualitas pendidikan, sehingga daerah Aceh pada waktu itu merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terpenting di Indonesia. Dan tampak sistem pendidikan Islam tradisional tersebut sampai abad ke-20 masih dapat berkembang baik berdampingan dengan sistem pendidikan Islam yang modern.

Setelah Belanda berhasil menguasai daerah Aceh, pemerintah kolonial itu rupanya juga berkepentingan dengan pendidikan rakyat di sana – tentu tidak terlepas dari tujuan penjajahannya. Maka sejak tahun 1907 diambil inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah desa (*Volksscholen*), mula-mula hanya sebuah di Aceh Besar dan kemudian dalam tahun-tahun berikutnya sampai Belanda meninggalkan Indonesia (1942) jumlahnya diperbanyak yang tersebar di seluruh daerah. Selain itu didirikan juga beberapa jenis sekolah (tingkat dasar dan menengah), seperti: *Vervolgschool*, *Inlandsche School*, *Meisjesschool*, *Hollandsch Inlandsche School*, *Ambachtschool*, *Normaal-cursus*, *MULO*, dan sebagainya.

Inisiatif pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolahnya di Aceh merupakan awal dari pembaharuan (modernisasi) pendidikan di daerah tersebut. Pembaharuan ini kemudian menjadi lebih berkembang setelah munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern (Madrasah Islam) dan sekolah-sekolah swasta, yang sebelumnya telah didirikan di pulau Jawa, yakni: Muhammadiyah dan Taman Siswa.

Madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah swasta yang didirikan itu pada umumnya mendapat sambutan baik dari masyarakat dan dalam waktu yang singkat telah tersebar luas (meskipun tidak seimbang dengan jumlah sekolah pemerintah). Adanya sambutan masyarakat terutama disebabkan oleh faktor diskriminasi dalam penerimaan murid-murid pada sekolah Belanda di samping memang rakyat kurang menyukai sekolah yang berbau kolonial itu. Dan rupa-rupanya melalui lembaga pendidikan itu pula, para pemimpin pergerakan nasional lebih leluasa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam rangka cita-cita Indonesia Merdeka.

Pada waktu pendudukan Jepang semua sekolah swasta dibubarkan dan digabung dengan sekolah pemerintah yang sistem pendidikannya lebih diarahkan kepada pendidikan kemiliteran. Hanya madrasah-madrasah Islam saja yang dibenarkan hidup; itu pun tidak luput dari pengawasan pemerintahan militer Jepang. Dapat disebutkan, bahwa selama Jepang berkuasa pendidikan di daerah Aceh mengalami kemunduran.

Demikian juga halnya selama Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) keadaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan pada masa Jepang. Pada waktu itu pemerintah bersama rakyat di Aceh lebih mencurahkan tenaganya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Barulah setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, usaha pembangunan

pendidikan kembali dapat lebih diaktifkan. Namun terganggunya keamanan di Aceh sejak tahun 1953 usaha-usaha tersebut banyak mengalami hambatan.

Titik tolak pembangunan pendidikan secara lebih berencana di daerah Aceh sesungguhnya baru dimulai semenjak pemerintah meresmikan pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh, tanggal 2 September 1959 (kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh). Sejak waktu itu pemerintah Daerah bersama rakyat dengan mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat mulai lebih giat mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialaminya selama ini. Hasil dari gerakan pembangunan pendidikan yang telah berlangsung selama 20 tahun itu tampaknya cukup menggembirakan. Banyak sekolah, terutama tingkat menengah, yang didirikan atas inisiatif masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada pemerintah atau tetap dibina sebagai sekolah swasta, di samping beberapa perguruan tinggi baik kepunyaan pemerintah maupun swasta.

Demikianlah serba singkat mengenai perkembangan pendidikan di daerah Aceh sejak zaman pra-sejarah sampai dengan dewasa ini. Pokok-pokok yang telah dikemukakan di atas akan diuraikan secara lebih terperinci lagi dalam bagian-bagian berikut. Adapun dasar uraiannya adalah hasil penelitian yang selama ini dilaksanakan sehubungan dengan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah di Daerah Istimewa Aceh. Dengan rekonstruksi sejarah pendidikan daerah Aceh ini, mudah-mudahan berguna bagi keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan umumnya dan pendidikan nasional khususnya.

---

## BAB II

### PENDIDIKAN TRADISIONAL DI DAERAH ACEH

#### A. PENDIDIKAN SEBELUM KEDATANGAN AGAMA ISLAM

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pertama di muka, bahwa usaha untuk merekonstruksikan peristiwa-peristiwa kependidikan di daerah Aceh sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam, terutama yang terpenting mengingat kegiatan pendidikan diperkirakan telah melembaga secara formal pada zaman pengaruh Hindu dan Budha, tampaknya sangat mengalami kesulitan kalau tidak dikatakan mengalami kegagalan berhubung data-data untuk itu sampai sekarang belum diketemukan. Penelitian-penelitian arkeologi yang baru dilakukan di beberapa situs belum berhasil mengungkapkan sejauh mana peranan agama Hindu dan Budha di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah Aceh. Dan tampaknya terdapat kecenderungan penelitian-penelitian semacam itu akan memperoleh hasil yang sungguh sedikit, mengingat di sana diperkirakan telah terjadi semacam revolusi kepercayaan akibat berkembangnya agama Islam, sehingga peninggalan-peninggalan yang berbau kepercayaan lama telah dihancurkan. Karena itu dalam uraian ini hanya dikemukakan tidak lebih dari indikasi-indikasi mengenai kegiatan pendidikan yang telah berlangsung pada waktu itu di daerah Aceh.

Telah disebutkan juga, bahwa sejak tahapan awal pra-sejarah di daerah Aceh diperkirakan telah berlangsung kegiatan pendidikan. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti temuan artefak tradisi Mesolitik, di samping adanya indikasi temuan artefak tradisi bercocok tanam dan megalitik hampir di tiap wilayah budaya etnis di sana (Aceh, Gayo, Alas Aneuk Jamee dan lain-lain)<sup>1</sup>. Pe-

---

1. Mengenai keadaan tradisi-tradisi tersebut lihat lebih lanjut, Muhammad Ibrahim (Ketua tiim), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K, 1977/1978, hal. 12-33.

warisan dan perkembangan tradisi-tradisi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan pendidikan, meskipun hanya terbatas dalam bentuk pendidikan informal saja.

Keberlangsungan pendidikan selama masa Mesolitikum terutama ditujukan untuk memudahkan tekonologi yang amat bersahaja, seperti ke-trampilan membuat kapak genggam Sumatra (*Sumatralith*), alat-alat dari tulang untuk keperluan berburu dan mengumpulkan bahan makanan pada umumnya. Selanjutnya dari eskavasi yang pernah dilakukan pada beberapa situs bukit karang di sepanjang pesisir timur Aceh diperkirakan, bahwa mereka bertempat tinggal dalam rumah-rumah bertiang di tepi pantai dengan kegiatan pencaharian bahan makanan dari laut.<sup>2</sup> Kalau sekiranya dugaan ini mengandung kebenaran, dapat pula diperkirakan pada waktu itu kegiatan pendidikan di bidang pertukangan, untuk membangun rumah-rumah bertiang, juga telah berkembang; dan tidak mustahil kegiatan pembuatan perahu,<sup>3</sup> untuk mencari bahan makanan dari laut, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Tampaknya tradisi pembuatan rumah Aceh bertiang dengan bahan dari kayu dan atap rumbia yang hidup sampai sekarang, besar kemungkinan merupakan pewarisan dari masa itu dengan beberapa perubahan pada masa-masa selanjutnya<sup>4</sup>; demikian pula tradisi pembuatan perahu. Selain itu dari penggalian tersebut pada beberapa situs juga ditemukan cat merah. Ini menimbulkan dugaan kemungkinan alam kepercayaan telah tumbuh pada waktu itu yang pewarisannya terus berlanjut sampai pada masa neolitikum dan perunggu. Bahkan anasir kepercayaan animisme dan dinamisme yang berasal dari zaman pra-sejarah itu sampai masa sekarang di daerah-daerah terpencil dari wilayah budaya etnis di seluruh Aceh belum hilang sama sekali. Hal ini umpamanya dapat kita lihat pada upacara kenduri tahunan, kendati pun sudah sangat jarang, di bawah pohon-pohon besar yang mungkin dianggap mempunyai kekuatan gaib atau tempat tinggal roh-roh gaib, pemakaian ijuk (bulu pohon enau) pada bubungan rumah Aceh di bagian yang terbuka, yaitu pada bagian timur dan barat (bahasa Aceh *Tulak angen*) untuk menghindari masuknya roh-roh jahat ke dalam rumah, kepercayaan kepada *burong tujuh* dan masih banyak lagi<sup>5</sup> yang merupakan hasil pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kegiatan pendidikan.

2. Ibid., hl. 21 -3; lihat juga Tjoet Nyak Kusmiati, *Manusia dan Kebudayaan Aceh Menjelang Kedatangan Islam*, paper pada Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Rantau Kuala Simpang, 25-30 September 1980, hl. 1; Koentjaraningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, 1954, hl. 54-5.

3. Lihat juga Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Medan, 1961, hl. 5.

4. Rumah Aceh didirikan membujur arah timur-barat. Tradisi ini terjadi kemungkinan setelah agama Islam berkembang di sana, yaitu untuk menunjukkan arah Kiblat (arah ke barat).

5. Lihat lebih lanjut, *Adat Istiadat Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, Dep. P dan K, 1977/1978, hal. 4 dst.

Sehubungan dengan pengembangan tradisi bercocok tanam dan megalitik, hal-hal yang dipelajari tentu yang berkaitan dengan tradisi tersebut, terutama cara-cara pembuatan alat-alat bercocok tanam, senjata dari batu halus dan perunggu, bangunan-bangunan dari batu-batu besar dan sebagainya (kedua tradisi ini berkembang pada masa neolitikum dan perunggu). Sayangnya temuan artefak masa ini sampai sekarang belum ada. Namun tidak mustahil alat-alat pertanian di Aceh, seperti: *langai*, *creuh* (alat membajak), senjata seperti rencong dan sebagainya (rencong yang dianggap baik selalu terdapat campuran tembaga) merupakan warisan hasil belajar masa ini yang pada masa pengaruh Hindu-Budha dan Islam lebih disempurnakan lagi (umpamanya bentuk rencong sekarang yang mungkin berkembang sejak pengaruh Islam sangat mirip dengan lambang "Bismillah" – nama Allah – tulisan Arab). Selanjutnya orang-orang pada masa bercocok tanam telah mulai tinggal menetap dan karenanya tidak mustahil pula, apabila awal pembentukan masyarakat *gampong* dimulai pada periode ini. Namun bagaimanapun hal-hal yang disebutkan di sini diperlukan penelitian arkeologi secara lebih mendalam, sehingga gambaran mengenai pendidikan pada zaman pra-sejarah itu akan menjadi lebih jelas adanya.

Selain dari yang telah diuraikan di atas perlu juga dikemukakan, bahwa menurut pendapat para ahli, di antaranya G.Ferrand yang telah meneliti kepustakaan Arab India, Indonesia, Cina dan Portugis, sekitar abad ke-2 dan ke-10 Masehi telah terjadi perpindahan orang-orang Indonesia ke Madagaskar dan perpindahan yang berlangsung pada waktu itu pada umumnya berasal dari Aceh.<sup>6</sup> Ini berarti bahwa kemungkinan besar pelayaran, kendati pun dalam bentuk sederhana, serta teknologi perkapalan, berupa cara pembuatan perahu-perahu besar untuk mengarungi lautan luas telah dikembangkan di Aceh. Dan tampaknya sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan pada waktu itu pengaruh kebudayaan Hindu-Budha telah mulai berakar dalam masyarakat Aceh (setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi perkembangan agama Hindu dan Budha di Daerah Aceh, seperti juga di bagian lain Indonesia, telah mulai menampakkan corak kehidupannya tersendiri).

Kapan sebenarnya pengaruh Hindu dan Budha mulai bertapak di daerah Aceh, tidak diketahui dengan pasti. Tetapi barangkali dapat diperkirakan setidak-tidaknya abad ke-2 sampai abad ke-4 Masehi, seperti juga di bagian lain Indonesia, telah ada di Aceh. Hal ini mengingat letak geografis Aceh di perairan Selat Malaka, sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Indonesia. Ketidak-pastian itu terutama disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber sejarah yang meyakinkan. Peninggalan-peninggalan Hindu-Budha seperti prasasti, candi, arca dan sebagainya sampai sekarang belum diketemukan di sana. Memang ada sebuah arca kepala dari Budhisatwa Avalokitesvara abad

---

6. Tjoet Nyak Kusmiati, *op. cit.*, hl. 6



ke-9 yang sekarang disimpan di Museum Pusat Jakarta dan yang menurut Ny. S. Soelaiman ditemukan di daerah Indrapuri (Aceh Besar),<sup>7</sup> namun arca tersebut sama sekali belum dapat memastikan tentang kedatangan dan proses perkembangan pengaruh Hindu-Budha di Aceh. Hal ini sama saja dengan penemuan guci-guci berisi abu jenazah di daerah Lamno Daya (Aceh Barat) serta cerita rakyat mengenai Pahlawan Syah raja Hindu di sana dan juga cerita rakyat tentang raja Hindu yang perkasa di daerah Indrapuri (Aceh Besar). Karena itu tidak mengherankan apabila sampai sekarang para ahli belum berhasil menetapkan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang pernah berdiri di Aceh. Dari beberapa kerajaan yang pernah dipersoalkan, tampaknya hanya kerajaan Lamuri yang dianggap benar lokasinya di sana, yaitu di Aceh Besar; sedang kerajaan Poli umpamanya masih tetap dipertanyakan.<sup>8</sup>

Meskipun masalah kedatangan agama Hindu-Budha dan berdirinya kerajaan Indonesia Hindu/Budha di daerah Aceh belum berhasil terpecahkan secara meyakinkan, namun para ahli antara lain Snouck Hurgronje<sup>9</sup>, van Langen<sup>10</sup> dan Julius Jacobs<sup>11</sup>, pada umumnya sependapat bahwa pengaruh kedua agama tersebut pada berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh dianggap cukup besar (setidak-tidaknya sebelum pengaruh kebudayaan Islam berakar pada masyarakat Aceh). Pengaruh itu tidak saja terbatas di Aceh Besar saja, tetapi juga meluas sampai ke pesisir timur dan barat Aceh. Tempat-tempat/daerah-daerah yang dianggap mempunyai indikasi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Hindu-Budha di sana antara lain ialah Lamno Daya (Aceh Barat), Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri (Aceh Besar) dan Pidie. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Mesjid Indrapuri yang diperkirakan dibangun oleh Iskandar Muda (1607-1636) didirikan di atas fondasi sebuah candi<sup>12</sup>.

Kalau demikian halnya, dapat pula diperkirakan, setidaknya di sekitar daerah-daerah yang disebutkan di atas itu kemungkinan besar terdapat juga berbagai jenis lembaga pendidikan Hindu-Budha pada waktu itu. Kalau sekiranya pernah didirikan, tentu ada lembaga-lembaga pendidikan, seperti biara, peguron pertapaan dan sebagainya, yang memberi pelajaran mengenai berbagai hal yang menyangkut dengan kepercayaan Hindu dan Budha. Ba-

7. *Ibid.*, hl. 5

8. Mengenai beberapa kerajaan tersebut yang dipertanyakan itu, lihat. a.l. Muhammad Ibrahim (Ketua), *op.cit.*, hl. 34-42; Mohammad Said, *op.cit.*, 25-37.

9. Lihat bukunya, De Atjehhers (dua jilid), E.J. Brill, 1893 dan 1894 (Leiden).

10. Lihat karangannya dalam *BTLV, BAG. III*, hl. 381-471 (1888), "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat".

11. Lihat bukunya, *Het Familie - En Kampongleven op Groot Atjeh* (dua jilid), E.J. Brill, Leiden, 1904.

12. Lihat, Anthony Reid, *The Contest For North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898*, University of Malaja Press, Kuala Lumpur, 1969, hl. bergambar (gbr. III a).

rangkali kebiasaan membakar kemenyan pada malam Jumat dan mandi ke laut pada Rabu akhir bulan Safar yang pada saat ini hampir tidak dilakukan lagi oleh rakyat Aceh di gampong-gampong, termasuk hasil pewarisan pendidikan pada waktu itu kendati pun anasir Islam nampak di dalamnya (malam Jumat dan Bulan Safar). Di samping itu tidak mustahil pula apabila ada lembaga-lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan berbagai jenis ketrampilan, seperti kerajinan, pandai besi dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Agaknya kerajinan menenun kain sarung Aceh (*Pek teupeun*) dan pandai besi termasuk hasil belajar pada waktu itu yang diwariskan secara turun temurun. Di mana saja pernah didirikan pusaka kerajaan dan perbengkelannya belum diketahui; mungkin Gampong Pandee yang terletak di pinggiran Kota Banda Aceh sekarang termasuk salah satu pusat perbengkelan pandai besi yang terkenal sejak berkembangnya pengaruh Hindu-Budha di Aceh. Namun apa yang dikemukakan itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut, yang tampaknya memerlukan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Dengan demikian diharapkan pada suatu waktu nanti pendidikan masa pengaruh Hindu-Budha di daerah Aceh akan dapat direkonstruksikan secara lebih sempurna.

## B. PENGARUH AGAMA ISLAM

### 1. Kelembagaan

Kehadiran pendidikan Islam di daerah Aceh sama tuanya dengan kehadiran agama itu di daerah tersebut, sebab antara pendidikan Islam dengan proses islamisasi, sebagaimana juga setiap penyiaran agama lainnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi kapan agama Islam mulai bertapak di daerah Aceh merupakan suatu masalah yang masih sukar dipecahkan. Sebagian para sarjana Barat<sup>13</sup> berpendapat, bahwa penyiaran agama Islam di sana baru dimulai sekitar abad ke-13 Masehi, namun teori ini nampaknya tidak dapat dipertahankan lebih lama. Pada saat ini umumnya orang cenderung berpendapat, seperti yang disimpulkan oleh Seminar Sejarah di Medan (tahun 1963: Masuknya Islam ke Indonesia); Banda Aceh (1978: Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh) dan Rantau Kuala Simpang (1980: Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara), bahwa proses islamisasi telah dimulai di Aceh sejak abad pertama Hijriah atau akhir

---

13. Sarjana Barat yang dianggap sebagai pelopor teori ini ialah Dr. C. Snouck Hurgronje yang dipaparkan dalam bukunya, "De Islam in Nederlandch Indie", dalam *Groote Godsdiensien*, seri II, Hollandia Drukkerij, 1913, hl. 359-392; sebagai pengikut-pengikutnya, a.l. ialah: J.P. Moquette, R.A. Kern, H.K.J. Cowan dll.; lihat lebih lanjut Muhammad Ibrahim dan Rusdi Sufi, *Sekelumit Pendapat tentang Proses Islamisasi dan Munculnya Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh*, Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 1980.

abad ke tujuh dan delapan Masehi,<sup>14</sup> namun hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pada awal penyiaran Islam itu kegiatan pendidikan dilakukan dengan sistem dakwah. Dan tampaknya hikayat Aceh yang sangat digemari oleh masyarakat di sana sejak sebelum Islam datang merupakan media pendidikan yang penting di samping media-media lainnya. Melalui hikayat dimasukkan unsur-unsur ajaran Islam yang digambarkan sebagai lebih unggul bila dibandingkan dengan dasar-dasar kepercayaan Hindu-Budha. Hal ini nampak seperti dalam hikayat *Malem Dewa*, *Hikayat Kancamara*, *Hikayat Naggro Meusee* dan masih banyak lagi.<sup>15</sup>

Kemudian dalam waktu yang singkat terbentuk pula keluarga-keluarga Islam terutama di gampong-gampong sekitar kota pelabuhan. Orang-orang tua yang telah menganut agama Islam itu tentu tidak mengabaikan pendidikan Islam kepada keluarganya. Mereka mulai mengajarkan dasar-dasar akidah (kepercayaan), ibadah dan muamalah Islam kepada anak-anaknya di rumah (bahasa Aceh *romoh*) mereka masing-masing. Dalam pada itu jumlah keluarga Islam semakin banyak juga sementara keluarga yang telah lebih dulu Islam, ilmunya di bidang keislaman semakin luas dan mendalam. Karena itu tidak mustahil apabila keluarga yang baru masuk Islam, setidaknya anaknya mereka, dan orang-orang yang berminat kepada Islam mulai berdatangan ke rumah-rumah keluarga tersebut untuk belajar agama Islam. Sejak waktu itu muncul pengajian-pengajian formal di rumah-rumah yang dianggap alim oleh penduduk setempat, sehingga dapat disebutkan bahwa rumah merupakan lembaga pendidikan formal Islam tingkat dasar yang pertama lahir di Aceh. Agaknya istilah *Teungku Dirumoh* mulai dikenal sejak waktu itu, meskipun kemudian pengertiannya dibatasi hanya kepada seorang wanita alim, umumnya isteri Teungku *Meunasah* atau isteri *Khatib* Mesjid, yang mengadakan pengajian-pengajian di rumahnya khusus bagi anak-anak wanita.

Selanjutnya, apabila keluarga-keluarga Islam telah tersebar luas di gampong-gampong, terbentuk pula masyarakat gampong Islam yang pada gilirannya menggantikan masyarakat gampong Hindu-Budha. Beriringan dengan lahirnya masyarakat gampong Islam itu didirikan pula lembaga gam-

---

14. Lihat, *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia*, Panitia Seminar, Medan, 1963 dan *Risalah Kesimpulan Seminar di Banda Aceh serta Rantau Kuala Simpang*, Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1978 dan 1980; Lihat juga, Muhammad Ibrahim (Ketua), *op.cit.*, hl. 61-5; dan Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh*, dalam tahun 1520-1675, Penerbit Monora, Medan, hl. 16-24.

15. Mengenai Hikayat Aceh dalam proses islamisasi, lihat lebih lanjut, UU. Hamidy", *Islamisasi melalui Hikayat Aceh*" *Sinar Darussalam*, No. 65, Desember/Januari, 1975/1976, hl. 4-14; dan—, *Kebijaksanaan mempergunakan Hikayat Dalam masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*, Kertas Kerja pada Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Rantau Kuala Simpang, 25-30 September 1980.

pong yang dikenal dengan nama: *Meunasah* atau mungkin saja lembaga serupa meunasah sudah dikenal oleh masyarakat Aceh jauh sebelumnya, namun nama aslinya sampai sekarang belum diketahui. Meunasah berasal dari bahasa Arab; *Madrasah*, kadang-kadang disebut juga *Meulasah*, *Beunasah*, *Beulasah* (di daerah pemukiman kelompok etnis Aceh), *manasah* atau *balai* (di daerah pemukiman kelompok etnis Gayo, Alas dan Kluet)<sup>16</sup> di samping berfungsi sebagai balai musyawarah gampong dan tempat sembahyang berjamaah, juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, khususnya bagi anak laki-laki dan para pemuda di gampong tersebut (mengenai pengetahuan yang diajarkan dan Teungku Meunasah yang juga berfungsi sebagai guru di meunasah, lihat bagian lebih lanjut dalam bagian berikut di bawah). Di samping itu, khusus untuk tempat sembahyang berjamaah dan tempat belajar para wanita, terutama yang telah dewasa, dibangun pula lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama: *Deyah*. Lembaga pendidikan yang juga memberi pelajaran tingkat dasar ini lebih dikenal di daerah pesisir barat dan selatan Aceh, sedang di pesisir utara dan timur agaknya kurang dijumpai (mungkin masyarakat di daerah yang disebutkan terakhir lebih dikenal *Dayah* sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam). Dengan demikian pada awal terbentuknya masyarakat Islam di Aceh sudah dikenal tiga jenis lembaga pendidikan dasar, yaitu: *Rumoh*, *Meunasah* dan *Deyah*.<sup>17</sup>

Selanjutnya gampong-gampong yang telah membentuk masyarakat Islam, jumlahnya semakin bertambah. Maka, tiga atau lebih masyarakat gampong yang berdekatan mulai pula merencanakan untuk mendirikan sebuah mesjid sebagai tempat shalat Jumat, salah satu shalat wajib khusus bagi laki-laki yang menurut ketentuan hukum Islam merupakan shalat (sembahyang yang wajib hukumnya). Mesjid tidak saja sebagai tempat shalat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Di sekeliling kampus mesjid, arah samping dan belakang didirikan bangunan-bangunan kecil yang dikenal dengan nama *rangrang* tempat tinggal para pemuda yang sedang belajar di mesjid tersebut (pada waktu sekarang keadaan yang serupa ini hampir tidak dijumpai lagi). Kajian mereka di sini umumnya telah meningkat kepada berbagai masalah hukum Islam (*fiqh*) secara lebih luas dan mendalam, sehingga

---

16. Lihat lebih lanjut, R.A. Hoesin Djajadiningrat, *Atjehsch-Nederlandch*, Jilid II, Landsdrukkerij, Batavia, 1934 hl. 68-9; Drs. M. Isa Sulaiman dan Drs. Zakaria Ahmad, *Peranan Meunasah Sebagai Pusat Pendidikan di Aceh* (suatu studi Permulaaan); Drs. Tgk. Sulaiman Jalil, *Peranan Meunasah Sebagai Pusat Pendidikan Desa di Aceh*, kedua-duanya kertas kerja Diskusi dalam rangka Peringatan hari Aksara Internasional, di Banda Aceh, 28 Agustus 1980.

17 Untuk tidak menjadi pengaburan istilah, di sini kamu membedakan antara *deyah* sebagai lembaga pendidikan dasar untuk para wanita dewasa dan *dayah* sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan berbagai cabang ilmu Islam, seperti Tafsir, Hadist, Fiqh, Tasuf dan sebagainya.

dapat pula disebutkan, bahwa rangkang merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang pernah lahir di Aceh.

Selain itu perlu juga dikemukakan bahwa kesatuan gampong yang berada dalam lingkungan sebuah mesjid, agaknya merupakan awal dari pembentukan lembaga pemerintahan *Mukim* di Aceh (istilah Mukim yang berarti, tempat tinggal, berasal dari bahasa Arab). Kepala pemerintahan mukim disebut *Imum Mukim*; dan kemudian setelah Islam menggantikan agama Hindu-Budha sebagai kedudukan politik di daerah Aceh, lembaga pemerintahan mukim itu menjadi bagian dari struktur pemerintah kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan di sana.

Kapan kerajaan-kerajaan Islam yang bersifat lokal itu didirikan di daerah Aceh, merupakan masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Namun para ahli umumnya sependapat, bahwa sampai akhir abad ke-15 di sana telah berdiri beberapa kerajaan Islam yang besar peranannya, terutama dalam pembentukan kebudayaan Islam di daerah tersebut. Adapun kerajaan-kerajaan itu antara lain ialah: Kerajaan Peureulak, Tamiang, (Aceh Timur); Samudra Pasei (Aceh Utara), Lingga (Aceh Tengah), Kerajaan Pidie (Aceh Pidie), Kerajaan Lamuri/Aceh (Aceh Besar) dan Kerajaan Daya (Lamno, pantai Barat).<sup>18</sup> Sejalan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada dalam wilayahnya. Tampaknya raja-raja yang memerintah di sana turut berperan dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan di daerah kekuasaannya. Selain meunasah, mesjid dan rangkang, juga mulai didirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikenal dengan nama: *dayah* atau *dayah Teungku Chiek* (dayah yang dipimpin oleh seorang ulama besar). Berapa jumlah lembaga pendidikan dalam wilayah kerajaan itu masing-masing, tidak diketemukan data-data yang meyakinkan. Beberapa dayah (asal kata dari *zawiyah*, bahasa Arab) yang agaknya didirikan pada waktu itu, antara lain ialah: Dayah Cot Kala di Kerajaan Peureulak yang pada mula didirikan dipimpin oleh Teungku Chiek Muhammad Amin, Dayah Seuruleu dari Kerajaan Lingga di bawah pimpinan Syekh Sirajuddin, Dayah Blang Peuria dari Kerajaan Samudra Pasei di bawah Pimpinan Teungku Chiek Blang Peuria (Teungku Ja'kob). Dayah Batu Karang di Kerajaan Tamiyang yang dipimpin oleh Teungku Ampon Tuan dan Dayah Lam Keuneu'eun dari Kerajaan Lamuria Islam/Aceh di bawah pimpinan Teungku Syekh Abdullah Kan'an.<sup>19</sup>

---

18. Uraian lebih lanjut mengenai kerajaan-kerajaan tersebut, lihat, a.l., Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hl. 28-39; Muhammad Ibrahim dan Rusdi Sufi, *loc.cit.*, Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hl. 36-55.

19. Mengenai dayah-dayah tersebut lihat, A. Hasjmy, "Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah, *Sinar Darussalam*, no. 63, Agustus/September, 1975, hl. 8-9; juga dalam H. Ismuha, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh*, Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 1978 (Kertas Kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh).

Kalau didasarkan pada kesimpulan Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara (Rantau Kuala Simpang, 25–30 September 1980) mengenai tahun berdirinya kerajaan Peureulak sebagai Kerajaan Islam tertua di kawasan ini, maka Dayah Cot Kala dapat dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang tertua di Aceh, bahkan juga di Asia Tenggara. Menurut kesimpulan Seminar itu, berdasarkan lembaran-lembaran lepas dari naskah tua, *Izharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak*, karangan Syekh Ishak Makarani Al Pasi dan Naskah *Tazjirat Thabakat Jam'u Salatin*, Kerajaan Islam Peureulak didirikan pada tahun 225 H (sekitar 840 M)<sup>20</sup> dengan rajanya yang pertama Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah. Namun untuk kebenaran kedua sumber tersebut masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut, terutama melalui studi komperatif dengan sumber kepurbakalaan lainnya. Mengikuti sumber Izharul Haq, Teungku Chiek Muhammad Amin yang telah disebutkan sebagai pemimpin Dayah Cot Kala adalah raja keenam Kerajaan Peureulak (922–946) yang setelah dinobatkan bergelar dengan Makhdom Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat. Ini berarti kalau sekiranya sumber tersebut benar, Dayah Cot Kala telah didirikan setidaknya sejak awal ke 10 M (Teungku Chiek Muhammad Amin memimpin Dayah Cot tersebut sebelum dinobatkan menjadi raja).

Selain itu data-data mengenai perkembangan pendidikan Islam di Samudra-Pasei tampaknya lebih meyakinkan, bila dibandingkan dengan di kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Rupa-rupanya pada waktu kerajaan ini mencapai puncak kejayaan selama abad ke-14 M, pendidikan juga menduduki tempatnya tersendiri. Hal ini dapat diketahui, antara lain dari keterangan Tome Pires yang menyatakan, bahwa di Samudra Pasei banyak terdapat kota-kota besar di mana di antara warga kota itu terdapat pula orang-orang yang berpendidikan.<sup>21</sup> Pasei sekitar abad ke-14 menurut Ibnu Batutah sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan di sini banyak berkumpul ulama-ulama dari negeri-negeri Islam. Sebelum Malaka berkembang, Kerajaan Samudra Pasei menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Ibnu Batutah mengatakan juga bahwa Sultan Malikul Zahir (1297–1326) adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari Jumat Sultan bersembahyang di Mesjid dan menggunakan pakaian ulama dan setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para ahli pengetahuan agama.<sup>22</sup> Ulama-ulama terkenal pada waktu itu antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, Kadhi Amir Said dari Shiraz, Tajuddin dari Isfahan, Teungku Cot Mamplam

20. Lihat lebih lanjut, Naskah Kesimpulan, *loc.cit.*; dan juga *Kumpulan Kertas Kerja Seminar*, Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1980.

21. Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, Vol I translated and edited by Armando Cortesao, Printed for the Hakluyt - Society, London, 1944, hl. 143.

22. *Ibnu Batutah, Travel in Asia and Afrika*, Terjemahan H.A. R. Gibb, George Routledge & Son, Ltd., London, hl. 274 dst.; T. Iskandar, *Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Prasarana pada Seminar Kebudayaan dalam rangka PKA II, Banda Aceh 1972, hl. 2.

dan Teungku Cot Geureudong. Makam-makam dari pualam ini sebahagian besar telah berhasil ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa Meunasah, Mesjid, Rangkang dan Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam di samudra Pasei pada waktu itu telah memegang peranan penting dalam mencerdaskan rakyat di sana, sama halnya juga di kemudian hari pada masa kerajaan Aceh Darussalam.

## 2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sampai Abad ke-20

Pada awal abad ke-16 Kerajaan-kerajaan lokal di Aceh berhasil dipersatukan ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514–1528).<sup>23</sup> Sejak waktu itu status kerajaan-kerajaan tersebut dijadikan Naggro (daerah Uleebalang) yang diperintah oleh seorang Uleebalang (umumnya berasal dari keturuann raja-raja lokal itu sendiri) dan tunduk kepada pemerintah pusat di Bandar Aceh Darussalam.

Seerti telah disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas, kerajaan Aceh Darussalam mulai mencapai kemajuan dikendalikan oleh Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Kemajuan itu tidak saja terlihat dalm bidang pertahanan dan keamanan negara, hubungan dengan luar negeri dan kemakmuran rakyat, tetapi juga yang tidak kurang pentingnya adalah dalam bidang pendidikan.

Kemajuan pendidikan pada waktu itu ditandai oleh banyaknya ahli ilmu pengetahuan (ulama) yang berkumpul terutama di ibukota kerajaan (beberapa di antara mereka yang dipandang sebagai tokoh pendidikan dalam bagian berikut di bawah) dan usaha pembangunan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh wilayah kerajaan. Di samping dilakukan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan (meunasah, mesjid, rangkang dan daya) lama di daerah bekas kerajaan-kerajaan lokal dulu (naggro) juga didirikan sejumlah besar lembaga pendidikan baru, sedang di ibukota Bandar Aceh Darussalam, untuk lebih memberikan kesan sebagai kota pusat pengembangan ilmu pengetahuan didirikan *Mesjid Baitul Musyadah* dan *Baitur-Rahman*,<sup>24</sup> dengan *Jami'ah Baitur-Rahmannya*. Jami'ah ini dapat disamakan dengan sebuah institut pada masa sekarang, sebagai pusat studi berbagai cabang ilmu pengetahuan; dan diperkirakan setida-tidaknya ada tujuh belas "lembaga" di sana yaitu: 1. *Daaru'l-Ahkam* (hukum); 2. *Daaru'l-Kalam*(Theologi); 4. *Daaru'l-Nahwi* (Bahasa Arab); 5. *Daaru'l Madzahib* (Perbandingan Mazhab); 6. *Daaru'La-Falsafah* (Filsafat); 7. *Daaru'l-Aqli* (logika); 8. *Daaru'l-Hisab* (Ilmu falak); 9. *Daaru'l-Trikh* (Sejarah); 10. *Daaru'l-Harb* (Ilmu Peperangan); 11. *Daaru'l-Thib* (Ta-

---

23. Uraian lebih lanjut tentang kegiatan Sultan Ali Mughyat Syah sebagai pendiri Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan lokal, yang atda di Aceh pada waktu itu, seperti Pidie, Samudra Pasei, Daya dan sebagainya., lihat a.l. Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hl. 35–40.

24. Nuruddin Ar Raniry, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T. Iskandar, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966, hl. 36.

bib); 12. *Daaru'l-Kimiya* (kimia); 13. *Daaru's-Siyasah* (Politik); 14. *Daaru'l Wazarah* (Pemerintahan); 15. *Daaru'l-Khazanah Baitil-Maal* (Keuangan Negara); 16. *Daaru'z-Ziraa'ah* (Pertanian) dan 17. *Daaru'l-Ardli* (Pertembangan)<sup>25</sup>

Mengenai kemajuan pendidikan khusus di ibu kota Bandar Aceh Darussalam pada waktu itu, kiranya laporan perjalanan Augustin de Bealuleu dapat memberikan sekedar gambaran. Bealieu mengatakan, bahwa di sana seni kerajinan yang berhubungan dengan pertukangan sangat dihargai, di kota tersebut banyak terdapat tukang besi yang pandai membuat bermacam-macam alat dari besi, tukang kayu yang ahli membuat kapal dan perahu dari kayu dan juga tukang penuang tembaga yang mahir. Kapal-kapal *galley* orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar. Layar-layar pada kapal itu berbentuk segi empat sama dengan layar-layar pada kapal milik Perancis. Papan-papan pada sisi kapal tebalnya enam jari jempol, karenanya sebuah kapal milik kerajaan Aceh tidak kalah dengan sepuluh kapal *galley* milik orang Portugis.<sup>26</sup> Kiranya keahlian semacam ini tidak mungkin ada, tanpa melalui lembaga pendidikan; dan agaknya lembaga tersebut tidak mustahil juga berpusat di *Jami'ah-Baitur-Rahman*, mengingat sejumlah lembaga yang telah disebutkan di atas.

Berapa jumlah lembaga pendidikan (dari rendah sampai tinggi) selama berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, terutama di masa jayanya pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 itu tidak diketahui dengan pasti. Snouck Hurgronje yang dianggap sebagai peneliti perintis mengenai soal-soal Aceh dalam karya besarnya, *De Atjehhers* (2 jilid, 1893/1894) juga tidak menyinggung jumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh pada waktu itu. Ia memang menyebutkan beberapa nama Dayah<sup>27</sup> yang mungkin dianggap penting di sana sambil menguraikan peranan meunasah dan juga dayah dalam masyarakat Aceh. Namun ilustrasi agaknya dapat dijelaskan sebagai berikut. Di tiap gampong agaknya dapat dijelaskan sebagai berikut. Di setiap gampong terdapat setidaknya-tidaknya satu meunasah (kadang-kadang gampong yang agak luas didirikan dua meunasah). menurut statistik tahun 1972 di Aceh terdapat 5.500 gampong dan meunasah/langgar ada 5.883 buah.<sup>28</sup> Sebagian besar dari gampong dan meunasah tersebut kendati pun meunasahnya diperbaiki atau dibangun yang baru adalah berasal dari masa yang lalu. Demikian pula di tiap *mukim* selalu terdapat sebuah mesjid yang umumnya dikelilingi oleh *rangkang*

---

25. H. Ismuha, *op.cit.*, hl. 2; istilah: *Daar* (*u'l, u't u'n*) diterjemahkan dengan "Fakultas", tetapi dalam kutipan ini tidak ciantumkan.

26. Lihat kisah perjalanan Augustin de Bealieu ke Aceh, dalam, Julius Jacobs, *op.cit.*, hl. 242-250.

27. Lihat a.l., misalnya hl. 27-9.

28. Universitas Syiah Kuala, *Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Darussalam, Banda Aceh, 1972, tabel III - 4 tabel XII - 7.



(pada waktu itu). Angka tahun 1972 menunjukkan jumlah mukim sebanyak 594 dan mesjid sebanyak 1.475 buah.<sup>29</sup> Dari hasil observasi tim peneliti ke daerah-daerah menunjukkan, bahwa ada mesjid-mesjid di daerah mukim umumnya tua sekali (sampai sekarang belum dipugar/diperbaiki). Sedang hasil observasi ke daerah-daerah bekas wilayah *nanggro*, terutama di pesisir utara dan timur (*nanggro* kumpulan beberapa mukim yang setelah kemerdekaan pada umumnya berstatus *negeri*, meudian kecamatan dan menurut statistik tahun 1972 di Aceh terdapat 129 kecamatan),<sup>30</sup> menunjukkan kesan bahwa hampir di setiap daerah tersebut pernah didirikan setidaknya-tidaknya sebuah dayah (berdasarkan pengamatan dan cerita orang-orang tua setempat, bahkan ada nama dayah/pesantren yang diwariskan sampai sekarang dan menurut mereka nama tersebut telah ada sejak zaman Iskandar Muda).

Rupa-rupanya pembangunan dayah tidak hanya terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, tetapi juga pada masa kemundurannya (akhir abad ke-18 dan ke-19). Sejumlah dayah yang diperkirakan didirikan dan berkembang selama abad ini antara lain ialah: Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abee, Dayah Tgk. Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayak Lam Krak, Dayah Lam Pucok dan Dayah Lam U di Aceh Besar; Dayah Rumpet di Kuala Daya, pantai barat; Dayah Tgk. Chiek Ditiro, Dayah Tgk. Chiek Tante Geulima, di Aceh Pidie, Dayah Meunasah Blang (Samalanga) dan beberapa Dayah di sekitar *kuta* pertahanan Batee Iliék yang memegang peranan penting selama perang Belanda di sana, seperti Dayah Cot Meurak, Dayah Pulo Baroh dan lain-lain (Aceh Utara).<sup>31</sup>

Data mengenai tahun didirikannya dayah-dayah tersebut di atas sampai sekarang belum diperoleh secara lengkap. Tampaknya Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abee termasuk Dayah yang besar dan paling berpengaruh selama abad ke-19. Sampai sekarang daya yang terletak dekat Selimeum (Aceh Besar) itu mempunyai khazanah yang lengkap dengan buku-buku bernilai hasil karya para ulama terkenal masa lampau, ada yang berumur lebih 400 tahun dan dapat kita persaksikan di perpustakaan tersebut. Dayah ini diperkirakan didirikan pada awal abad ke-19 oleh seorang ulama yang datang dari Bagdad, Syekh Idrus Bayan, atas permintaan Sultan Muhammad Syah (1824–1836). Setelah Syekh Idrus Dayan yang dikenal juga sebagai Tgk. Chiek Tanoh Abee, yang memimpin dayah tersebut berturut-turut ialah: Syekh Abdul Hafidh, Syekh Abdur Rahim, Syekh Muhammad Salih, Syekh Abdul Wahab yang juga dige-

---

29. *Ibid.*

30. *Ibid.*

31. A. Hasjmy, Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah, *Sinar Darussalam*, no. 63, Agustus/September, 1975, hl. 5–38; Muhammad Ibrahim, *Benteng Batee Iliék Dalam Perang-Aceh Belanda*, suatu tinjauan dalam hubungan dengan Sejarah Pertahanan dan Pendidikan Rakyat Aceh, Skripsi, tidak diterbitkan, fakultas Keguruan Unsyiyah, Darussalam 1970, hl. 43–7.

lar Tgh. Chiek Tanoh Abee pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1870–1874) dan Sultan Muhammad Daud Syah (1874–1903)<sup>32</sup>

Dayah Ulee Susu agaknya didirikan pada bagian kedua abad ke-19 oleh Syekh Abbas Ibnu Muhammad (Teungku. Chiek Kuta Karang) yang pada waktu itu ulama ini menjadi Khadi Malikul Adil Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1857 – 1870).<sup>33</sup> Sedang Dayah Lam Krak dan Dayah Lam Pucok agaknya didirikan pada masa sebelumnya, yaitu diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syah (1836–1857); yang masing-masing sebagai pendirinya ialah: Datu Muhammad (seorang pejabat tinggi pemerintahan pada waktu itu) dan Teungku. Muhammad Sa'ad (Teungku. Chiek Lam Pucok).<sup>34</sup>

Dayah Lam Birah diperkirakan didirikan pada akhir abad ke-18 oleh dua bersaudara yaitu: Ja Meuntroe dan Bendahara yang keduanya kemudian digelar dengan Teungku Chiek Lam Birah. Mereka hidup sekitar masa pemerintahan Sultan Johan Syah (1735–1960) dan masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah atau Tuanku Raja (1760–1781). Setelah itu selama abad ke-19 dayah ini dipimpin oleh Teungku Chiek Cot Keupeung dan Teungku Chiek Lam Baro. Sedang dayah Lam Nyong dan dayah Lam U diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1870 – 1874) masing-masing oleh Teungku Syekh Abdussalam (Teungku. Chiek Lam Nyong) dan Teungku Syekh Umar (Teungku Chiek Di Lam U).<sup>35</sup>

Dayah Rumpet yang terletak di Kuala Daya pantai barat Aceh menurut cerita masyarakat setempat telah didirikan sejak masa Poteumeureuhom Daya, salah seorang raja yang terkenal Lamho Daya. Namun dayah ini agaknya mencapai kemajuan selama abad ke-19, terutama pada masa pimpinan Teungku Muhammad Yusuf yang diberi gelar dengan Teungku Chiek Di Rumpet.

Di daerah Pidie, salah satu dayah yang cukup terkenal adalah Dayah Teungku Chiek Di Tiro (daerah IX Mukim Keumangan) Dayah ini mencapai kemajuan pesat pada masa Teungku. Chiek Di Tiro Muhammad Saman (1836 –1891), seorang ulama penggerak *Perang Sabi* melawan Belanda yang terkenal itu (sekarang telah diangkat sebagai Pahlawan nasional). Sebelum pimpinan Muhammad Saman dayah ini terdiri dari dua dayah yaitu Dayah Tiro Keumangan, dipimpin oleh Teungku Dhiék Muhammad Amin (Teungku Chiek Dayah Cut, Guru Muhammad Saman) dan Dayah Tiro Cumbok – bersebelahan dengan yang pertama dan dibatasi oleh sungai – yang dipimpin oleh Teungku Chiek Ubet (paman Muhammad Saman).<sup>36</sup>

Dayah Teungku Chiek Pantee Geulima agaknya didirikan pada masa pe-

---

32. *Ibid.*

33. *Ibid.*

34. *Ibid.*

35. *Ibid.*

36. Lihat juga, Mohammad Said, *op. cit.*, hl. 548.

merintahan Sultan Muhammad Syah (1870–1874) oleh Teungku Chiek Pantee Ya'kob, seorang ulama yang dianggap sebagai pengarang *Hikayat Malem Dagang* yang terkenal itu. Namun yang lebih dikenal sebagai Teungku Chiek Pantee Geulima ialah anaknya Teungku Chiek Haji Ismail. Selama perang ulama ini turut aktif melawan Belanda dengan mengerahkan sebagian besar *murid* (santri)-nya ke medan pertempuran sampai ke Aceh Besar. Dalam bulan Pebruari 1901 Teungku Chiek Haji Ismail tewas dalam pertempuran mempertahankan Kuta Batee Iiek (Samalanga) bersama dengan para ulama pemimpin dayah di sekitar benteng pertahanan itu (antara lain Teungku Chiek Lueng Keubeu dan Teungku Chiek Kuta Glee).<sup>38</sup>

Tampaknya selama perang kolonial Belanda, dayah memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga pejuang (murid) ke medan pertempuran maupun dalam menumbuhkan semangat juang rakyat secara masal, terutama melalui pembacaan *Hikayat Perang Sabi* di dayah-dayah, rangkang, meunasah dan mesjid; dan bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iiek – yang langsung menjadi kuta pertahanan. Karena itu tidak mengherankan apabila selama akhir abad ke-19 banyak dayah yang terbengkalai atau langsung diserang oleh tentara Belanda karena dianggap sebagai basis konsentrasi kekuatan pejuang rakyat.

Barulah setelah perang rakyat semesta terhenti (lebih kurang tahun 1904; perlawanan secara bergerilya terus berlangsung sampai Belanda meninggalkan Indonesia) para ulama (Teungku Chiek) berusaha membangun kembali dayah-dayah dan rangkang yang selama ini ditinggalkan. Dan agaknya sejak waktu itu untuk istilah dayah atau rangkang kadang-kadang dipergunakan juga seperti yang diistilahkan di pulau Jawa, yaitu *Pasantren*; bahkan di daerah Aceh Barat dan Selatan istilah ini lebih populer bila dibandingkan dengan dayah dan rangkang.

Adapun dayah atau pesantren yang didirikan atau dibangun kembali pada pertengahan pertama abad ke-20, antara lain di Aceh Besar: Dayah Tanoah Abee, Dayah Lam Birah oleh Teungku H. Abbas (Teungku Chiek Lam Birah) sementara adiknya Teungku H. Jakfar (Teungku Chiek Lam Jabad) mendirikan Dayah Jeureula; selanjutnya Dayah Lam Nyong, Dayah Lam U, Dayah Lam Bhuk, Dayah Ulee Susu, Dayah Indrapuri didirikan oleh Teungku Chiek Indrapuri, Dayah Lam Seunong oleh Teungku Chiek Lam Seunong, Dayah Ulee U oleh Teungku Chiek Ulee U, Dayah Krueng Kalee, Dayah Montasik. Dayah Piyeuŋ. Dayah Lam Sie dan masih banyak lagi.<sup>39</sup> Sedang Teungku Fakinah, seorang pejuang wanita, setelah menghentikan perjuangannya pada tahun 1910, mendirikan Dayah Lam Diran sebagai kelanjutan dayah neneknya di Lam Krak dan di Lam Pucok. Suatu keistimewaan dari dayah ini

37. H.K.J. Cowan telah membahas hikayat tersebut dalam bukunya, De "*Hikayat Malem Dagang*," KITLV. 1937.

38. Muhammad Ibrahim, *op. cit.* hl. 43–53.

39. A. Hasjmy, *op. cit.*, hl. 23–24.

adalah, kepada santri wanita selain diajarkan ilmu agama juga diajarkan berbagai jenis ketrampilan, seperti menjahit, menyulam dan sebagainya.<sup>40</sup>

Di daerah Aceh Pidie dibangun kembali atau didirikan dayah-dayah antara lain: Dayah Tiro, Dayah Pantee Geulima, Dayah Cot Plieng, Dayah Blang, Dayah Leupoh Raya, Dayah Garot/Gampong Aree, Dayah Leubeu yang didirikan oleh Teungku Muhammad Arsyad (Teungku Chiek Di Yan, Dayah Meunasah Raya oleh Teungku Muhammad Yusuf (Teungku Chiek Geulumpang Minyeuk) dan Dayah Teupin Raya yang didirikan oleh Teungku Chiek Teupin Raya;<sup>41</sup> sedang di Aceh Utara antara lain: Dayah Tanjungan, Dayah Masjid Raya, Dayah Kuala Blang, Dayah Blang Bladeh, Dayah Cot Meurak, Dayah Juli, Dayah Pulo Kiton yang didirikan oleh Teungku Chiek Pulo Kiton dan masih banyak lagi.<sup>42</sup>

Di daerah Aceh Barat, selain dibangun kembali Dayah Rumpet oleh keturunan Teungku Chiek Muhammad Yusuf, pada perempatan pertama abad ke-20 juga didirikan beberapa pesantren. Di antaranya, yaitu di Ujung Kalak dan Blang Meulaboh; di Paya Lumpai Samatiga dipimpin oleh Teungku Syekh Abu Bakar (sampai tahun 1936). Sebelum membangun pesantren ini Syekh Abu Bakar memperoleh pendidikan di Dayah Lam Bhuk, Aceh Besar. Jumlah santri pada masing-masing pesantren tersebut dalam ukuran puluhan orang. Selain itu di Kuala Bhee Woyla terdapat juga pesantren di bawah pimpinan Teungku Ahmad; demikian juga di Peureumeu di bawah pimpinan Teungku Ahmad; demikian juga di Peureumbeu di bawah pimpinan Teungku Di Tuwi. Pesantren ini juga menampung santri adalah jumlah puluhan orang.<sup>43</sup>

Di daerah Aceh Selatan, sejak perempatan pertama abad ke 20 juga berdiri beberapa dayah/pesantren. Di antaranya, Dayah Teungku Syekh Mud di Blang Pidie. Teungku Syekh Mud memperoleh pendidikan di Dayah Lam Bhuk dan Dayah Indrapuri, Aceh Besar. Setelah kemerdekaan Dayah Teungku Syekh Mud bernama Pesantren Bustanul Huda. Di Suak Samadua berdiri pula pesantren dengan nama Islahul Umam di bawah pimpinan Teungku Abu dan Teungku M. Yasin. Di Terbangun berdiri Pesantren Al Muslim di bawah pimpinan Teungku H. Ali, di Tapaktuan berdiri Pesantren Al Khairiyah di bawah pimpinan Teungku Zamzami Yahya dan Labuhan Haji berdiri pesantren yang juga disebut Al Khairiyah di bawah pimpinan Teungku Mohammad Ali Lampisang. Perlu dijelaskan ketiga pesantren yang disebutkan terakhir kemudian sistemnya diubah menjadi sistem madrasah (sistem klasial), sehingga sejak saat itu pesantren tersebut tidak dapat lagi digolongkan ke dalam lembaga pendidikan tradisional (lihat daftar madrasah-madrasah da-

---

40. Lihat selanjutnya, A. Hasjmy, "Srikandi Teungku Fakinah," *Sinar Darussalam*, no. 66, Februari 1976, hl. 19-29; H.M. Zainuddin, *Srikandi Atjeh*, Iskandar Muda, Medan, 1965.

41. A. Hasjmy, "Pendidikan di Aceh...", *op.cit.*, hl. 24.

42. *Ibid.*, dan beberapa tambahan dari hasil observasi/wawancara tim peneliti.

42. *Wawancara* dengan beberapa pemimpin setempat.

lam Bab III di bawah ini). Selanjutnya adalah menarik juga untuk dikemukakan di sini, bahwa semua tenaga-tenaga pengajar di pesantren-pesantren tersebut memperoleh pendidikan di salah satu dayah/pesantren yang terdapat di Aceh Besar. Bahkan Teungku Syekh Mud dan Teungku Mohammad Ali Lam-pisang sendiri berasal dari Aceh Besar.<sup>44</sup>

Selain itu pada permulaan pendudukan militer Jepang tahun 1942 di Aceh Selatan juga didirikan sebuah pasantren yang sampai sekarang terkenal di seluruh Aceh, yaitu: Pasantren Darussalam Labuhan Haji. Berbeda dengan pasantren lain, pasantren ini menganut dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan tradisional seperti pada dayah/pasantren lainnya dan jalur pendidikan madrasah (sekolah), yaitu melalui tahap-tahap atau kelas secara klasikal. Meskipun demikian kitab-kitab yang diajarkan pada jalur pendidikan madrasah pada umumnya sama dengan yang dipergunakan pada jalur pendidikan yang di dayah/pasantren. Sedang jenjang pendidikan yang dipergunakan di sini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: pertama, tingkat *Subiah* (pendahuluan, 3 tahun); ke dua, tingkat *Ibtidaiyah* (dasar, 7 tahun); dan ke tiga, tingkat *Bustanul Muhaqqiqin* (*Advanced*, 3 tahun), tetapi sejak tahun 1968, jenjang tersebut mengalami perubahan, yaitu: tingkat *Ibtidaiyah* (4 tahun), *Tsanawiyah* (3 tahun), *Aliyah* (3 tahun) dan *Bustanul Muhaqqiqin* (3 tahun). Adapun jumlah santri dan anggota tarikat pada tahun pertama didirikannya (1942) masing-masing sebanyak 60 orang dan 125 orang (rupanya di pasantren ini dibedakan antara santri dan pengikut tarekat atau suluk); tetapi 20 tahun kemudian (1962) jumlah santrinya dan pengikut tarikat sebanyak 1839 orang sedang pengikut tarikat 1900 orang.<sup>45</sup> Dewasa ini bekas santri Pasantren Darussalam Labuhan Haji yang telah menjadi ulama terbesar hampir seluruh Aceh, bahkan ada juga yang di luar daerah dan sebagian besar dari mereka yang kembali ke kampung halamannya juga mendirikan pesantrennya sendiri di sana.

Setelah Indonesia merdeka lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, seperti juga di daerah-daerah lain, tampaknya dapat hidup dan berkembang terus berdampingan dengan lembaga-lembaga pendidikan modern, seperti madrasah, sekolah dan sebagainya yang didirikan oleh pemerintah dan badan-badan swasta lainnya. Dan sampai tahun 1972 jumlah dayah/pasantren yang terdaftar di Aceh sebanyak 244 buah dengan guru 591 orang dan santri sebanyak 11.721 orang.<sup>46</sup> Kenyataan bahwa dayah/pasantren dapat hidup

---

44. Wawancara dengan beberapa pemimpin setempat.

45. Uraian lebih lanjut mengenai pesantren ini, lihat, M. Isa Sulaiman, *Beberapa Aspek Pengaruh Pesantren Darussalam Labuhan Haji terhadap perkembangan Keagamaan di Aceh Selatan, 1945 - 1975*, Thesis Sarjana, belum diterbitkan, Fakultas Keguruan, Unsyiah, Darussalam, 1977.

46. Universitas Syiah Kuala, *op. cit.*, tabel VI. 7, 8 dan 9

dan berkembang di alam kemerdekaan ini, terutama disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan yang, di samping terus membangun berbagai jenis lembaga pendidikan formal dan non formal dengan segala tingkatannya (sejak tingkat dasar sampai tingkat tinggi), juga tetap melindungi serta memberi bantuan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang selama berabad-abad telah berkembang di Indonesia. Dalam kaitan ini pula Presiden Suharto dalam suatu kesempatan berkunjung ke daerah Aceh pada tahun 1968 telah berkenan meresmikan sebuah Dayan Teungku Chiek di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh yang diberi nama *Dayan Teungku Chiek Pante Kulu* (diambil dari nama seorang ulama pejuang, pengarang *Hikayat Perang Sabi*, Teungku Haji Muhammad yang digelar dengan Teungku Chiek Pante Kulu). Adapun piagam prestasinya berbunyi sebagai berikut:

## PIAGAM

*Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah Subhanahu Wata'ala maka pada hari ini: Sabtu tanggal 7 Djumadil Achir 1388 atau 31 Agustus 1968, Kami*

*Presiden Republik Indonesia*

*menyatakan bahwa Dayan Teungku Chiek Pante Kulu Darussalam dibuka dengan resmi.*

*Darussalam,  $\frac{7 \text{ Djumadil Akchir } 1388}{3 \text{ Agustus } 1968}$ .*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dto.

SUHARTO

### 3. Pengelolaan Lembaga Pendidikan dan Program Pengajaran

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa awal kelahiran lembaga pendidikan Islam di Aceh adalah bertolak dari pendidikan di rumah. Pengelola pendidikan di sini ialah Teungku Dirumah, sedang biaya pengelolaannya di samping yang berasal dari pengelola sendiri, juga sekedar tambahan dari anggota pengajian atau dari orang-orang tua yang mengantarkan anaknya ke rumah tersebut. Ini bisa berbentuk sedekah, uang *ripee miyenuk* (uang pembeli minyak lampu yang dikumpulkan dari setiap anak/pengikut pengajian), bagian dari zakat harta dan zakat fitrah (zakat wajib yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri), gotong royong di rumah teungku, seperti: menyumbangkan tenaga dalam rangka membantu pekerjaan teungku di sawah, kebun dan sebagainya; sumbangan yang berbentuk materi/derma apabila di

rumah teungku diadakan selamatan dan sebagainya. Selain itu untuk pengadaan buku-buku/kita diserahkan kepada pihak yang belajar sendiri, seperti: *Qur'an Ubiet* (kitab yang berisi huruf Al-Qur'an dan diakhiri dengan juz ketiga puluh atau juz amma dari Al-Qur'an), *Qur'an Rayeuk* (Qur'an tiga puluh juz), kitab *Massailal Muhtadi*, *Bidayah* dan sebagainya setelah kitab-kitab tersebut diterbitkan/dikarang oleh para ulama.

Berlainan dengan romoh yang merupakan milik pribadi, meunasah adalah milik masyarakat gampong. Karena lembaga ini dibangun oleh masyarakat gampong di bawah pimpinan Kauchiek (Kepala Gampong) dengan dibantu oleh seorang wakilnya (*Wakil Kauchiek*) serta dengan penasehat para orang tua gampong (*Tuha Peut*).<sup>47</sup> Untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan selanjutnya juga ditanggung bersama oleh masyarakat gampong dengan sekedar tambahan dari hasil sebagian kecil *musara meunasah* (harta kekayaan meunasah yang berasal dari hibah atau waqaf seseorang).

Meunasah sebagai milik masyarakat tidak saja mempunyai fungsi pendidikan, tetapi juga mempunyai fungsi keagamaan dan kemasyarakatan yang pada umumnya berjalan secara terintegrasi.<sup>48</sup> Maka untuk kelangsungan fungsi ini diangkat seorang pimpinan meunasah yang disebut *Teungku Meunasah* (kadang-kadang disebut *Teungku Imeum Meunasah* atau *Peutua Meunasah*; di daerah pemukiman kelompok etnis yang mempergunakan istilah *Balee* untuk meunasah disebut *Teungku Balee*, dan seterusnya). Teungku Meunasah dalam tugasnya sehari-hari sebagai pengelola fungsi meunasah terutama di bidang pendidikan dan keagamaan selalu dibantu oleh seorang wakilnya yang disebut, *bileu meunasah* atau *teungku sida*. Adapun dasar pengangkatan teungku meunasah itu adalah penduduk gampong setempat dan dianggap alim (mengerti tentang berbagai masalah yang menyangkut dengan agama Islam, seperti akidah, ibadah dan lain-lain) oleh masyarakat gampong tersebut; dan pemilihan itu dilakukan melalui musyawarah di meunasah.

Mengenai sumber pendapatan pengelola meunasah (teungku meunasah dan wakilnya) pada dasarnya sama dengan teungku di rumah. Ia mempunyai mata pencahariannya sendiri, apakah sebagai petani, nelayan ataupun lain-lain, tergantung pada lingkungan sosial tempat ia berada. Selain itu sebagai pendapatan tambahan sama dengan teungku di rumah seperti yang telah disebutkan di atas; satu-satunya perbedaan adalah teungku meunasah selama memegang jabatannya ia diberi wewenang oleh masyarakat gampong untuk mengelola *musara meunasah* (ladang, kebun dan sebagainya) yang sebagian besar hasil garapannya diperuntukkan bagi dirinya dan sebagian lagi sisanya disimpan untuk kas meunasah yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan bagi

---

47. Mengenai fungsi dan peranan keuchiek, wakil keuchiek dan tuha peut di gampong gampong, lihat lebih lanjut, J. Kreemer, jilid II, E.J. Brill, Leiden, 1923, hl. 199; C. Snouck Hurgronje *op. cit.*, hl. 64-74.

48. Fungsi dan peranan meunasah, lebih jelas lihat juga, *Ibid.*; James T. Siegel, *The Rope od God*, University of California Press, Berkley, 1969.

kepentingan meunasah, seperti perbaikan meunasah yang bersifat kecil, tambahan uang lampu kalau sekiranya uang *ripee minyeuk* dari anak-anak pengajian tidak mencukupi dan sebagainya.

Mesjid seperti telah disinggung di muka, didirikan dalam wilayah kemukiman. Fungsinya yang lebih menonjol adalah sebagai tempat sembahyang Jum'at. Di samping itu juga mempunyai fungsi kemasyarakatan, sebagai tempat musyawarah lembaga pemerintahan kemukiman. Dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan pada dasarnya sama dengan meunasah, tetapi yang lebih penting sebagai lembaga pendidikan adalah *rangkang* yang umumnya didirikan di sekeliling mesjid (kecuali arah mesjid bagian depan). Mesjid bersama rangkang (atau mesjid saja tanpa rangkang) di bangun oleh masyarakat gampong yang ada dalam wilayah mukim dengan pimpinan *Imeum Mukim* (kepada pemerintahan mukim). Ketika Nanggro telah terbentuk, kadang-kadang Uleebalang (kepala pemerintahan Nanggro) juga turut memberi bantuan, setidak-tidaknya dukungan moril. Selain itu ketika Kerajaan Aceh Darussalam telah terbentuk, dua mesjid yang ada di ibu kota Bandar Aceh Darussalam seperti yang telah kita sebutkan di muka (Mesjid Baiturrahman dan Mesjid Musyahada) tampaknya seluruh biaya pembangunan dan pengelolannya dibebankan pada anggaran kerajaan sendiri.

Sebagai pengelola mesjid diangkat seorang pemimpin mesjid yang disebut: *Teungku Khatib* Mesjid, atau kadang-kadang disebut *Teungku Raja Imeum*. Dalam tugasnya sehari-hari khatib mesjid juga dibantu oleh seorang wakilnya yang disebut *Bileue Mesjid*. Adapun tugas khatib mesjid di bidang upacara keagamaan adalah membaca khutbah atau menunjuk salah seorang yang mampu membaca khutbah dan menjadi imam pada hari Jum'at serta imam pada sembahyang lima waktu tiap hari. Di bidang pendidikan tugasnya adalah mengajar di mesjid dan rangkang yang ada di mesjid tersebut. Sebagai imbalannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini Teungku Raja Imeum diberi juga wewenang untuk mengelola musara mesjid yang jumlahnya kadang-kadang jauh lebih besar dari muara meunasah. Di samping itu Teungku Khatib juga menjadi anggota musyawarah kemukiman dan kalau ia kebetulan memimpin mesjid di tempat kedudukan nanggro ia juga menjadi anggota musyawarah nanggro bersama uleebalang nanggro tersebut, untuk ini juga mendapat sekedar imbalan dari Kepala Mukim atau Uleebalang Nanggro

Berbeda dengan pembangunan meunasah dan mesjid, dayah didirikan atas inisiatif seorang ulama (Teungku atau Teungku Chiek, biasanya setelah ia merantau ke tempat lain untuk memperdalam ilmunya, yang dalam bahasa Aceh disebut *Jak meudagang*). Namun dalam pembangunannya itu masyarakat gampong, mukim dan nanggro turut memberi dukungan sepenuhnya, bahkan pada hakekatnya pembangunan itu dibiayai oleh rakyat dari gampong, mukim dan nanggro di mana dayah itu terletak; perbedaannya dengan pembangunan meunasah dan mesjid adalah pembangunan dayah bukan merupakan suatu kewajiban masyarakat gampong. Pembangunan itu baru ada



kalau ada ulama, dan inisiatif ini mungkin datang dari dorongan cita-citanya sendiri dan mungkin pula karena permintaan uleebalang, imeum mukim, keuchiek atau pemimpin masyarakat setempat. Tanah tempat pembangunan dayah itu biasanya tanah waqaf, musara meunasah atau mesjid dan kadangkadangkang juga berasal dari hibah/pemberian seorang kaya atau uleebalang yang memerintah nanggro tersebut. Tetapi ada juga dayah-dayah yang dibangun di atas tanah milik pribadi ulama itu sendiri. Meskipun tanah itu milik masyarakat (tanah waqaf dan sebagainya), tidak berarti teungku yang memimpin dayah tidak diizinkan tinggal di sana. Dia dibenarkan untuk membangun rumah di komplek itu dan tinggal bersama keluarganya, bahkan dia dapat mewariskan komplek dayah tersebut kepada anaknya asal mewarisi kepemimpinan ayahnya (ia menjadi ulama seperti ayahnya). Jadi dayah yang dibangun di sini dapat disebutkan sebagai milik seorang ulama, namun pemilikan itu merupakan amanah rakyat setempat karena ia dapat mewariskan kepada anak cucunya dengan ketentuan ada jaminan kelangsungan hidup dayah tersebut.

Pada dasarnya ada dua jenis dayah, yaitu: dayah yang jenjang pendidikannya lebih tinggi sedikit dari pada jenjang pendidikan rangkang dan dayah teungku chiek yang dipimpin oleh seorang *Teungku Chiek* (seorang ulama besar yang luas kajiannya dalam berbagai cabang ilmu Islam). Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin dayah selalu dibantu oleh beberapa orang santri yang dianggap lebih luas pengetahuannya. Guru bantu ini biasa disebut *Teungku di Rangkang*, sedang pemimpin dayah itu sendiri disebut *Teungku Di Balee* (harus dibedakan dengan teungku balee yang statusnya sama dengan teungku meunasah). Dalam kelangsungan pengajaran, teungku di rangkang belajar pada teungku di balee dan para santri yang baru datang belajar pada teungku di rangkang. Di samping itu para santri yang sudah agak lama di sana, meskipun belum menjadi teungku di rangkang juga langsung belajar pada teungku di balee.

Siapa saja atau anak-anak pada umur berapa saja yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang telah disebutkan di atas itu? Agaknya pada awal kelahiran lembaga pendidikan di rumoh, yang belajar di sana, di samping *aneuk miet ineung* (anak wanita, umur sekitar 5-13/14 tahun) juga *aneuk miet agam* (anak laki-laki, umur sekitar 5-14/15 tahun),<sup>49</sup> bahkan

49. Pada dasarnya pengelompokan tahap perkembangan sampai usia dewasa pada masyarakat Aceh pada tiga, yaitu: *Aneuk manyak* (kanak-kanak, umur 0-4/5 tahun), *Aneuk-miet* (anak-anak, 5-13/14 tahun) dan *Aneuk-muda/aneuk -dara* (pemuda/pemudi, umur sekitar 14 sampai memasuki jenjang perkawinan). Kelompok tersebut dapat bervariasi lagi, umpamanya *aneuk miet* dapat dibagi menjadi *aneuk miet cut* dan *aneuk miet rajeuk* (remaja), masing-masing berumur sekitar 5-8 tahun dan 8-14/15 tahun. Bandingkan juga dengan Chalidjah Hasan, "Kelahiran dan Pengasuhan Anak di Pedesaan Aceh Besar," dalam Alfian (ed), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, Hasil-hasil Penelitian Metode "Grounded Research,"* LP3ES, Jakarta, 1976.

tidak mustahil ada juga *ureung chiek* (orang dewasa) yang baru memeluk agama Islam. Dan Teungku di Rumoh pada waktu itu besar kemungkinan terdiri dari *Teungku Inoung* (wanita) dan *Teungku Agam* (laki-laki), yaitu suami-isteri yang mendiami rumah tersebut. Baru kemudian, setelah lahirnya lembaga meunasah terjadi pemisahan. Anak-anak wanita yang terdiri dari *anouk miet inoung* dan *aneuk dara* tetap belajar di rumoh pada teungku inoung yang biasanya isteri dari teungku meunasah, sedang anak laki-laki pindah ke meunasah pada teungku meunasah. Yang belajar di meunasah tidak saja *anouk miet agam*, tetapi juga *aneuk muda* yang tidak melanjutkan pendidikannya ke rangkang atau ke dayah dan *ureung ciek* (orang dewasa), misalnya melalui ceramah yang secara rutin diadakan di meunasah karena banyak pelajaran yang dapat diambil oleh orang dewasa.

Selanjutnya *aneuk miet agam* yang bertempat tinggal di sekitar mesjid, rumah mereka berdekatan dengan mesjid, pada umumnya mereka belajar ke mesjid, apabila di mesjid tersebut diadakan pengajian tingkat dasar. Sedang yang belajar di rangkang dan dayah terdiri dari *aneuk dara* dan *aneuk muda*, tetapi tempat belajar mereka dipisahkan. Di dayah teungku *chiek*, yang belajar di sana selain dari *aneuk dara* dan *aneuk muda* juga *ureung ciek*, yaitu orang-orang dewasa yang telah berumur sekitar 25 tahun ke atas, baik yang belum kawin atau pun sudah kawin dan tidak jarang orang yang sudah berkeluarga meninggalkan keluarganya di gampong pergi merantau, yang disebut *jak meudagang* atau *jak beut* ke suatu dayah teungku *chiek* untuk memperdalam ilmunya.

Anak-anak yang hendak belajar ke suatu lembaga pendidikan biasanya diantar oleh orang tuanya, yang disebut: *jak intat beut pada teungku seumeubeut*, kecuali orang-orang dewasa (*ureung ciek*) yang datang sendiri ke dayah teungku *chiek*. Kalau anak itu diantarkan ke rangkang atau dayah, mereka langsung tinggal di sana dalam asrama yang telah disediakan di bawah pengawasan teungku yang memimpin rangkang atau dayah tersebut.

Kegiatan belajar biasanya berlangsung pada malam hari, yaitu setelah shalat Magrib, sekitar jam 19.30–22.00 WIB; kadang-kadang juga pada pagi hari setelah shalat Subuh sampai jam 09.30 WIB dan sore hari setelah shalat Ashar, sekitar jam 16.00 sampai dengan 17.30 WIB (waktu disesuaikan dengan sekarang). Kegiatan belajar itu berlangsung sepanjang minggu, kecuali malam Jumat yang umumnya digunakan untuk acara kesenian yang bernafaskan Islam, seperti *qasidah*, *dalael*, *meureukon* yaitu semacam diskusi kelompok membahas masalah agama; pesertanya dibagi dalam dua kelompok dan tanya-jawab berlangsung dengan dilagukan dan sebagainya.

Adapun metode pengajaran yang digunakan adalah metode tradisional, sesuai dengan sifat tradisional dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Pada tingkat dasar, teungku mula-mula mengucapkan huruf (*alif, ba, ta, tsa* dan seterusnya) atau kata-kata yang terdapat di dalam kitab dan anak-anak mengeja serta mengikutinya. Anak-anak biasanya duduk dengan formasi me-

lingkar. Karena yang pertama sekali diperkenalkan kepada mereka adalah tata cara membaca huruf atau kata-kata Arab seperti yang tertera dalam kitab itu, maka tidak mengherankan apabila seorang anak yang telah dapat menamatkan pembacaan Al-Quran belum tentu mengetahui arti dan makna ayat yang dibacanya. Tampaknya persoalan makna dan tafsir Al-Quran pada tingkat dasar ini tidak mendapat tekanan yang penting. Hal ini baru diberikan pada kajian berikutnya yaitu pada tingkat menengah dan tingkat-tingkat selanjutnya.

Anak-anak yang lebih dahulu dapat membaca apa yang telah diajarkan oleh teungku dalam kelompoknya secara individual dapat dipindahkan ke bagian lain yang lebih tinggi dari kitab yang sedang dipelajari, mendahului teman-temannya. Bagi anak yang sudah lanjut kajiannya diajarkan pula tata cara membaca kitab yang berbahasa Melayu yang disebut juga *kitab Jawoe*. Dalam mempelajari kitab ini anak-anak tidak begitu mendapat kesulitan lagi sebab kitab tersebut memakai huruf Arab.

Metode mengajar sebagaimana diterangkan di atas juga digunakan dalam proses kegiatan belajar-mengajar di rangkang dan dayah. Teungku di rangkang atau teungku di balee sambil duduk berceramah, menerangkan isi sebuah kitab di muka sekelompok santri (murid) yang duduk bersila di depannya. Kemudian para santri secara individual mengulang atau membaca kembali di hadapan teungku apa yang baru diterangkannya. Dan untuk lebih memantapkan apa yang telah diperoleh dalam ceramah tadi, kemudian di asrama tempat tinggal mereka masing-masing diulang kembali. Selain itu khusus di dayah teungku chiek pada umumnya dipergunakan juga metode *mudzakarah*, yaitu semacam diskusi antara para santri yang berlangsung di ruang tempat mereka belajar. Yang dimudzakarahkan adalah berbagai masalah mengenai hukum agama (Islam) dan apabila di antara mereka tidak sanggup menemukan jawabannya, maka mereka akan mencari dalam kitab atau menanyakan langsung kepada teungku chiek pemimpin dayah tersebut.

Mengenai bahan pengajaran yang disajikan dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut pada umumnya yang berhubungan dengan masalah-masalah aqidah, ibadah dan mu'amalah seperti yang dituntut oleh ajaran Islam, sehingga diharapkan tiap anak didik dapat beriman, beribadat dan berkarya sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sehubungan dengan ini pada tingkat dasar (pendidikan di rumah dan meunasah), mula-mula anak-anak diperkenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran, yaitu: *alif, ba, ta, tsa, jim, ha*, dan seterusnya sampai akhir, *ya*. Kitab yang dipergunakannya dikenal dengan nama: *Qur'an Ubit*, yaitu kitab yang berisi huruf-huruf Al Quran berdasarkan kaedah *Baghdadiyah* yang pada bagian akhir telah ditambah dengan *juz 'Amma*, yaitu juz ketiga puluh dari kitab Al-Quran. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran 30 juz (dalam bahasa Aceh disebut: *beuet Quran Rajek*). Pendidikan dasar di rumah dan meunasah diakhiri dengan pengajian beberapa kitab dalam bahasa Melayu (bahasa *Jawoe*) yang isinya meliputi dasar-dasar

rukun iman, rukun Islam dan fiqh (hukum Islam) pada umumnya. Ada pun kitab-kitab tersebut antara lain, ialah: *Masailal Muhtadi*, *Bidayah* dan kitab *Majemuk* atau lebih dikenal dengan nama *Kitab Lapan*.

Selain mempelajari pokok-pokok ajaran Islam, di meunasah anak-anak dapat juga mempelajari berbagai ketrampilan yang kiranya berguna dalam kehidupan si anak nanti setelah ia dewasa, berbagai jenis kesenian yang bernafaskan Islam dan beberapa jenis permainan yang mempunyai nilai olahraga. Berbeda dengan pengajian, ketrampilan dan beberapa jenis kesenian biasanya tidak diajarkan oleh teungku meunasah, tetapi oleh orang-orang tua atau dewasa tertentu yang ada di gampong yang bersangkutan. Adapun ketrampilan yang diajarkan itu (terutama kepada remaja dan pemuda atau aneuk miet rajeuk dan aneuk muda) antara lain ialah: memutar tali dari ijuk, sabut kelapa, serat kulit kayu juga membuat alat-alat pertanian seperti *langai*, *creuh*, dan sebagainya; membuat alat-alat penangkap ikan, seperti pukak, *jeue*, *saweok* dan sebagainya. Demikian pula berbagai anyaman dari rotan, kulit rumbia dan masih banyak lagi.<sup>50</sup>) Berbagai jenis kesenian yang bernafaskan Islam yang dipelajari di meunasah, baik diajarkan oleh teungku meunasah maupun oleh orang-orang tua, antara lain: qasidah, *meureukon*, *rapaii*, *angoek*, *dalael*, *dikee rajeuk*, *dikeemulod*; ketiga yang disebut terakhir semacam selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya dilagukan dan lain-lain.<sup>51</sup>) Sedang permainan, misalnya: permainan *cabang* (semacam catur dilakukan setelah belajar pada waktu malam, dan sebagainya.<sup>52</sup>)

Pada tingkat pendidikan rangkang dan dayah diajarkan bahasa Arab yang materinya dititik beratkan pada tata bahasa (*qawa'id*); jadi tidak pada percakapan, sebab yang dipentingkan adalah untuk memahami kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Adapun kitab-kitab yang dipakai untuk dipelajari bahasa Arab itu, yang berisi *saraf* dan *nahwu* (tata bahasa), secara berurutan mulai dari permulaan, adalah: *Kitab Nizam (Tsummum Raf'un)*, *Matan Binak*, *'awamil*, *Matan al Ajrumiah*, *Mutamminah*, dan kitab *Alfiah*. Selain itu khusus bagi aneuk dara yang belajar di rangkang dan dayah juga diberikan beberapa ketrampilan seperti menyulam, menjahit dan sebagainya.

Di samping bahasa ARab, mata pelajaran utama yang diajarkan di lembaga pendidikan rangkang dan dayah adalah meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam yang pada waktu itu sedang berkembang di dunia Islam. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut, antara lain ialah: ilmu fiqh (hukum Islam), ilmu tafsir, ilmu hadist, ilmu tasawuf, etika/akhlak, ilmu tauhid,

---

50. Mengenai jenis-jenis ketrampilan yang dipelajari di meunasah, lihat lebih lanjut, Tgk. Sulaiman Jalil, *op. cit.*, hal. 7-8.

51. *Ibid.*; lihat juga, M. Isa Sulaiman dan Zakaria Ahmad, *loc. cit.*

52. Tgk. Sulaiman Djalil, *op. cit.*, hal. 8; Mengenai jenis-jenis permainan rakyat di Aceh, lihat juga, Zakaria Ahmad (ketua), *Permainan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek IDKD, Departemen P dan K, 1979/1980.

ilmu mantiq (logika), ilmu hisab/astronomi dan masih banyak lagi. Kitab-kitab yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu itu semuanya dalam bahasa Arab, seperti untuk ilmu fiqh, kitab-kitab *Bajuri*, *Matan Minhaj*, *Fathulmu'min*, *Fathulwahab*, *al-Mahalli* dan lain-lain; untuk ilmu tafsir; *Al-Jalalain*, *Shawi* dan lain-lain; sedang untuk ilmu tasawuf, kitab standar yang dinilai cukup baik ialah kitab *Ihya'uhumuddin*, karangan Imam Ghazali, *hujatul Islam* yang terkenal itu. Dan tampaknya selama perang kolonial Belanda di Aceh, para santri yang sedang belajar di rangkang dan dayah selalu dibekali dengan semangat "*ajaran perang sabi*," sehingga pada waktunya kelak, setelah meninggalkan rangkang atau dayah, mereka rela terjun ke kancah peperangan untuk mempertahankan agama dan negara dari penjajahan *kaphee* Belanda.

#### 4. Tokoh Guru

Selama berdirinya kerajaan-kerajaan Indonesia — Islam di Aceh (kerajaan-kerajaan lokal, seperti Peureulak, Samudera Pasei, dan sebagainya; kemudian Kerajaan Aceh Darussalam), banyak para ulama dan pujangga baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang bertugas sebagai pendidik/pengajar pada suatu dayah, sebagai Qadli Malikul Adil ataupun jabatan-jabatan lain dalam struktur pemerintah kerajaan. Beberapa di antara mereka sepintas lalu telah kita singgung juga di muka sambil membicarakan tentang pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya dayah, di Aceh. Bahkan menurut A. Hasjmy, berdasarkan sebuah naskah tua huruf Arab bahasa Melayu, pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607–1636) di Jami'ah Baiturrahman bertugas tidak kurang dari 44 orang ulama/pujangga, sejak dari Nuruddin Ar-Raniri yang terkenal itu sampai kepada Syekh Abdurrahim bin Asyik.<sup>53</sup> Hanya saja apakah Nuruddin Ar-Raniri pada waktu itu telah mendapat tempat di sana belum dapat dipastikan, mengingat kedudukan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumathrani, yang sangat bertentangan paham dengannya, cukup kuat dalam pemerintahan Iskandar Muda. Sedang dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Ar-Raniri telah tinggal di Aceh pada waktu itu sampai sekarang belum diketemukan, meskipun para ahli tidak membantah kemungkinannya. Namun hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Para ulama dan pujangga itu, selain melaksanakan tugasnya sehari-hari mengajar ilmu agama Islam (Theologi Islam) dan berbagai ilmu pengetahuan, juga menulis bermacam-macam kitab dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Arab. Kitab-kitab yang ditulis itu meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain, ilmu tafsir, hadist, ilmu tauhid, fiqh, ketabiban, sejarah dan sebagainya. tampaknya sebagian dari kitab-kitab tersebut sampai sekarang masih dicetak dan dipergunakan di beberapa pesantren lain di Indonesia dan Semenanjung Tanah Melayu.

---

53. A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Penerbit "Bulan Bintang," Jakarta, 1978, hl. 69–71.

Karena banyaknya tokoh guru yang berkumpul di Kerajaan Aceh Darussalam, maka tidaklah salah kalau dikatakan Aceh pada waktu itu sebagai pusat studi Islam dan ilmu pengetahuan tidak saja di Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Untuk jelasnya di sini akan dibicarakan beberapa diantara mereka, terutama yang karya-karyanya masih dapat dijumpai atau di ketahui sampai sekarang.

Di antara para ulama dan pujangga yang pernah datang ke Aceh terdapat nama Muhammad Ashari yang mengajar ilmu metafisika, Syeikh Abdul Kadir ibn Syeikh Al-Hajar, pengarang kitab *Saif al-Qathi'*, ahli dalam bidang *dogma* dan *mistik*; Muhammad Yamani, ahli dalam ilmu Usul dan Syeikh Muhammad Jailani ibn Hasan ibn Muhammad Hamid dari Gujarat yang mengajar ilmu mantik, ma'ani, bayan, badi', ilmu usul dan ilmu fiqh.<sup>54</sup> Kemudian berada pula di Aceh, Syeikh Bokhari al Jauhari yang mengarang kitab *Tajussalatin* atau Mahkota segala Raja-raja. Kitab ini mempunyai nilai-nilai keagamaan dan merupakan pedoman untuk raja-raja yang memerintah kerajaan pada waktu itu. Kitab ini demikian besar pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, sehingga sampai abad ke-19 di kalangan kraton-kraton Jawa Tengah dan Semenanjung Tanah Melayu masih digunakan.<sup>55</sup>

Tokoh pendidikan agama lainnya yang cukup dikenal dan menjadi bahan studi para ilmuwan dan sastrawan sampai abad ke-20 ini, ialah Hamzah Fansuri. Ia dilahirkan di Fansur, sebuah desa yang letaknya diperkirakan tidak seberapa jauh dari Barus dan dekat dengan Singkel (Aceh Tenggara) sekarang.<sup>56</sup> Kemudian ia mengembara, antara lain, sampai ke ibu kota Bandar Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Muda Ali Riwayat Syah (1604–1607) dan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran *Wujudiyah*,<sup>57</sup> dan jasanya yang paling menonjol dalam bidang pendidikan adalah usahanya memperkaya bahasa Melayu dengan kata-kata Arab, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang tidak kalah dengan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dunia lainnya pada waktu itu. Karenanya Hamzah Fansuri dapat dianggap sebagai perintis pertama dalam mengangkat

---

54. Lihat a.l., Nuruddin Ar-Raniri, *op. cit.*, hl' 33–34; T. Ibrahim Alfian, "Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah," *Dewan Bahasa*, jilid XVI, Kuala Lumpur, 1972, hl. 496; R.A. Huein Djajadiningrat, *Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervette Gegevens der Gescheicenis van het Sultanaat van Atjeh*, BKI 65, 1911, hl. 157; A Daudy, "Syeikh Nuruddin Ar-Raniry," *Sinar Darussalam*, no. 88, Maret 1978, hl. 119.

55. T. Iskandar, *Atjeh dalam Lintasan Sejarah, suatu tinjauan kebudayaan*, "Prasaran dalam PKA II, Banda Aceh, 1972, hl. 9.

56. Mengenai riwayat hidup ringkas Hamzah Fansuri, lihat lebih lanjut, Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hl. 110–116.

57. Mengenai aliran *Wujudiyah* ini, lihat misalnya, Syed Muhammad Naquib Al-Atas, "Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Achah," *Monographs of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society* 111, Malaysia Printed Ltd. Singapore, 1966.

bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang sampai sekarang maju pesat (bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia). Di antara karya-karyanya yang berbentuk prosa, ialah *Asrar al-Arifin fi Bayan 'ilmu al Suluk wal Tauhid*, *Syarb al Asyikin wa Zinatul Muwahhidin* dan *Al Muntahi*. Ke tiga kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu dan pada dasarnya membahasa masalah-masalah tauhid, syari'ah, tarekat, hakekat, ma'rifat dan paham Wujudiyah.<sup>58</sup> Sebagai seorang pijangga, Hamzah Fansuri juga menulis syair-syair, di antaranya yang terkenal ialah *Syair si Burung Pungguk*, *Syair si Burung Pungai*, *Syair si Dang Fakir* dan *Syair Perahu*, serta *Ruba'i Hamzah Fansuri*.<sup>59</sup>

Ulama penting lainnya yang menjadi Qadli Malikul Adil dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ialah Syamsuddin as Sumathrani atau lebih dikenal dengan nama Syamsuddin Pasei. Seperti terlihat dari namanya itu, ia dilahirkan di Samudra Pasei, tetapi tahun kelahirannya tidak jelas diketahui; dan meninggal pada 12 Rajab 1039 H (1630 M). Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri dan yang memperkembangkan paham *Wujudiyah* di Aceh.<sup>60</sup> Kitab-kitab yang ditulis Syamsuddin Pasei, adalah *Durrat al Fara'id*, *Hidayah al Habib*, *Miratul Mukmin*, *Miratul Muhakimin*, *Miratul al Qulub*, *Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri* (pembahasan mengenai Ruba'i Hamzah Fansuri) dan beberapa karya mengenai Sifat Dua Puluh dan Martabat Tujuh.<sup>61</sup> Studi yang dilakukan para ahli terhadapnya, antara lain: C.A.O. Nieuwenhuisen, *Sjamsu'din van Pasei*, dan Raymond le Roy Archer, dalam *Muhammadan Mysticism in Sumatera*, menunjukkan bahwa ia juga termasuk salah seorang ulama besar pada masanya, sehingga tidak mengherankan apabila ia berhasil menduduki jabatan penting di pusat pemerintahan Kerajaan Aceh.

Tokoh Ulama dan pujangga Islam lain yang pernah pula datang ke Kerajaan Aceh Darussalam, ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri al-Quraisyi asy-Syafi'i, keturunan Arab, dilahirkan di Ranir dekat Surat di Gujarat (India).<sup>62</sup> Setelah menjadi ulama, hijrah ke Aceh dan mendapat kedudukan penting dalam badan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636-1641) dan juga pada awal pemerintahan Sultan at Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675). Tampaknya ia bersama dengan Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, merupakan tokoh pendidikan yang paling berpengaruh di Aceh selama Abad ke-17 dan karenanya telah mengundang sejumlah para ahli untuk meng-

---

58. A. Hasjmy, Pendidikan Islam., op. cit., hal 16.

59. *Ibid.*

60. Lihat Syed Muhammad Naquib Al-Atas, op. cit., hl. 11; mengenai riwayat hidupnya secara ringkas, lihat Zakaria Ahmad, op. cit., hl. 116-118 dan A. Hasjmy, op. cit., hl. 16-17.

61. T. Iskandar, op. cit., hl. 9. A. Hasjmy, loc. cit.

62. Mengenai riwayat hidup ringkas Ar-Raniri, lihat A. Daudy, op. cit., no. 88 dan no. 89, hl. 117 - 123 dan hl. 180-185; Zakaria Ahmad, op. cit., hl. 118-122.

adakan studi terhadap dirinya.<sup>63</sup> Di Aceh ia penentang ajaran *Wujudiyah* yang diajarkan Hamzah Fansuri dan yang dikembangkan Syamsuddin Pasei, karena ajaran itu dianggap menyesatkan ajaran Islam. Dengan bantuan Sultan Aceh pada masanya (Iskandar Tsani), Nuruddin Ar-Raniri berhasil memberantas ajaran Wujudiyah dengan membakar kitab-kitab karangan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasei di muka Mesjid Baiturrahman Bandar Aceh Darussalam;<sup>64</sup> dan juga dengan membunuh beberapa pengikut ajaran tersebut.<sup>65</sup> Selama di Aceh Nuruddin Ar-Raniri paling produktif menulis kitab-kitab mengenai ilmu Islam baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu klasik. Sehubungan dengan ini A. Daudy M.A. telah berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 29 judul karangannya (termasuk yang ditulis di luar Aceh) yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, hadist, tauhid, sejarah, tasawuf, *firaq* (sekte-sekte agama); sebagian besar karangannya itu ditulis untuk menyanggah ajaran Wujudiyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumathrani.<sup>66</sup> Di antara tulisan-tulisannya itu, adalah *Al-Shirath al-Mustaqim*, *Hidayat al-Habib fi al Targhib wal-Tarhib*, *Nubdzah fi Da'wah al-Zhill ma'a Shahibih*, *Asrar al-Insan fi Ma'rifat al-Ruh wa al-Rahman*, *Ma'ul Hayat li ahl al-Mamat*, *Syifa' 'ul Qubub*, *Hujjat al-Shiddiq li daf'i al-Zindiq*, *Al-Lama'an fi takfir man Qala bi Khalq al-Quran* dan *Bustanus Salatin*. Yang tersebut terakhir merupakan karya sastra Nuruddin Ar-Raniri yang terbesar dan paling tinggi mutunya dalam kesastraan Melayu klasik.<sup>67</sup>

Kitab ini selain mengandung nilai-nilai keagamaan, juga mempunyai nilai-nilai sejarah, khususnya mengenai sejarah kerajaan Aceh.

Setelah lama menetap di Aceh, pada tahun 1644 Nuruddin Ar-Raniri kembali ke kampung kelahirannya (Ranir, India) dan pada tanggal 21 September 1685 tokoh yang sebagian besar usianya diabdikan kepada ilmu pengetahuan ini meninggal dunia di sana. Untuk mengenang jasa-jasanya selama di Aceh, sekarang namanya diabadikan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Radinir di Darussalam, Banda Aceh.

Tokoh Pendidikan lain yang juga namanya diabadikan pada sebuah Universitas Negeri di Darussalam, Banda Aceh Universitas Syiah Kuala,— ialah Syeikh Abdurrauf Singkel atau yang lebih dikenal dengan nama Syiah Kuala, berhubung kuburnya terletak di Kuala Krueng (Sunge) Aceh (kira-kira 4 km dari Banda Aceh) dan kemungkinan juga ia menetap di sana sambil membuka sebuah dayah, tempat ia mengajar, Nama lengkapnya ialah Abdurrauf bin

---

63. Di antaranya, Syed Muhammad Naquib Al-Atas, *op. cit.*, R.A. Husein Djajadiningrat, *op. cit.*; G.W.J. Drewes, "De Hetkomst van Nuruddin ar-Raniri," *BKI* 111, 1955; Tijmah, *Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman*, Jakarta, 1960; dan masih banyak lagi.

64. A.J.A. Gerlach, *op. cit.*, hl. 42.

65. *Ibid.*

66. A. Daudy, *op. cit.*, no. 89, hl. 180.

67. T. Iskandar, *loc. cit.*



Ali al—Jawi al-Fansuri al-singkel. Kalau dilihat pada bagian akhir namanya itu, ia agaknya sekampung dengan Hamzah Fansuri, namun paham yang dianut oleh ke dua tokoh ini jauh berbeda: Hamzah Fansuri, seperti telah disebutkan, penganut paham Wujudiyah dan Syiah Kuala menganut paham *Ahul Sunnah wal Jama'ah*. Kemudian ia pindah ke Bandar Aceh Darussalam dan menduduki jabatan penting di sana sebagai Gadli Malikul Adil dalam pemerintahan Ratu Safiatuddin (1641—1675) dan kemungkinan juga dalam pemerintahan ratu berikutnya Ratu Nurul Alam Naqiatuddin yang memerintah sejak tahun 1675—1678.<sup>68</sup> Ia sepaham dengan Nuruddin Ar-Raniri, namun penghargaan rakyat Aceh yang diberikan terhadap dirinya jauh melebihi tokoh yang berasal dari luar negeri itu. Hal ini nampak dari ungkapan yang sampai sekarang cukup populer dalam masyarakat Aceh, yaitu: *Adat bak Poteu Meuruhom, Hukum bak Syiah Kuala*, yang artinya adat di Aceh bersumber dari Iskandar Muda, sedang hukum (Islam) bersumber dari Syekh Abdurrauf Syiah Kuala (tentu hukum yang diangkat dari Al-Quran dan Hadist). Bahwa ia termasuk seorang besar yang berpengaruh jauh melampaui masanya terbukti juga dari beberapa studi yang diadakan oleh para ahli mengenai dirinya, seperti C.Snouck Hurgronje, D.A. Rinkes, R.O. Winstedt, P. Voorhoeve, Raymond le Roy Archer, dan lain-lain. Adapun karyanya yang sampai sekarang cukup dikenal oleh masyarakat, ialah *Turjumanil Mustafid*, kitab tafsir al—Quran yang pertama dalam bahasa Melayu dan *Miratuth Thullab*, sebuah kitab Fiqh besar yang sekaligus menunjukkan kedalaman ilmunya. Selain itu, *Bayan Tajalli*, kitab yang menolak paham wujudiyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani; *Hujjah Balighal 'ala Jum'at al Mukhsanam*; *Umdatul Muhtajin*; *Kifayat al-Muahjin* dan masih banyak lagi.<sup>69</sup>

Selanjutnya para ulama dan pujangga berikut ini dapat juga dipandang sebagai tokoh guru, mengingat hasil karyanya dan kedudukannya, baik sebagai pemimpin sebuah dayah ataupun sebagai pejabat teras dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka ini, ialah: Syekh Jalaluddin Tursany dengan karyanya *Mudhharul Ajla Ila Rutbatil A'la* dan kitab *Safinatul Hukkam*; Syekh Muhammad bin Ahmad Katib Langien yang tulisannya antara lain, *Dawaul Qulub*; Syekh Abbas Al Asyi (Teungku Chiek Kuta Karang), seorang ualama dan pujangga yang cukup produktif pada bagian ke dua abad ke-19, karangan-karangannya antara lain, *Sirajudh Dhalam fi marifat Sa'di wan Nahas*, *Kitabur-Rahmah* sebuah kitab mengenai ketabiban dan kitab *Tadskiratur-Rakidin*, sebuah kitab yang ditulis pada tahun 1307 Hijriah yang sampai sekarang masih tersimpan pada *Universiteitsbibliotheek*,

---

68. A. Hasjmy, *Bunga Rampai... op. cit.*, jl. 76—77; Mengenai riwayat hidup Ringkas Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, lihat misalnya, Zakaria Ahmad, *op. cit.*, h1. 122—125; M Junus Djamil, *Riwayat Hidup Walyyu'l Mulki Sjech Abdul'l Rauf bin Ali (Syiah Kuala)*, diperbanyak oleh Pusat Latihan Qenelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, 1975.

69. T. Iskandar, *lo. cit.*; A. Hasjmy, *Bunga Rampai...loc. cit.*

Leiden (Ms. Cod. Or. 8038). Kemudian, ulama berikutnya ialah: Syekh Jama-luddin bin Syekh Jalaluddin bin Syekh Kamaluddin Tursany A-Asyi dengan karyanya, antara lain *Hidayatul Awam*; Syekh Muhammad Zain, tulisan-tulisannya antara lain Kitab *Kasyful Kiram* dan *Takhlishul Falah*; Syekh Abdullah dengan kitabnya *Syiram Qulub*; Syekh Jamaluddin bin Syekh Ab-dullah Ali Asyi yang karangannya antara lain, *I'tamul Muttawin*; Syekh Daud Rummy, *murib* Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, pengarang kitab *Masailal Muhta-di li Ikhwanil Muhtadi*. Kitab ini telah dicetak berkali-kali, sampai sekarang masih diperjualbelikan di toko-toko kitab dan tersebar di gampong-gampong di seluruh Aceh; isinya adalah mengenai pelajaran agama Islam tingkat permu-laan dan dikarang dengan menggunakan metode tanya-jawab, sebuah metode pengajaran yang sampai kini masih dianggap cukup baik.<sup>70</sup> Dan sebagai pe-nutup bagian ini, rasanya perlu juga diperkenalkan seorang lagi tokoh ulama yang tidak kurang pentingnya, yaitu Teungku Chiek Pantee Kulu (Teungku Haji Muhammad) yang namanya, seperti telah disebutkan di muka, telah di-abadikan pada Dayah Teungku Chiek Pantee Kulu. Ia pengarang kitab *Hika-yat Prang Sabi*, sebuah karya sastra dalam bahasa Aceh yang bernilai tinggi, berisi pokok-pokok ajaran perang sabil (jihad di jalan Allah) seperti yang di-tuntut oleh agama Islam kepada ummatnya. Karya ini telah menggetarkan ji-wa rakyat Aceh untuk terjun ke medan pertempuran melawan *kaphée* Belan-da, sehingga tidak mengherankan apabila kitab ini menjadi momok bagi Belanda dan karenanya perlu diadakan razia untuk mencegah kemungkinan rak-yat Aceh menyimpannya.

---

70. Mengenai tokoh-tokoh ulama dan pujangga yang disebutkan itu, lihat lebih lanjut, A. Hasjmy, *Bunga Rampai...op. cit.*, hl. 78-82.

### BAB III

## PENDIDIKAN DI DAERAH ACEH PADA ZAMAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

#### A. PENDIDIKAN PEMERINTAH

##### 1. Pengaruh Politik Etika dan Konsepsi C. Snouck Hurgronje

Sebagai akibat proses politik, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda; tentang hal ini tentu masih diperlukan suatu studi komperatif tersendiri. Pendidikan ini diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh, baru pada permulaan abad ke-20, yang pada mulanya masih terbatas kepada anak-anak golongan bangsawan (Uleebalang) saja. Pada saat itu, meskipun usaha-usaha ke arah perdamaian sudah mulai dirintis, dengan berhasil mengajak Sultan Aceh untuk berdamai, tetapi peperangan antara Aceh dengan penjajahan Belanda masih tetap berlangsung. Oleh karena itu pada masa yang belum aman itu, suatu sistem pendidikan yang teratur dan terorganisasi secara baik belum mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Usaha ke arah pengembangan dan intensifikasi sistem pendidikan ini, baru dapat dimulai setelah melemahnya perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah Belanda, yaitu tahun dua puluhan.

Ada dua faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan sistem pendidikan mereka ke daerah Aceh. Pertama, dapat dilihat dalam hubungan dengan perubahan sistem politik kolonial Belanda pada pertukaran abad ini (dari abad ke-19 ke abad ke-20), yaitu sejalan dengan visi politik etika yang mereja jalankan, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai administratif yang terampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam me-

lancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengembangan sistem pendidikan mereka kepada kalangan penduduk bumi-putra, yang pada mulanya diusahakan secara terbatas. Kedua, munculnya suatu kelompok baru dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda, yang dipelopori oleh seorang orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan konsepnya yang disebut *politik asosiasi*.

Kelompok yang dipelopori C. Snouck Hurgronje ini beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari bangsa Indonesia salah satu di antaranya adalah perlawanan yang diberikan oleh rakyat Aceh, dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai agama Islam.<sup>1</sup> Dan perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat (yang dalam hal ini di Aceh golongan Uleebalang) dapat ditarik ke dalam orbit kebudayaan dan sistem nilai mereka (sistem nilai Barat atau Belanda). Untuk ini, kelompok tersebut menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dapat menciptakan suatu golongan elite baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai mereka. Dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama Islam (para ulama) untuk tetap menentang Belanda, sehingga dengan sendirinya pengaruh dari sistem nilai agama Islam sebagaimana dikumandangkan lewat para ulama seperti yang terjadi di Aceh dapat dikurangi.<sup>2</sup>

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan bangsawan setempat sebagai pesantren antara mereka dengan rakyat, yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan Uleebalang. Oleh karena itu golongan yang pertama kali diperkenalkan dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan Uleebalang yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Mereka inilah yang dikehendaki oleh kelompok C. Snouck Hurgronje supaya dipisahkan atau dijauhkan dari kelompok para pemimpin agama.

Sehubungan dengan maksud di atas, sejak tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda kepada mereka. Pada tahun itu beberapa putera Uleebalang Aceh, di antaranya dua orang saudara dari Uleebalang Idi Reyeuk, telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan

---

1. Lihat antara lain dalam Harry J. Benda, *The Crescent And The Rising Sun: Indonesian Under The Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague And Bandung: Van Hoeve, 1958), hal. 9-99. Juga dalam Alfian, (ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP 3 ES, 1977), hal. 207-208.

2. Berdasarkan Stukken van adviseur voor Oosterse Talen en Mohamedaan Recht C. Snouck Hurgronje, 1891-1808, betreffende de Religeuspolitieke Toestanden in Atjeh. *Kernpapieren* no. 410, KITLV Leiden, hal. 19671969.

pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja<sup>3</sup> (sekarang Banda Aceh). Pada tahun 1901 tiga Putera Uleebalang lainnya yang berasal dari Aceh Besar, sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja, oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh dikirim ke *Fort de Kock* (sekarang bernama Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana.<sup>4</sup> Selanjutnya pada tahun 1907/08 hingga tahun dua puluhan banyak sekali putera Uleebalang yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai macam pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Misalnya *Hoofdenzoons school* di Asahan, *OS-VIA* di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia (sekarang bernama Jakarta), dan *MOSVIA* di Madiun.

Tetapi berbeda dengan maksud dan harapan pemerintah kolonial Belanda, karena tidak semua dari mereka yang pernah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah itu, berhasil dirangkul oleh negara. Ada di antara putera-putera Uleebalang Aceh yang telah memperoleh pendidikan ini, mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh yang memelopori munculnya kesadaran nasional di daerah Aceh, dan bahkan juga terdapat di antara mereka yang tetap bekerja sama dengan para pemimpin agama. Misalnya kelompok yang menentang diubahnya bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat (*volkschool*) di Aceh, dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada sekitar tahun 1931.<sup>5</sup> Suatu gagasan yang dicetuskan oleh Van Mook, salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda, dalam rangka untuk menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan untuk ini bahasa-bahasa daerah harus dikembangkan kembali. Selain itu juga dari dua tokoh Uleebalang yang pernah menjadi anggota *volksraad* yang mewakili daerah Aceh.<sup>6</sup>

Dari kelompok putera-putera Uleebalang yang telah mengecap sistem pendidikan dari pemerintah ini, terutama mereka yang dididik di luar Aceh, dalam perkembangannya memang dapat dikatakan telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Tetapi seperti telah disebutkan di atas, bahwa ada di antara mereka yang tetap berpihak untuk kepentingan masyarakatnya. Dan sehubungan dengan hal ini, dalam rangka memperkuat integritas dan solidaritas antar mereka dalam rangka membantu masyarakatnya, maka pada tahun 1916 kelompok ini mendirikan suatu perserikatan yang dinamakan *vereeniging Atjeh* (Serikat Aceh). Dalam statuta perserikatan itu mereka jelas menyebutkan bahwa tujuan dari pada organisasi mereka di antaranya

3. Sekolah ini mungkin pada mulanya khusus diperuntukkan bagi anak-anak militer Belanda yang bertugas di Aceh. Lihat *Kolonial Verslah* 1900, hal. 3.
4. *Mailr.* 668/1900.
5. Tentang masalah ini di Aceh lihat misalnya dalam *Memorie van overgave* A. Ph. van Aken, bekas Gubernur Aceh dan Daerah-daerah Takluknya, Pebruari 1936, *Mailr.* 504/36, hal. 137.
6. Nama kedua Uleebalang ini adalah, Teuku Chiek Muhammad Thayeb dan Teuku Cut Nyak Arif.

adalah untuk memajukan pendidikan (baik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pendidikan keagamaan yang merupakan lembaga pendidikan tradisional masyarakat Aceh) kepada kalangan pemuda-pemuda Aceh serta berusaha untuk menghilangkan beberapa adat kebiasaan yang mereka anggap mengekang kemajuan bagi masyarakat Aceh.<sup>7</sup>

Dari beberapa data yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa tujuan dari konsepsi C. Snouck Hurgronje, yaitu mendidik segolongan masyarakat Aceh dengan maksud untuk menjauhkan atau memisahkan mereka dari golongan lain adalah tidak berhasil. Tetapi kalau dilihat dalam hubungan dengan Politik Etika seperti pada punt pertama, maka tujuan dari pada permulaan sistem pendidikan pemerintah, mungkin agak mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh A.J. Pekaar (yang menjabat sebagai sekretaris residen yang terakhir dari masa pemerintah Hindia Belanda di Aceh) bahwa pemerintah Hindia Belanda pada tahun-tahun awal abad ke-20, telah memberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh dengan harapan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan administratif pada kantor-kantor pemerintah yang memungkinkan bagi mereka yang mampu memangkunya.<sup>8</sup>

## 2. Pendidikan Sekolah Dasar

Hampir bersamaan waktunya dengan diperkenalkannya pendidikan kepada anak-anak Uleebalang, pemerintah Hindia Belanda juga mulai memikirkan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang berasal dari kelompok Uleebalang atau dari kalangan rakyat biasa. Hal ini dimaksudkan selain untuk mendapat pegawai rendah (sesuai dengan salah/tujuan politik etika),<sup>9</sup> juga untuk mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para Ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhan mereka dengan Belanda (sesuai dengan maksud dari konsepsi C. Snouck Hurgronje.<sup>10</sup> Maka untuk ini pemerintah Hindia Belanda juga harus mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah-sekolah rakyat seperti halnya dengan sekolah-sekolah di Pulau Jawa, yang di Aceh pada mulanya sekolah-sekolah ini disebut dengan nama *sekolah mukim*.<sup>11</sup>

Tidak seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di daerah Aceh jenis pendidikan dasar atau rendah yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sangat terbatas. Artinya tidak semua jenis pendidikan seperti yang ada di Jawa juga terdapat di Aceh. Dalam hal ini yang terdapat di Aceh adalah *volkschool* (dengan masa belajar 3 tahun), *Vervolgschool* (lama

7. VB. 1-2-'21-87. *Mailr.* 3225/20.

8. A.J. Pekaar, *Atjeh en De Oorlog met Japan*. (The Hague: van Hoeve, 1949), hal. 12.

9. Lihat I. Djumhur dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Tjerdas, 1971), cetakan ketiga, hal. 109.

10. *Mailr.* 688/190. Lihat juga *Kernpapieren* No. 410, KITLV Leiden, hal. 167.169.

11. *Koloniaal Verslag*, 1908, hal. 13.

belajar dua atau tiga tahun), *Meisjesschool* (dengan masa belajar dua atau tiga tahun), *De 2de klassescholen* (sekolah-sekolah kelas dua), (*Inlandsche School*, *Europeesche Lagere School* (dengan masa belajar tujuh tahun), *Hollandsch Inlandsche School* atau H.I.S. (dengan masa belajar tujuh tahun), *Hollandsch Chienesche School* atau H.C.S. (lamanya belajar tujuh tahun) dan sekolah ini khusus untuk anak-anak orang Cina, *Hollandsch Ambosche School* (lamanya belajar juga tujuh tahun dan sekolah ini khusus untuk anak-anak orang Ambon yang berdinasi pada militer Belanda), dan *Voorbereidend Onderwijs* atau yang disebut *Frobelschool*,<sup>12</sup> (sejenis sekolah taman kanak-kanak).

Adapun sekolah rakyat atau sekolah desa yang pertama didirikan di Aceh adalah pada tanggal 30 Desember 1907, yang diprakarsai oleh Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah takluknya pada masa itu, yaitu Van Daalen. Dan sekolah desa yang pertama ini didirikan di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue yang pada mulanya diberi nama Sikula (sekolah) *Mukim* dengan jumlah murid 38 orang.<sup>13</sup> Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1908, di desa Lam Lagang (juga dalam wilayah Aceh Besar) dibuka lagi sekolah yang serupa, dengan jumlah murid pada mulanya 35 orang.<sup>14</sup> Di bawah pemerintahan Gubernur H.N.A. Swart (yang menggantikan Gubernur Van Daalen pada tanggal 10 Juni 1908), sekolah-sekolah rakyat ini semakin diperkembang. Pada akhir tahun 1908 jumlah sekolah ini di wilayah Aceh Besar sudah mencapai 21 buah.<sup>15</sup> Dan hingga bulan Desember 1909, jumlah ini untuk seluruh daerah Aceh mencapai 63 buah.<sup>16</sup> Setahun kemudian atau pada Desember 1910, jumlah ini sudah meningkat lagi menjadi 85 buah (atau 22 buah lebih banyak dari pada tahun 1909), yang dapat dibagi di setiap *afdeeling* adalah sebagai berikut:

<i>Afdeeling Groot Atjeh</i> (Aceh Besar) . . . . .	52
<i>Afdeeling Noordkust van Atjeh</i> (Aceh Utara) . . . . .	11
<i>Afdeeling Oostkust van Atjeh</i> (Aceh Timur) . . . . .	9
<i>Afdeeling Westkust van Atjeh</i> (Aceh Barat) . . . . .	8
<i>Afdeeling Alaslanden</i> (Negeri Alas) . . . . .	4. <sup>17</sup>

Seperti disebutkan di atas, bahwa di bawah pemerintahan Gubernur Swart, sekolah-sekolah rakyat di seluruh Aceh terus diperkembangkan. Adapun perincian jumlah sekolah ini beserta jumlah muridnya pada setiap tahun (mulai tahun 1911) sampai pada masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Aceh dan Daerah-Daerah takluknya (1918) adalah sebagai berikut:

12. *Memorie van overgave assistent resident van Groot Atjeh*, C.E. Mailr, 17 Juni 1935.

13. *Koloniaal Verslag*, 1908, hal. 20.

14. *Ibid.*, hal. 21.

15. *Ibid.*, 1909, hal. 13.

16. *Mailr*. 1613/10.

17. *Algemeen Verslag van Het Inlandsh Onderwijs in Neiderlandsch Indie 1910*, (Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1912), hal. 50.

tahun 1911	106 buah;
tahun 1912	125 buah dengan jumlah murid 6000 orang;
tahun 1913	151 buah dengan jumlah murid 6800 orang;
tahun 1914	165 buah dengan jumlah murid 8200 orang;
tahun 1915	184 buah dengan jumlah murid 10700 orang;
tahun 1916	196 buah dengan jumlah murid 11300 orang;
tahun 1917	220 buah dengan jumlah murid 12261 orang;
tahun 1918	250 buah dengan jumlah murid 14751 orang. <sup>18</sup>

Adapun jumlah tenaga pendidik (guru) pada akhir tahun 1918, adalah sebanyak 4190 orang, jadi kira-kira dua orang guru untuk satu sekolah rakyat dan seorang guru untuk 30 orang murid.<sup>19</sup> Sebagian besar guru-guru ini terdiri dari orang-orang pendatang, yaitu orang-orang Mandailing (Tapanuli) dan orang-orang Minangkabau, sedang dari kalangan suku Aceh sendiri masih sangat sedikit.<sup>20</sup>

Oleh karena pada umumnya guru-guru pendatang ini tidak mengerti bahasa Aceh, sedangkan murid-murid sekolah rakyat terutama yang di desa-desa tidak mengerti bahasa Melayu, yang oleh pemerintah belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu, maka tentu saja hal ini mengurangi minat dari pada murid-murid itu untuk bersekolah. Dan ini merupakan suatu masalah tersendiri bagi pemerintah.

Pada mula didirikan sekolah-sekolah ini di gampong-gampong (kampung-kampung) di Aceh, pemerintah Hindia Belanda mengalami banyak masalah. Diantaranya selain karena masalah kekurangan guru dan sedikit sekali guru-guru yang dapat berbahasa Aceh seperti telah disinggung di atas, juga masalah yang datang dari *Teungku-Teungku* atau para pemimpin agama (Ulama) yang pada umumnya tidak setuju dengan hadirnya sekolah-sekolah binaan Belanda di Aceh. Selain itu juga dari orang-orang tua murid, terutama para ibu yang tidak mau anak-anak mereka bersekolah pada sekolah yang dianggap buatan orang kafir; pada ibu ini lebih senang anak-anak mereka tetap tinggal di rumah membantu mereka bekerja, baik pekerjaan yang di rumah atau di sawah-sawah dan ladang-ladang mereka.<sup>21</sup> Dalam hal pendidikan buat anak-anaknya mereka serahkan kepada *Teungku-Teungku* atau para ulama yang mengusahakan sistem pendidikan (pendidikan agama) baik di meunasah maupun di dayah atau pesantren.

Maka sehubungan dengan masalah-masalah di atas, pemerintah Hindia

18.M.H. Du Croo dan H.J. Schmidt, *Generaal Swart Pacificator van Atjeh*, (maastricht: N.V. Leiter-Nypels, 1943), hal. 134.

19.Laporan Inspektor Pendidikan Bumi-Putra, A. Vogel pada tahun 1919, berkenaan dengan Pendidikan di Daerah Aceh dan Daerah-Daerah Takluknya. (Verslag betreffende het Volsonderwijs in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden), Vb. 1-2-'12/87. *Mailrs.* 3225/20. hal. 23.

20.*Ibid.*, hal. 24.

21.Lihat *Koloniaal Verslag*, 1909, hal. 14-15.



Belanda di Aceh mencoba memberi penjelasan kepada rakyat melalui para Uleebalang; bahwa pendidikan yang mereka berikan pada sekolah-sekolah rakyat itu tidak bertentangan dengan *hukom* atau syariat Islam.<sup>22</sup> Oleh karena mata pelajaran yang diberikan atau yang diajarkan pada sekolah-sekolah rakyat tersebut (selama 3 tahun ajaran) pada umumnya adalah: membaca (tulisan Latin dalam bahasa Aceh yang pada mulanya digunakan buku "*Doea Silayeu*" buah tangan Nyak Cut, seorang putera Uleebalang di Aceh Besar yang pernah dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda bersekolah pada *Kweek-school* di Bukit Tinggi), menulis dalam huruf Latin dan huruf Arab serta dikte dalam kedua huruf, berhitung dan pecahan sederhana, latihan berbicara atau bercakap-cakap, dan sedikit diberikan pengetahuan ilmu bumi tentang Hindia Belanda (Indonesia).<sup>23</sup> Sedangkan uang sekolah yang dikenakan bagi murid-murid yang harus dibayar oleh orang tua mereka juga tidak banyak, yaitu sekitar f. 0.10 hingga f. 0.15 (antara 10 sampai 15 sen) pertahun. Dan dalam prakteknya uang sekolah ini pada masa-masa awal didirikan sekolah tersebut belum dipungut bayaran, tetapi kemudian dipungut berkisar antara 4 sampai 10 sen saja.<sup>24</sup> Adapun sekolah setiap hari dimulai pada jam 8 dan berakhir hingga pukul 11, atau selambat-lambatnya pukul 11.30; sedang pada hari Jum'at dan hari Minggu serta pada hari-hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah, sekolah juga diliburkan; dan pada bulan puasa, sebulan penuh diliburkan.<sup>25</sup>

Untuk mengatasi masalah-masalah atau kesukaran-kesukaran yang dihadapinya pemerintah Hindia Belanda telah mengambil beberapa tindakan. Misalnya untuk mengatasi kekurangan guru, maka sejak tahun 1909 dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 1909 No. 23, di Kutaraja mulai didirikan sekolah yang disebut *Normaal Cursus*, dengan maksud khusus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat untuk daerah Aceh. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 7 Pebruari 1910. Dan pada mulanya hanya dikunjungi oleh 12 orang siswa.<sup>26</sup> Sehubungan dengan maksud pemerintah untuk meramaikan sekolah-sekolah rakyat, pihak pemerintah menyerahkan para *controleur*-nya dan meminta bantuan para Uleebalang yang mau bekerjasama, supaya memaksa orang-orang tua yang tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah itu. Dan terhadap mereka yang membangkang, didenda atau dihukum dengan bekerja pada pembuatan jalan-jalan atau yang disebut *rodi*.<sup>27</sup> Oleh karenanya kalau tidak disertai dengan paksaan, tentu sekolah-sekolah rakyat itu pada mulanya akan menjadi kosong. Dan supaya

---

22. *Ibid.*

23. *Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie 1918*, (Batavia: G. Koeff & Co., 1920), hal. 123-124.

24. *Mailr.* No. 545/09.

25. *Ibid.*

26. *Mailr.* 1613/10. Lihat juga *Koloniaal Berslah 1910*, hal 12.

27. J. Kreemer, *Atjeh* deel II, (Leiden: E.J. Brill, 1923), hal. 160.

sekolah-sekolah ini tetap dikunjungi oleh murid-murid, maka pihak Uleebalang terus mengadakan tekanan terhadap orang tua si anak. Oleh karena takut terhadap sanksi yang ditetapkan oleh Uleebalang, menyebabkan orang-orang tua mengirinkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilaporkan oleh A. Vogel (Inspektur Pendidikan Bumi Putra) pada tahun 1919, bahwa pada mulanya pendidikan ini di Aceh tidak tumbuh secara wajar, tetapi dipaksakan karena rakyat di Aceh pada umumnya belum menyukainya.<sup>28</sup>

Suatu permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda pada sistem pendidikan sekolah-sekolah rakyat di Aceh adalah berkenaan dengan maksud pemerintah untuk mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Sesuai dengan konsepsi Van Mook (salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda, yang terkenal dengan politik *divide et impera*) yang menghendaki agar kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia dihidupkan kembali dan untuk ini bahasa-bahasa daerah juga harus dikembangkan kembali, maka pada tahun 1931, pemerintah Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, di samping bahasa Melayu yang sudah digunakan sebelumnya. Adapun dalih yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, murid-murid akan cepat mengerti dan cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Dan juga rakyat akan dapat membaca dan menulis bahasa ibunya sendiri dengan menggunakan huruf-huruf Latin, sehingga bahasa Aceh sebagai bahasa literatur akan dapat dihidupkan kembali.<sup>29</sup> Untuk daerah-daerah Gayo, Alas, Tamiyang dan Singkel yang bukan bahasa Aceh sebagai bahasa Ibu, bahasa Melayu akan tetap dipertahankan sebagai bahasa pengantar.<sup>30</sup>

Rupa-rupanya para cendekiawan Aceh yang diantaranya terdiri dari beberapa tokoh Uleebalang, tidak dapat menyetujui maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut,<sup>31</sup> meskipun pemerintah dalam hal ini telah memberi penjelasan-penjelasan. Para cendekiawan Aceh menganggap usaha pemerintah itu akan mencegah berkembangnya bahasa Melayu di Aceh. Dan dengan demikian akan menghambat rakyat Aceh untuk mengerti bahasa tersebut yang amat diperlukan bagi pengembangan ekonomi mereka, dan dalam berhubung-

28. A. Vogel, "Verslag betreffende het Volksonderwijs in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden." Lihat *Vb.* 1-2-'12. *Mailr.* 3225/20.

29. J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, (Baarn: N.V. Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 239), hal. 254. Lihat juga dalam Muhammad Ibrahim (ketua), (*Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979), hal. 105.

30. *Ibid.*

31. *Memorie van overgave van A.Ph. van Aken, Aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*, Pebruari 1936, hal. 137. *Mailr.* 504/geh. 1936.

an dengan suku-suku lain di sekitarnya. Tetapi pemerintah Hindia Belanda di Aceh tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana itu. Dan pada tanggal 1 Juli 1932, menetapkan secara resmi pemakaian bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat sebagai pengganti bahasa Melayu, kecuali di beberapa daerah seperti telah disebutkan di atas.<sup>32</sup>

Meskipun bahasa Aceh telah ditetapkan sebagai bahasa pengantar sejak tanggal 1 Juli 1932, tetapi bahasa Melayu pada beberapa sekolah masih tetap juga digunakan. Menurut laporan umum pemerintah Hindia Belanda tentang pendidikan di Aceh, pada tahun 1933 dan tahun 1934, masih terdapat 88 buah sekolah rakyat yang terdapat di kota-kota besar di Aceh yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan yang lainnya (sebanyak 207 buah) telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa bantu.<sup>33</sup> Adapun perinciannya di setiap kota-kota itu adalah sebagai berikut:

- A. Yang telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar atau bahasa bantu; Langsa 16 buah, Lhok Seumawe 60 buah, Sigli 42 buah, Kutaraja 42 buah, Meulaboh 30 buah, dan Tapak Tuan 17 buah.
- B. Yang tetap menggunakan bahasa Melayu; Langsa 38 buah, Lhok Seumawe 5 buah, Sigli 6 buah, Kutaraja 7 buah, Meulaboh 1 buah, dan Tapak Tuan 34 buah.<sup>34</sup>

Menurut J. Jongejans yang menjabat sebagai residen di Aceh sejak tanggal 5 Maret 1936 hingga bulan September 1938,<sup>35</sup> pada tahun 1939 dari 329 buah jumlah sekolah-sekolah rakyat yang terdapat di seluruh Aceh, 210 buah di antaranya telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Melayu.<sup>36</sup>

Pada akhir tahun 1920, jumlah sekolah-sekolah rakyat di seluruh Aceh adalah 266 buah dengan tenaga pengajar 527 orang dan jumlah murid 16435, yang terdiri dari 14515 orang laki-laki dan 1920 orang murid perempuan. Akhir tahun 1921 menjadi 275 buah, dengan guru 539 orang, dan jumlah murid 16674 orang yang terdiri dari 14352 orang murid laki-laki dan 2322 orang murid perempuan. Dan pada akhir tahun 1922 jumlah ini meningkat lagi menjadi 287 buah dengan jumlah guru 553 dan jumlah murid 16991 orang, yang terdiri atas 14636 orang murid laki-laki dan 2355 orang murid perempuan.<sup>37</sup> Menurut memori serah terima jabatan Gubernur Aceh Daerah-Daerah takluknya A. Ph. Van Aken, Pebruari 1936, jumlah sekolah rakyat di

32. Daerah-daerah yang dimaksud adalah Gayo, Alas, Tamiyang dan Singkel. Lihat Muhammad Ibrahim (ketua), *loc. cit.* Lihat juga dalam *De Deli Courant* (Surat Kabar Deli yang terbit di Medan) tanggal 7 Januari 1933.

33. *Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie Over het Schooljaar 1933-1934*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1936), hal. 71.

34. *Ibid.*

35. *Regeeringsalmanak Voor Nederlandsch-Indie 1937*, hal. 367 dan 1939, hal. 324.

36. J. Jongejans, *loc. cit.*

37. *Algemeen Verlag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1921 en 1922*, (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1924), hal. 123.

seluruh Aceh pada akhir jabatannya (tahun 1936) adalah 321 buah dengan jumlah murid 33553 orang; diantara mana terdapat 9871 orang atau 29% murid perempuan.<sup>38</sup> Menjelang masa akhir pemerintah Hindia Belanda di Indonesia atau pada tahun 1939, jumlah sekolah-sekolah rakyat atau sekolah desa di seluruh Aceh sudah mencapai 248 buah, dengan lebih dari 600 orang pendidik atau guru dan lebih dari 26.000 orang murid.<sup>39</sup>

Selain sekolah rakyat atau sekolah desa, pada tahun yang hampir bersamaan pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak perempuan atau yang disebut *Meisjesschoolen*. Sekolah khusus untuk anak perempuan ini pertama didirikan pada tanggal 1 Mei 1910, juga di distrik Ulee Lheue mukim meraksa (seperti halnya sekolah rakyat yang pertama).<sup>40</sup> Dan usaha pendirian sekolah ini ikut dibantu oleh Ulee-balang setempat yaitu yang bernama Teuku Teungoh. Pada pertengahan tahun 1914, jumlah sekolah-sekolah puteri yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh sudah meningkat menjadi tujuh buah, yang lokasinya menyebar di seluruh *afdeeling* di Aceh, yaitu di Ulee Lheue, Kutaraja, Lamreung (wilayah *Sagi XXVI Mukim*) Aceh Besar, Meulaboh (*Westkust van Atjeh*), Meureudu (*Noordkust van Atjeh*), Peureulak (*Oostkust van Atjeh*) dan di Kuta Cane (*Alaslanden*), dengan jumlah murid seluruhnya 418 orang.<sup>41</sup>

Dalam mengembangkan sekolah-sekolah puteri ini, beberapa isteri pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda di Aceh seperti Nyonya Swart (isteri Gubernur H.N.A. Swart), Nyonya Nijs (isteri asisten residen Nijs), Nyonya Doornik (isteri asisten residen Doornik), turut memberikan jasa-jasa mereka, terutama dalam memajukan pendidikan di sekolah ini.<sup>42</sup> Dan tujuan mereka sebenarnya juga tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah Hindia Belanda di Aceh, yaitu dalam hubungan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mengurangi kefanatikan wanita-wanita Aceh dalam permusuhannya dengan penjajah Belanda. Oleh karena mereka juga telah mendengar, mengetahui dan melihat bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh beberapa wanita Aceh dalam peperangannya melawan Belanda.<sup>43</sup>

Pada setiap sekolah ini, umumnya mempunyai lokal atau klas empat atau lima lokal. Adapun lamanya pelajaran biasanya mulai dari setengah delapan, jam delapan atau setengah sembilan pagi hingga jam satu siang. Sebagian besar waktu disekolah ini digunakan untuk belajar ketrampilan yang berhubungan dengan pekerjaan tangan, seperti menjahit, merenda, bordir, sulam-menjulam, adat-istiadat (sopan santun), dan lain-lain yang berhubungan

---

38. *Memorie van Overgave van A. Ph. van Aken, op. cit.*, hal. 136.

39. J. Jongejans, *loc. cit.* Lihat juga A.J. Piekaar, *op. cit.*, hal 29.

40. *Kolonial Verslaag*, 1911, hal. 7-8.

41. C.L., *Meisjeschoolen op Atjeh*, "TBB, (1915), hal. 140.

42. *Ibid.*, lihat juga dalam C.L., "School En Huwelijk op Atjeh," TBB, (1915), hal. 206-209.

43. *Ibid.*, hal. 309.

dengan kewanitaannya.<sup>44</sup> Seperti juga pada sekolah-sekolah rakyat, di sekolah-sekolah puteri ini juga terjadi pemaksaan terhadap orang-orang tua murid agar mengirim anak-anak perempuan mereka untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut. Dan untuk ini pada Uleebalang juga sebagai perantaranya. Sama halnya dengan pada sekolah-sekolah rakyat, jika tidak disertai dengan paksaan, tentu sekolah-sekolah putri ini pada mulanya juga akan menjadi kosong.<sup>45</sup>

Perkembangan sekolah-sekolah putri ini, meskipun tidak sepesat perkembangan seperti pada sekolah rakyat, tetapi setiap tahunnya juga menunjukkan jumlah yang meningkat. Misalnya pada tahun 1916, jumlah sekolah ini sudah mencapai sembilan buah dengan jumlah murid 704 orang. Dan pada dua tahun berikutnya atau tahun 1918, jumlah ini meningkat menjadi 20 buah, dengan jumlah murid 1321 orang.<sup>46</sup> Berapa jumlah keseluruhan sekolah ini pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, tim peneliti belum mendapatkan suatu angka yang pasti.

Sebagai lanjutan dari sekolah-sekolah rakyat, yang wujudnya untuk memberi pendidikan dasar kepada rakyat, maka seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia pada masa itu, juga di Aceh oleh pemerintah Hindia Belanda didirikan sekolah-sekolah yang disebut *Vervolgschool* (sekolah sambungan atau lanjutan). Sekolah ini merupakan lanjutan atau sambungan dari sekolah rakyat. Murid-murid dari sekolah rakyat atau sekolah desa yang telah berhasil menamatkan pelajarannya, mereka dapat menyambung atau melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah sambungan ini. Adapun lamanya pendidikan atau masa belajar pada sekolah ini hanya dua tahun. Seperti namanya sekolah sambungan (*Vervolgschool*) dari sekolah rakyat, maka sekolah-sekolah ini kadang-kadang ada yang ditempatkan dalam satu bangunan dengan sekolah-sekolah rakyat, yang pada umumnya baik gedung maupun perlengkapan belajar yang digunakan masih sangat sederhana. Sama seperti halnya dengan sekolah rakyat, di sekolah-sekolah ini pada mulanya bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa pengantar (kecuali pada sebuah *vervolgschool* yang berada di Sabang, yang oleh karena tidak terdapat sekolah HIS di sana, maka ditetapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar).<sup>47</sup>

Pada umumnya sekolah-sekolah ini dikunjungi oleh anak-anak rakyat atau anak penduduk gampong (kampung) yang keadaan ekonomi mereka lebih baik dan juga oleh anak-anak dari pegawai rendahan, dengan tujuan agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan lebih lanjut dari pada sekolah rakyat.

---

44. J. Kreemer, *op. cit.*, hal 165.

45. A. Vogel, *loc. cit.*, lihat juga dalam J. Kreemer, *ibid.*, hal 166.

46. M.H. Du Croo dan H.J. Schidt, *loc. cit.*

47. J. Jongenans, *op. cit.*, hal. 259.

Adapun mata pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah ini adalah sebagai lanjutan dari pada sekolah rakyat, misalnya seperti mata pelajaran berhitung sedikit lebih tinggi dari pada yang diberikan di sekolah rakyat, dan lain-lain. Oleh karena pemerintah Hindia Belanda di Aceh berkeinginan untuk mengerahkan pendidikan pada sekolah-sekolah ini terhadap kebutuhan-kebutuhan mendesak, yaitu yang berkecenderungan ke bidang pertanian, maka ada di antara *vervolgschool* di Aceh yang dibuka satu kelas khusus lagi tentang pertanian. Di sini mata pelajarannya, di samping murid-murid harus praktek pada perkebunan-perkebunan besar milik pemerintah juga diadakan ekskursi ke beberapa tempat dan kepada murid-murid diberikan pelajaran tentang teori-teori sederhana yang berhubungan tentang pertanian, peternakan, perikanan, perbankan, kredit rakyat dan lain-lain.<sup>48</sup>

Oleh karena jumlah tenaga pendidik yang tersedia masih terbatas, maka perkembangan sistem pendidikan ini di Aceh sangat lambat. Menurut J. Jongejans (bekas Residen Aceh dan Daerah-daerah Takluknya 5 Maret 1936 hingga 1938), dalam sebuah karyanya tentang Aceh yaitu *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, menyebutkan bahwa hingga tahun 1938, jumlah sekolah-sekolah sambungan/lanjutan (*vervolgschool*) di seluruh Aceh adalah 40 buah, dengan jumlah pendidik/guru hampir 100 orang dan jumlah murid lebih dari 3200 orang.<sup>49</sup> Sementara menurut A.J. Piekaar, pada akhir tahun 1939 jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh sudah mencapai 45 buah.<sup>50</sup>

Di samping sekolah-sekolah sambungan/lanjutan seperti tersebut di atas, di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar milik pemerintah lainnya, yaitu yang disebut H.I.S. (*Hollandsch Inlandsche School*), dengan lamanya masa pendidikan/belajar 7 tahun. Berbeda dengan jenis pendidikan pada sekolah-sekolah rakyat dan sekolah-sekolah sambungan, di lembaga H.I.S. ini berbagai fasilitas yang disediakan untuk keperluan belajar jauh lebih baik. Baik gedung maupun alat-alat perlengkapan belajar yang digunakan cukup permanen dan baik. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini diantaranya adalah bahasa Belanda (dalam hal ini sangat ditekankan pada berbicara dan dapat menulis dengan baik), berhitung, ilmu Bumi, sejarah, biologi, melukis dan olah raga. Pelajaran-pelajaran ini sebagian diberikan dalam bahasa Belanda dan sebagian dalam bahasa Melayu. Para pendidik/guru pada umumnya terdiri dari orang-orang pribumi, akan tetapi semua guru kepala pada sekolah ini dipegang oleh orang-orang Eropa atau Belanda.<sup>51</sup>

Diploma atau ijazah dari sekolah ini, dapat memberi kesempatan lapangan kerja atau jabatan yang begitu didambakan dalam kalangan orang-orang Bumi-Putra yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda.

---

48. *Ibid.*

49. *Ibi.*, hal. 258.

50. A.J. Piekaar, *loc. cit.*

51. J. Jongejans, *op. cit.*, hal. 261.

Dan pada umumnya pendidikan di HIS ini terutama diperuntukkan bagi murid-murid yang datang dari lingkungan yang berbahasa Belanda. Oleh karenanya murid-murid yang banyak mengunjungi sekolah ini adalah anak-anak dari keluarga golongan bangsawan Aceh (para Uleebalang) dan anak-anak dari pegawai tinggi pemerintah yang mempunyai kedudukan dan berasal dari kalangan penduduk bumiputra saja. Menurut catatan Residen J. Jongejans, pada sekitar tahun tiga puluhan banyak sekali permintaan dari masyarakat Aceh terutama dari kalangan mereka yang mampu agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah ini. Tetapi permintaan ini ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>52</sup>

Oleh karena ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memasuki sekolah ini, maka pintu sekolah H.I.S., hanya terbuka bagi anak-anak dari golongan bangsawan dan kepada anak-anak dari kalangan rakyat biasa ataupun anak-anak dari saudara-saudara yang meskipun mungkin mereka sanggup membiayai biaya sekolah ini, tetapi tetap sulit untuk dapat diterima di H.I.S.

*Hollandsch Inlandsche School* (H.I.S.) di Aceh, oleh pemerintah Hindia Belanda didirikan hanya terbatas di kota-kota besar saja. Dan yang pertama sekali didirikan sekolah ini adalah di Kutaraja pada tahun 1915, selanjutnya pada tahun 1916 dibuka pula di Lhok Seumawe (*Afdeeling Noordkust van Atjeh*) dan di Langsa (*Afdeeling Oost kust van Atjeh*).<sup>53</sup> Menurut laporan Inspektur pendidikan A. Vogel, jumlah murid pada ketiga sekolah H.I.S. ini dalam tahun 1918 adalah hampir mendekati 500 orang,<sup>54</sup> dengan perincian sebagai berikut, di Kutaraja sebanyak 178 orang murid, Lhok Seumawe 145 orang dan di Langsa 165 orang murid.<sup>55</sup> Berdasarkan laporan umum pendidikan di Hindia Belanda pada akhir tahun 1928, jumlah sekolah-sekolah ini di Aceh sudah meningkat menjadi lima buah dengan lokasi masing-masing di Kutaraja satu buah, Langsa satu buah, Lhok Seumawe satu buah, Sigli satu buah dan di Tapak Tuan (*Afdeeling Westkust van Atjeh*),<sup>56</sup> yang didirikan sejak tahun 1925. Di antara guru-guru yang pernah mengajar pada H.I.S. di Tapak Tuan ini dapat disebutkan antara lain M. Jamil, A. Khatib, R. Abidin dan Ali Murtolo. Kecuali A. Khatib, kesemua guru-guru ini berasal dari Tapanuli dan Jawa. Pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, jumlah sekolah-sekolah ini sudah mencapai delapan buah.<sup>57</sup>

Selain H.I.S. yang khusus untuk anak-anak orang pribumi, pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan

52. *Ibid.*

53. J. Langhout, *Economische Staatkunce in Atjeh*, (Den Haag: N.V. Boekhandel v/h W.P. Van Stockum & Zoon, 1923), hal 102.

54. A. Vogel, *Verslag...*, *op. cit.*, hal. 33.

55. J. Kreemer, *op. cit.*, hal. 168.

56. *Algemeen Verslag van Het Onderwijs In Nederlandsch-Indie over 1928*, (Weltevreden: Landsdrukkrij, 1930), hal. 167.

57. A.J. Piekaar, *loc. cit.*

*Hollandsh Chinese School* atau disingkat H.C.S.,<sup>58</sup> yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak orang Cina, dan lokasi sekolah ini adalah di Kutaraja dan Tapak Tuan. Pada sekolah ini bahasa pengantar seluruhnya dipakai bahasa Belanda. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mengurangi anak-anak Cina membanjiri lebih banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Cina sendiri. Dan supaya orang-orang Cina tetap dijauhkan dari orang-orang pribumi. Selain H.C.S., pemerintah juga mendirikan sebuah *Hollandsch Ambonsche School* yang juga khusus diperuntukkan bagi anak-anak orang Ambon (dari militer Belanda), khususnya yang berada di Kutaraja. Sekolah ini pertama kali dibuka di Kutaraja pada tanggal 2 Oktober 1911.<sup>59</sup>

Pendidikan dasar lainnya yang juga terdapat di Aceh adalah yang disebut *Europeesche Lagere School* atau disingkat E.L.S., yang berarti sekolah-sekolah rendah Eropa. Sesuai dengan namanya maka sekolah ini pada umumnya diperuntukkan hanya buat anak-anak orang Eropa atau Belanda dan sebagian kecil saja untuk anak-anak golongan bangsawan (Uleebalang). Jadi bagi anak-anak rakyat biasa sama sekali tidak diperkenankan untuk memasuki sekolah ini. Lama pendidikan atau belajar tujuh tahun, dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti gedung dan alat-alat perlengkapan belajar lainnya sangat baik dan mewah. Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda, pada tahun 1916 jumlah *Europeesche Lagere School* di seluruh Aceh ada empat buah. Dan tiga buah di antaranya hampir seluruh murid-muridnya terdiri dari anak-anak orang Eropa (Belanda), sedang yang satunya terdapat percampuran antara anak-anak Belanda dengan anak-anak golongan bangsawan Aceh (Uleebalang).<sup>60</sup> Dan rupa-rupanya pada sekolah yang tersebut terakhir ini, juga digunakan bahasa Melayu sekedarnya sebagai bahasa bantu,<sup>61</sup> yang mungkin untuk membantu atau memudahkan para anak-anak uleebalang dalam mengikuti pelajaran pada sekolah tersebut.

Hingga tahun 1928, jumlah sekolah ini di seluruh Aceh tetap empat buah, yang masing-masing terdapat di Kutaraja, di Langsa, Sigli, dan Sabang.<sup>62</sup> Dan jumlah ini sampai akhir tahun 1939 tetap empat buah.<sup>63</sup>

Berdasarkan laporan Inspektur Pendidikan sekolah-sekolah bumiputra A. Vogel, dapat diketahui bahwa di Aceh juga terdapat jenis pendidikan da-

---

58. Lihat *Algemeen Verslag...*, (1930), *op. cit.*, hal. 163.

59. J. Kreemer, *op. cit.*, hal. 169.

60. *Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie 1916*, (Batavia: G. Kolff & Co., 1917), hal. 13.

61. *Ibid.*

62. *Algemeen Vers*

63. *Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie Over 1928*, Eerste deel: Tekst, (Wetlevreden: Landsdrukkerij, 1930), hal. 160.

63. Lihat A.J. Piekaar, *lo. cit.*



sar lainnya yang disebut *De 2de klasse—scholen*,<sup>64</sup> (sekolah-sekolah kelas dua). Selain itu juga terdapat yang disebut dengan nama *Inlandsche School* (sekolah bumiputra) atau yang lebih populer dengan nama Sekolah Melayu; yang kesemuanya oleh pemerintah dinamakan *Inlandsche Gouvernement-scholen* (sekolah-sekolah bumiputra pemerintah).<sup>65</sup> Pada umumnya sekolah-sekolah ini didirikan di kota-kota dan lamanya pendidikan lima tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Baik Gedung maupun alat-alat perlengkapan belajar yang disediakan adalah sederhana. Pada akhir tahun 1919, jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh ada 28 buah, dengan jumlah 4170. orang.<sup>66</sup>

Selain *Inlandsche School* (sekolah melayu), di beberapa kota besar di Aceh, juga didirikan sekolah yang disebut *Shakel School*, yaitu suatu lembaga pendidikan yang khusus disediakan buat murid-murid yang telah tamat belajar di *Vervolgschool*. Di sini bahasa pengantar diberikan dalam bahasa Belanda, sehingga untuk sekolah ini juga ada yang menyebutnya dengan *Vervolgschool met Nederlandsch* (sekolah sambungan dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya). Lama belajar pada sekolah ini tiga tahun. Berapa jumlah sekolah dan jumlah murid serta jumlah pendidikan dari sekolah ini tim peneliti belum mendapatkan suatu angka yang pasti.

Kalau di atas telah dikemukakan beberapa jenis sekolah dasar, maka sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar tersebut (terutama untuk mereka yang akan masuk ke E.L.S. dan H.I.S.), pemerintah Hindia Belanda di Aceh telah mendirikan pula suatu lembaga yang disebut *Voorbereidend Onderwijs* (pendidikan persiapan). Lembaga ini mulai didirikan pada tahun 1915 di Kutaraja,<sup>67</sup> yang mempunyai dua sekolah, yaitu pertama, disebut *de Neutrale Frobelschool* (sejenis pendidikan taman kanak-kanak yang murid-muridnya campuran antara anak-anak Belanda, anak-anak militer Ambon dan anak-anak golongan bangsawan serta yang berkedudukan); kedua, yang disebut *de Roomsche Katholieke Frobelschool* (juga sejenis taman kanak-kanak, yang murid-muridnya khusus dari keluarga orang-orang yang beragama Katolik Romawi).<sup>68</sup>

Sungguhpun pada tahun 1939 jumlah lembaga pendidikan dasar (sekolah-sekolah dasar) di seluruh Aceh sudah sedemikian rupa (seperti telah dikemukakan di atas), tetapi menurut sensus penduduk tahun 1930,<sup>69</sup> orang-orang yang tidak buta huruf (huruf latin) diperkirakan sekitar 1.1%, yang apabila dibandingkan dengan di Pulau Jawa yang pendidikan dasar (berupa se-

64. A. Vogel, *Verslag...*, *loc. cit.*

65. Lihat J. Kreemer, *op. cit.*, hal. 167.

66. A. Voegel, *loc. cit.*

67. Lihat dalam R. Broersma, *Atjeh Als Land Voor Hendel En Bedrijf*, (Utrecht: Gebr. Cohen, 1925, hal. 92.

68. *Memorie van overgave assistent resident van Groot-Atjeh, C.E. Maier, 17 Juni 1935.*

69. *Volkstelling 1930 deel IV: Inheemsche Bevolking van Sumatra*, (Batavia: Departement van Economische Zaken, Landsdrukkerij, 1935.

kolah-sekolah desa) sudah lama diadakan, jumlah orang yang tidak buta huruf adalah 5,5%, maka persentase yang tidak buta huruf di Aceh boleh dikatakan agak baik.<sup>70</sup>

### 3. Pendidikan Menengah Umum

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928, satu-satunya lembaga pendidikan menengah yang terdapat di Aceh dan daerah-daerah takluknya ialah yang disebut M.U.L.O. (*Meer Uitbreid Lager Onderwijs*),<sup>71</sup> yang sejak zaman pendudukan Jepang hingga sekarang dikenal dengan nama S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama).<sup>72</sup> Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda paling tinggi yang ada di Aceh,<sup>73</sup> dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/'21 di Kutaraja dengan lamanya masa belajar 3 tahun.<sup>74</sup> Berdasarkan memori serah terima jabatan asisten residen Aceh Besar C.E. Maier pada 17 Juni 1935, jumlah murid pada sekolah itu (tahun 1935) adalah 79 orang.<sup>75</sup>

Pada mulanya pendirian M.U.L.O. di Aceh selain dimaksudkan untuk menampung murid-murid yang telah menamatkan pendidikan pada *Hollandsch School (H.I.S.)* dan *Europeese Lagere School (E.L.S.)* serta mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya,<sup>76</sup> juga dalam rangka untuk mendidik kader-kader uleebalang yang tampil.<sup>77</sup> Maka sehubungan dengan maksud tersebut, Gubernur van Aken (yang merupakan gubernur terakhir dari pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, karena sesudahnya Aceh berada di bawah seorang residen), menyebutkan bahwa pendidikan tingkat M.U.L.O. sangat diperlukan di daerah Aceh, terutama untuk para keluarga uleebalang yang mampu dan untuk keluarga pemuka-pemuka adat lainnya. Lebih lanjut van Aken menambahkan bahwa meskipun pemerintah Hindia Belanda telah mengirimkan anak-anak uleebalang ke luar Aceh seperti ke *Fort de Kock* (Bukit Tinggi), Asahan dan ke Pulau Jawa untuk dididik di sana, tetapi akan lebih baik lagi bila mereka itu dapat dididik dengan pendidikan Barat dalam *milieu* (lingkungan) sendiri, agar mereka tidak begitu "jauh" dari lingkungan masyarakat dan kebudayaannya.<sup>78</sup>

Hampir bersamaan dengan didirikan M.U.L.O., pemerintah juga telah mendirikan sebuah asrama yang diberi nama *Atjehsch Internaat*. Meskipun dalam statuta internaat itu yang bertanggal 27 Januari 1922, disebutkan

---

70. J. Jongehans, *op. cit.*, hal. 254.

71. Algemeen Verslah (1928),..., *op. cit.*, hal. 167.

72. I. Djumhur dan H. Dnasuparta, *op. cit.*, hal. 111.

73. Memorie van overage van Aken, *op. cit.*, hal. 141.

74. *Koloniaal Verslag*, (2932), hal. 66.

75. Memorie van overgave assistent resident van Groot Atjeh, *loc. cit.*

76. *Koloniaal Verslag*, (1921), *loc. cit.*

77. Memorie van overgave van Aken, *op. cit.*, hal. 142.

78. *Ibid.*

bahwa internaat itu dibuka bagi segala suku bangsa yang berasal dari luar Kutaraja.<sup>79</sup> tetapi dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan buat pemondokan para siswa yang bersekolah di M.U.L.O. dan H.I.S. yang umumnya terdiri dari putera-putera uleebalang.<sup>80</sup>

Pada masa residen J. Jongejans (1936–1938), mulai terbuka kesempatan yang lebih luas kepada setiap suku bangsa (baik, Eropa maupun pribumi) untuk memasuki sekolah M.U.L.O. dan menurut J. Jongejans pada masa itu di antara murid-murid sekolah itu juga terdapat beberapa putera Aceh dari golongan bangsawan.<sup>81</sup> Menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda di Aceh, jumlah sekolah ini tetap satu buah, tetapi perhatian masyarakat terhadap jenis pendidikan ini semakin besar. Dan sebagai akibat dari pendidikan ini, maka di Aceh telah lahir suatu golongan yang berpendidikan menengah, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengadakan seleksi dalam penerimaan pegawai-pegawai pada berbagai jenis jabatan pemerintah di Aceh pada masa itu.<sup>82</sup>

#### 4. Pendidikan Kejuruan

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga tukang yang dapat mengisi jabatan-jabatan rendah pada lembaga-lembaga pemerintahan seperti masinis kereta api, perbengkelan, montir dan sebagainya, maka pemerintah Hindia Belanda membuka sebuah *Ambachtschool* (Sekolah Pertukangan) yang ditempatkan di *Atjeh Spoor* di Sigli (*Noordkust van Atjeh*). Pada mulanya sekolah ini dikhususkan dalam kejuruan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan logam (besi) dan kemudian juga dibuka bagian pertukangan yang berhubungan dengan kayu.<sup>83</sup> Menurut Gubernur van Aken (1932–1936) jenis pendidikan tukang tersebut terutama tukang kayu adalah sangat sesuai untuk daerah Aceh pada masa itu, mengingat *oetoeih-oetoeih* (tukang-tukang) orang Aceh, terutama mereka yang ahli dalam membangun rumah-rumah Aceh maupun yang menempa besi-besi untuk membuat alat-alat senjata dan perlengkapan lainnya, tidak menunjukkan adanya perkembangan, baik dalam sistem maupun dalam tehnik mereka bekerja, yang pada umumnya masih secara tradisional.<sup>84</sup> Dan sehubungan dengan sekolah pertukangan ini, van Aken juga menganjurkan supaya di Aceh didirikan pula sebuah kursus montir.<sup>85</sup> Bagaimana perkembangan dan kelanjutan dari *Ambachtschool* di Sigli itu, tim peneliti belum mendapatkan data-data yang kongkrit.

Menurut catatan R. Broersma dalam karyanya *Atjeh Als Land Voor Handel en Bedrijf*, di Kutaraja dalam tahun 1925 sudah terdapat sebuah

79. J. Kreemer, *op. cit.*, hal. 169.

80. *Kolonoaal Verslag* (1924), hal. 6 Lihat juga *memorie van overgave van Aken*, *loc. cit.*

81. J. Jongejans, *op. cit.*, hal. 262.

82. A.J. Pieker, *op. cit.*, hal. 29.

83. J. Jongejans, *op. cit.*, hal. 260.

84. *Memorie van overgave van Aken*, *loc. cit.*

85. *Ibid.*

*Ambachtschool*,<sup>86</sup> A.J. Piekaar (bekas sekretaris residen pemerintah Hindia Belanda yang terakhir di Aceh), juga menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh hanya terdapat satu sekolah tukang,<sup>87</sup> dan sekolah tersebut berada di Kutaraja. Dapat ditambahkan bahwa meskipun sangat langkanya sekolah tukang itu, tetapi beberapa Kursus Pertukangan (*Ambacht Leergang*) pada sekitar tahun tiga puluhan juga terdapat di Aceh. Di antaranya *Ambacht Leergang* yang terdapat di Tapak Tuan, dengan guru-gurunya antara lain M. Jusuf dan M. Syam. mengenai data-data yang kongkrit tentang sekolah ini tim peneliti juga belum mendapatkannya.

Seperti telah disinggung di atas bahwa di Aceh (distrik Ulee Lheue) sejak tanggal 1 Mei 1910, telah didirikan sebuah *Meisjesschool* (sekolah puteri). Dan sampai pada tahun 1918 jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh sudah mencapai 20 buah dengan jumlah murid 1321 orang. *Meisjesschoolen* (sekolah-sekolah puteri) ini adalah identik dengan sekolah kejuruan wanita, karena yang diajarkan di sini pada umumnya adalah ketrampilan dengan pekerjaan tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan rumah tangga.<sup>88</sup> Dalam perkembangannya sekolah puteri yang di Ulee Lheue itu, telah lebih dikhususkan lagi dalam hal pertenenan, sehingga sekolah ini pada sekitar tahun tiga puluhan disebut juga terutama oleh orang-orang Belanda dengan nama *Weefschool* (Sekolah Pertenenan).<sup>89</sup>

Menurut memori serah terima jabatan Gubernur van Aken, pada masa pemerintahannya di Aceh sudah terdapat dua buah sekolah pertenenan (*Weefschool*), yang satu berlokasi di Ulee Lheuw seperti tersebut di atas, dan yang sebuah lagi di Samalanga (*Noordkust van Atjeh*). Pada kedua sekolah kejuruan (pertenenan) ini, terutama diajarkan bagaimana cara bertenen dengan menggunakan alat-alat yang digerakkan oleh tangan yang pada masa dahulu pernah terkenal di Aceh. Maka untuk ini motif-motif Aceh lama, perlu diperkenalkan dan dihidupkan kembali melalui sekolah-sekolah kejuruan itu.<sup>90</sup> Dan dalam hubungan ini perlu disebutkan bahwa masing-masing uleebalang di kedua daerah tempat sekolah tersebut berlokasi, ikut berpartisipasi membantu kelancaran jalannya pendidikan tersebut. Malahan T. Teungoh (uleebalang mukim Meuraksa, Ulee Lheusa) merelakan tempat tinggalnya digunakan untuk tempat sekolah tersebut.<sup>91</sup>

Berdasarkan pasal 6 ad. d, statuta dan anggaran rumah tangga dari *Vereeniging Atjeh* (Serikat Atjeh) tahun 1916, yang bunyinya: kalau dirasa perlu oleh Hoofdbestuur maka diberikan djoega pertolongan dengan wang kepada moerid-moerid dari *Normal Cursus*, *Ambachtschool* dan *Landbouw*

86. R. Broersma, *loc. cit.*

87. Lihat A.J. Piekaar, *loc. cit.*

88. J. Langhout, *op. cit.*, hal. 100.

89. *Memorie van overgave van Aken, loc. cit.*

90. J. Jongejans, *loc. cit.*

91. *Memorie van overgave van Aken, loc. cit.*

*school*,<sup>92</sup> maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1916, di Aceh juga sudah terdapat jenis pendidikan kejuruan. Di antaranya yaitu *Normaal Cursus* (kursus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat), *Ambachtschool* (sekolah pertukangan) dan *Landbouwschool* (Sekolah Pertanian). Menurut J. Langhout dalam karya: *Economische Staatkunde in Atjeh*, sekolah-sekolah kejuruan tersebut mulai didirikan di Aceh pada masa H.N.A. Swart menjadi Gubernur Aceh dan Daerah-Daerah Takluknya sejak tahun 1908 sampai tahun 1918.<sup>93</sup> Adapun *Mornaal Cursus* mulai dibuka pada tanggal 7 Pebruari 1910 di Kutaraja,<sup>94</sup> sedangkan *Landbouwschool* (sekolah-sekolah pertanian) dirikan di Oelee Kareng (tidak begitu jauh dari Kutaraja) dan di Beureunun (Noordkust van Atjeh).<sup>95</sup>

Kalau di atas telah disebutkan bahwa pada beberapa *Vervolgschool* di Aceh ditambah satu tahun ajaran yang khusus diperuntukkan bagi pendidikan kejuruan pertanian dengan sistem kurikulum seperti juga telah disebutkan, maka pada beberapa sekolah ini lainnya juga telah ditambah dengan sebuah kelas lagi, di mana murid-murid diberi tambahan pelajaran Hitung Dagang dan Memegang Buku. Dan rupa-rupanya pendidikan kejuruan ini diperuntukkan khusus bagi mereka yang hendak bekerja dalam bidang perdagangan.<sup>96</sup> Data-data yang kongkrit tentang jenis pendidikan ini tim peneliti juga belum memperolehnya.

## B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL.

### 1. Motivasi

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pendidikan pemerintah Hindia Belanda mulai diperkenalkan kepada masyarakat Aceh sejak permulaan abad ke-20. Sebagai salah satu akibat dari padanya ialah muncul suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh, yaitu mereka yang telah dididik dan dibina dengan kebudayaan dan sistem nilai Belanda. Mereka ini diharapkan oleh Belanda akan terpisah dan jauh dari masyarakatnya, sehingga tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama dan pejuang-pejuang Aceh lainnya untuk tetap melawan Belanda. Dan juga diharapkan agar mereka dapat diperalat untuk kelangsungan kekuasaan Belanda. Tetapi berbeda dengan maksud dan hadapan Belanda seperti diutarakan di atas, karena tidak semua dari mereka yang telah dididik dengan pendidikan tersebut, berhasil dipengaruhi dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya. Oleh karena sebagian dari mereka pernah mengikuti sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu, muncul sebagai

92. *Vb* 1-2-'21/87.

93. Lihat J. Langhout, *op. cit.*, hal. 100.

94. Lihat *Koloniaal Verslag* (1910), hal 12.

95. J. Langhit, *loc. cit.*

96. J. Jongejans, *loc. cit.*

ceudekiawan-ceudekiawan yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan bahkan di antaranya ada yang menjadi sebagai pembangkit kesadaran nasional dan pembangkit perjuangan kemerdekaan,<sup>97</sup> khususnya di Aceh.

Berdirinya berbagai organisasi sosial-ekonomis dan politis, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai refleksi dari pada pergerakan nasional di daerah Aceh seperti "*Perserikatan George Hindia Belanda*" (1914), "*Syarikat Islam*" (Juli 1916). "*Syarikat Atjeh Moeda Setia*" (juli 1916), "*Syarikat Oesaha*" Nopember 1916). "*Syarikat Atjeh – Vereeniging Atjeh*" (Desember 1916), "*Wargo Dhono Moeljo*" (Pebruari 1917), "*Syarikat Matoer*" (Mei 1917). "*Boedi Oetomo*" (Januari 1918), "*Volksonderwijzersbond Atjeh*" (Desember 1918), "*Islam Menjadi Satoe*" (1919) "*Insulinde*" (Pebruari 1919), "*Tjinta Bangsa*" atau *Inl. Bureu-personeel*" (Mei 1919), "*Syarikat Cooperatie Toeloeng Menoeloeng*" (Desember 1919), "*Bajoer Oesaha*" (Meret 1920), "*Kongsi Atjeh Sumatra*" (Juli 1920),<sup>98</sup> "*Muhammadiyah*" (1927), "*Taman Siswa*" (1923), dan "*Poesa*" (1939), yang pada umumnya dikordinasi dan dipimpin oleh para ceudekiawan hasil dari pada didikan pemerintah Hindia Belanda, membuktikan adanya kesadaran nasional di antara mereka yang umumnya bertujuan untuk memperjuangkan nasib bangsanya lewat organisasi-organisasi tersebut.

Selanjutnya dalam rangka untuk mendidik kader-kader dari pada organisasi-organisasi tersebut, terutama organisasi yang bersifat politik (organisasi-organisasi pergerakan nasional), para ceudekiawan tersebut memelopori dan membantu pula berdirinya lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang non-formal, yang masing-masing bernaung di bawah induk organisasi-organisasi tersebut. Pendidikan inilah yang merupakan pendidikan pergerakan nasional, yang lembaga-lembaganya akan dibicarakan lebih lanjut dalam lain karangan ini.

Sebagaimana juga telah disebutkan pada bagian A di atas, bahwa golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan uleebalang yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Umumnya anak-anak merekalah yang diberi prioritas atau kesempatan pertama dalam pendidikan, terutama yang dapat memasuki sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan yang dapat menyambung ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi.<sup>99</sup> Bagi anak-anak biasa yang meksipun orang tua mereka mampu untuk membiayai menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah yang dimaksud, tetapi tidak diperkenankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada diskriminasi dalam penerimaan murid-murid untuk sekolah-sekolah tersebut. Maka oleh karena adanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang

97. Uraian di atas berdasarkan karya Alfian, *op. cit.*, hal. 208–209.

98. *Vb.* 1–2–'21/87. *Mitr.* 3225/20.

99. A.J. Piekaar, *op. cit.*, hal. 30

dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda ini, mendorong kelompok lain dalam masyarakat Aceh untuk membuka sekolah-sekolah sendiri atau pun berusaha memodernisasi sistem pendidikan yang telah ada yang mereka miliki.

Berkait dengan hal di atas, juga dapat dilihat bahwa dengan dimasukkannya sistem pendidikan Belanda ke Aceh, sedikit banyak telah melahirkan pula pendukung-pendukung utama dari sistem tersebut. Dan pendukung-pendukung ini dalam perkembangannya telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh.. Kehadiran kelompok ini dengan sendirinya telah mengundang kecemasan dan kecurigaan kelompok-kelompok lain yang sudah ada (yang sudah *established*), apa lagi kalau kelompok baru atau si pendatang itu menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu, yang diperkirakan akan dapat mendesak posisi yang dipunyai oleh kelompok-kelompok lain.<sup>100</sup> Oleh karenanya kehadiran kelompok baru tersebut dianggap sebagai suatu ancaman dan merupakan tantangan bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Aceh, khususnya kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional. Maka untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang tersebut terakhir berusaha untuk meng *up-grade* diri, terutama dengan memodernisasi lembaga-lembaga pendidikan mereka.

Faktor penting lain yang erat kaitannya dengan munculnya pendidikan pergerakan nasional di daerah Aceh, dapat pula dilihat dalam hubungan akibat dari modernisme Islam.<sup>101</sup> Muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi modernis Islam pada tingkat nasional di antaranya Serikat Islam, Muhammadiyah dan *Al-Irsyad* yang cabang-cabangnya juga berdiri di Aceh, telah membawa angin baru pula terhadap sistem pendidikan keagamaan di daerah Aceh. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab II bagian B di atas, bahwa sebelum berkenalan dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Aceh telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan tradisional pengaruh dari agama Islam, yang pada umumnya dikelola oleh para pemimpin agama (Ulama). Peperangan yang lama dan memayahkan dalam melawan Belanda, sangat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, terutama oleh para ulama. Oleh karena itu, selama kesibukan menghadapi peperangan tersebut, para ulama sedikit sekali berkesempatan untuk memimpin dan membina lembaga-lembaga pendidikan mereka dengan baik. Dan hal ini berakibat melemahnya sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional itu.<sup>102</sup> Selanjutnya bersamaan dengan meredanya perang melawan Belanda tersebut, pada sekitar perempatan pertama abad ke-20, berbagai macam pengaruh modernisme Islam baik yang melalui Minangkabau di mana banyak

100. Alfian, *op. cit.*, hal. 207.

101. Tentang Modernisme Islam, antara lain dapat dilihat dalam Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942*, Singapore, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

102. Alfian, *op. cit.*, hal. 311-212.

putra-putra Aceh pernah belajar pada sekolah-sekolah Agama di sana (pada tahun 1938, jumlah pelajar Aceh yang ada di Minangkabau diperkirakan mencapai 1000 orang dan kebanyakan bersekolah di *Thawalib*),<sup>103</sup> maupun melalui Timur Tengah,<sup>104</sup> dan ada pula yang melalui Pulau Pinang serta tempat-tempat lain, mulai masuk ke Aceh.<sup>105</sup> Maka mulai saat itu kelihatan adanya inisiatif dan usaha baru kaum Ulama Aceh untuk membina sistem Pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan mereka kembali, yaitu dengan pembaharuan dari sistem meunasah, rangkang dan dayah yang tradisional (lihat bab II bagian B di atas) kepada sistem madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan cara belajar baru yang berbeda dengan sistem pada lembaga-lembaga tradisional seperti tersebut diatas. Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran baru dengan ide-ide yang realistik yang berhubungan dengan kepentingan dan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang baru itu, selanjutnya memungkinkan bagi kaum Ulama di Aceh untuk tercap berperanan dominan dalam masyarakatnya serta sebagai tanda adanya perluasan horizon pemikiran mereka dalam bidang pendidikan.<sup>106</sup> Dan hal ini semua juga tidak terlepas dari keinginan mereka untuk dapat mengimbangi sistem pendidikan penjajah atau pemerintah Hindia Belanda di Aceh, yang oleh karenanya dapat dianggap pula sebagai/pendidikan pergerakan nasional yang ada di Aceh.

## 2. Kelembagaan

Kalau dalam bab II bagian A (Pendidikan Sekolah Dasar telah disebutkan bahwa lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda berupa sekolah rakyat atau sekolah desa yang pertama di Aceh didirikan pada tanggal 30 Desember 1907 di Ulee Lheue (Aceh Besar), maka lembaga pendidikan keaga-

103. H.A. Ghazali, *Biografi Prof. Teungku H. Ali Hasjmy*, (Jakarta: Socialia, 1978), hal. 9.
104. Terdapat beberapa putera Aceh yang pernah belajar di Timur Tengah, di antaranya Teungku M. Nur El-Ibrahumy tamatan Al-Azhar Cairo, yang ikut aktif memmodernisasi sistem pendidikan agama di Aceh, dan Teungku Syekh Abdu' Hamid seorang tokoh Sekirat Islam cabang Aceh yang belajar di Mekkah. Yang tersebut terakhir ini selama di Mekkah mengirim beberapa berita rahasia melalui celah-celah harian berbahasa Arab *Ummul Qura* yang terbit di Mekkah, kepada rekannya di Aceh yang isinya berupa anjuran agar mereka yang di Aceh berusaha memperbaharui sistem pendidikan Islam di Aceh; seperti yang telah terjadi di Mesir, Irak dan negeri-negeri Islam lainnya; yang menurutnya dengan jalan pembaharuan pendidikan Islam itu Aceh baru mungkin bangun kembali untuk membebaskan diri dari penjajahan. *Wawancara* tim peneliti dengan salah seorang yang menerima berita tersebut, yaitu Teungku H. Abdullah Ujong Rimba, tanggal 24 September 1980. Lihat juga dalam A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 91.
105. Alfian, *op. cit.*, hal. 213.
106. *Ibid.*, hal. 214.



maan yang disebut Madrasah yang pertama di Aceh adalah Kutaraja yang dibuka pada awal tahun 1916. Pembukaan lembaga ini adalah atas inisiatif salah seorang keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala. Dengan suratnya yang bertanggal 22 Oktober 1915 ia meminta izin kepada Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-Daerah Takluknya pada masa itu, yaitu H.N.A. Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kutaraja yang diberi nama *Madrasah Al Khairiyah*. Dan permintaan ini dikabulkan Gubernur Swart, yang disampaikan kepada Tuanku Raja Keumala melalui suratnya tanggal 16 Nopember 1915 No. 979/15, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di kampung Keudah, diizinkan mendirikan sebuah Madrasah, tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda;
- b. Mata pelajaran yang boleh diajar hanya menulis dan membaca bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab-kitab Agama Islam dengan baik, Ilmu Tauhid dan Ilmu Fiqh;
- c. Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar dan mendaftarkan murid-murid sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* tahun 1905 No. 550 dan yang ditentukan seperti syarat-syarat *Bijblad* No. 6363;
- d. Murid-murid yang datangnya dari luar Kutaraja, haruslah ada surat keterangan dari pemerintah setempat;
- e. Tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun haruslah memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja melalui komisi yang diangkat untuk itu;
- f. Untuk mengawasi Madrasah tersebut, diangkat sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Berawe sebagai Ketua, Hoofd-Jaksa dan Kepala Penghulu pada Landraad Kutaraja sebagai anggota-anggota;
- g. Kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup.<sup>107</sup>

Dengan adanya izin dari Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-Daerah Takluknya itu, maka seperti disebut di atas pada awal tahun 1916 Madrasah Al-Khairiyah tersebut dibuka dengan mengambil tempat di halaman belakang Mesjid Raya Baitur-rahman Kutaraja. Sebagai pimpinannya yang pertama ditunjuk Teungku Syekh Muhammad Saman Siron, seorang ulama yang maju pikirannya dan lama belajar di Timur Tengah (Mekkah).<sup>108</sup> Oleh karena ketatnya pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, maka pada tahun-tahun permulaan Madrasah Al-Khairiyah ini sama sekali tidak mendapat ke-

107. Surat asli Gubernur Swart ini ada pada Tuanku A. Jalil, salah seorang putera Tuanku Rajalembaga Keumala; lihat dalam A. Hasjmy, *op. cit.*, hal. 88-89.

108. Ismuka, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh," *Prasaran* dalam Seminar Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam di Aceh, (Banda Aceh Majlis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1978), hal. 12.

majuan. Baru sesudah berjalan beberapa tahun mulai tampak kemajuannya, yaitu sesudah keluarnya *Staatsblad* tahun 1925 No. 219 yang mengubah Ordonansi guru.<sup>109</sup> Kalau pada mulanya madrasah ini belum menunjukkan perubahan kurikulum yang berarti dari sistem pendidikan tradisional, selain dari cara belajar yang telah menggunakan bangku, papan tulis dan alat-alat sekolah lainnya bagi murid-muridnya, maka setelah ada perubahan (mulai tahun 1926) pada madrasah itu juga mulai diajarkan mata pelajaran umum seperti sejarah, ilmu bumi, berhitung dan lain-lain.<sup>110</sup>

Pengaruh modernisme Islam di Aceh mulai jelas kelihatan pada tahun 1926. Dalam tahun itu selain terjadi perubahan dan perkembangan pada Madrasah Al-Khairiyah seperti tersebut di atas, juga di Seulimun (Aceh Besar) mulai pula didirikan sebuah lembaga agama, yaitu *Madrasah Perguruan Islam* yang dipimpin oleh Teungku. Abdul Wahab.<sup>111</sup> Kemudian usaha pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut, diikuti pula di tempat-tempat lain di Aceh. Selanjutnya pada tahun 1927 sebuah lembaga pengajian di Lhok Seumawe (Aceh Utara) yang bernama *Jamiah Al-Islam Wal Irsyad Al-Arabia* (suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan/pengajian) yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim A-Kalaly,<sup>112</sup> membuka sebuah madrasah bernama *Al-Irsyad*, sebagai cabang Al-Irsyad Surabaya. Sebagai pimpinan madrasah ditunjuk Teungku Muhammad Hasbi Ash Schiddieq yang sebelumnya telah menamatkan pendidikannya pada madrasah Al-Irsyad bagian 'Aliah (menengah atas) di Surabaya.<sup>113</sup> Hampir bersamaan dengan waktu pendirian Madrasah Al-Irsyad itu, di Idi (Aceh Timur) didirikan pula sebuah *Madrasah Ahlussunnah Wal Jamaah* yang dipimpin oleh Said Husein. Kemudian madrasah ini diubah menjadi *Madrasah Nahdatul Islam* yang disingkat MADNI.<sup>114</sup>

Pada tanggal 21 Jumadil-Akhir 1348 Hijrah, bertepatan dengan 14 Nopember 1929 di Matang Glumpang Dua (Aceh Utara) berdiri sebuah organisasi yang dinamakan *Al-Muslim*. Ketua organisasi ini ialah dijabat oleh salah seorang ulama terkenal di daerah itu, yaitu Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap, yang ikut dibantu oleh Uleebalang setempat T. Chiek Peusangan. Tujuan dari pada organisasi ini disebutkan untuk mendirikan sebanyak mungkin madrasah dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan agama di kenegerian Peusangan khususnya dan di Aceh Utara pada umumnya. Realisasi dari pada tujuan organisasi ini baru nampak pada tanggal 13 April 1930, yaitu dengan diresmikan berdirinya *Madrasah Al-Muslim* Peusangan. Oleh

---

109. *Ibid.*

110. A. Hasjmy, *op. cit.*, hal. 90.

111. Alfian, *op. cit.*, hal. 218.

112. *Mailr.* No. 143 *geh.*/29, hal. 4

113. Lihat Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara, 1980), hal 335.

114. Ismuka, *op. cit.*, hal. 13.

karena banyaknya calon pelajar yang mendaftar, maka pada mulanya dibuka sekaligus dua buah kelas yang paralel pada madrasah itu. Dan sebagai guru kepadanya yang pertama diangkat seorang tokoh masyarakat di daerah itu yang bernama Habib Mahmud serta Teungku H.M. Ridwan sebagai guru bantu.<sup>115</sup>

Tidak lama sesudah dibukanya Madrasah Al-Muslim Peusangan, berdiri pula cabang-cabangnya yang hampir merata di seluruh mukim dalam kenegerian Peusangan, seperti Seutai, Jangka, Bugak, Kreueng Baro, Uteuen Gathom, dan Leueng Leubu.<sup>116</sup>

Oleh karena Madrasah Al-Muslimi belum memiliki suatu gedung pusat yang permanen, maka dalam rangka pendirian gedung tersebut dan memilih yang menarik, pengurus lembaga itu telah mengutus dua orang peninjau ke Sumatra Barat guna melihat bagaimana bentuk gedung-gedung madrasah yang sudah lebih dahulu terdapat di sana. Mereka ialah Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap dan Teungku Umar Gampong Raya. Sebagai penunjuk jalan diajak pula seorang ulama asal Sumatra Barat, yaitu Ustaz Mustafa Salim, yang juga telah membuka *Madrasah Islamiyah* di Bireum.<sup>117</sup>

Pada Madrasah Al-Muslim Peusangan, selain telah diubah sistem belajar dari cara yang tradisional (lihat bab II bagian B di atas) ke cara madrasah, juga dengan berangsur-angsur mulai memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya, meskipun masih diajarkan dalam bahasa Arab seperti juga mata pelajaran Agama. Hal ini sangat membantu para pelajar untuk dapat berbahasa Arab dengan baik, meskipun untuk memahami materinya agak lambat bila dibandingkan dengan diberikan dalam bahasa Melayu. Oleh karena semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, maka banyak orang yang mengira bahwa pada madrasah itu tidak diajarkan pengetahuan umum, dan nama-nama mata pelajaran umum itu juga disebutkan dalam bahasa Arab seperti berhitung disebut *ilmu hisab*, ilmu bumi disebut *jugrafi*, kesehatan disebut *ilmu's Shihhah*, logika disebut *manthiq*, olah raga disebut *'ilmu'r-riadhah*, ilmu jiwa disebut *ilmu'nafs* dan sebagainya.<sup>118</sup> Selain berbagai macam ilmu, dimadrasah ini juga melatih para pelajarnya untuk berpidato dan keaktifan dalam kepanduan yang diberi nama *Kasshafatu'l-Muslim*.<sup>119</sup>

Oleh karena Madrasah Al-Muslim ini dapat mencapai kemajuan dan perkembangan pesat yang mempunyai cabang-cabang di beberapa tempat di Aceh serta negeri Peusangan sendiri dan dalam perkembangannya telah banyak menelorkan para ulama modernis yang berperan dominan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di Aceh, maka Madrasah Al-Muslim ini dapat disebutkan sebagai salah sebuah madrasah yang ternama di Aceh.

---

115. *Ibid.*, hal. 15

116. *Ibid.*

117. *Ibid.*, hal. 16.

118. *Ibid.*

119. *Ibid.*

Pada tahun 1929 di Blang Paseh (Pidie), lahir suatu perkumpulan keagamaan yang bernama Jamiatuddiniyah,<sup>120</sup> yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Tujuan dari pada perkumpulan ini adalah untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama *Madrasah Saadah Adabiyah*. Setahun kemudian (tahun 1930) tujuan dari pada perkumpulan ini mulai terwujud, yaitu dengan didirikannya Madrasah tersebut di Blang Paseh (Peukan Pidie). Sebagai pimpinan Madrasah ialah ketua perkumpulan itu sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh.<sup>121</sup> Usaha pendirian madrasah ini ikut disokong oleh uleebalang setempat (Uleebalang Pineung) yang bernama T. Bintara Pineung. Salah seorang dari pada tenaga teras sebagai staf pengajar yang mula-mula sekali adalah Teungku H. Abdullah Ujong Rimba (lihat *foot note* No. 104 di atas). Dengan dibukanya Madrasah Saadah Adabiyah ini maka seperti juga Madrasah Al-Muslim Peusangan, banyak pelajar-pelajar dari seluruh Aceh yang mengunjungi madrasah ini, sehingga nama Blang Paseh menjadi terkenal di Aceh pada masa itu. Di antara Amelz yang kemudian melanjutkan studinya lagi ke Sumatra Barat, Teungku Usman Yahya Tiba dan Zaini Bakri yang selanjutnya melanjutkan pelajarannya ke *Normaal Islam Institut* di Bireun.<sup>122</sup>

Sebagaimana juga Madrasah Al-Muslim Peusangan yang mempunyai banyak cabangnya di Aceh (dapat disebutkan bahwa di Aceh Barat dahulu termasuk Aceh Selatan sekarang, banyak terdapat madrasah yang namanya *Al-muslim*, dan diperkirakan pendirian madrasah tersebut dipelopori oleh para alumni Madrasah Al-Muslim Peusangan, maka Jamiyatuddiniyah Blang Paseh juga mempunyai cabang-cabang yang banyak di seluruh Aceh. Oleh karenanya perguruan ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Aceh pada waktu itu.<sup>123</sup>

Pada tahun tiga puluhan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh.<sup>124</sup> Di Antara madrasah yang terkenal di luar daerahnya yang didirikan pada periode itu yang dapat disebutkan di sini yaitu *Jamiah Diniyah Almuntasiyah* yang lebih dikenal dengan nama singkatan JADAM Montasik. Madrasah ini didirikan pada tahun 1931, oleh Teungku Ibrahim Lamnga. Selanjutnya *Madrasah Darul Huda* di Bambi, *Madrasah Bustanul Maarif* di Blang Jrum, *Madrasah Al-Ikhlash* di Kude Dua, *Madrasah Ishlah* di Kuta Blang Samalanga, *Madrasah Darul 'Uhum* di Geurugo' (Aceh Utara) yang dibangun atas inisiatif uleebalang daerah itu, yaitu T. Bin Geurugo.<sup>125</sup>

120. Ismail Suny (ed.), *op. cit.*, hal 341.

121. Alfian, *loc. cit.*

122. Ismuha, *op. cit.*, hal. 17.

123. Ismail Suny, *op. cit.*, hal. 342.

124. *Ibid.*

125. Ismail Sunny (ed.), *loc. cit.*

Mengenal jumlah madrasah yang pasti yang terdapat di seluruh Aceh hingga akhir tahun tiga puluhan, tim peneliti belum memperoleh suatu angka yang kongkrit. Tetapi berdasarkan catatan yang dikumpulkan. Oleh pengurus *Jami'iyah Al Islahiyah* Sungai Limpah Sibreh (Aceh Besar), dapat disebutkan bahwa madrasah-madrasah yang terdapat di Aceh dalam tahun 1936 adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Islahiyah, Leubuk (Aceh Besar).
2. Madrasah Diniyah, Bung Cala (Aceh Besar).
3. Madrasah Diniyah, Meruk (Aceh Besar).
4. Madrasah Diniyah, Ulee Kareng (Aceh Besar).
5. Madrasah Darussalam, merduati (Kutaraja).
6. Madrasah Taman Perguruan, Neusuh (Kutaraja).
7. Madrasah Taman Perguruan, Pungee (Kutaraja).
8. Madrasah Diniyah, Lampeuneurut (Aceh Besar).
9. Madrasah Diniyah, Lam Teungoh (Aceh Besar).
10. Madrasah Diniyah, Lam Lhom (Aceh Besar).
11. Madrasah Diniyah, Kulu (Aceh Besar).
12. Madrasah Diniyah, Blang Me (Aceh Besar).
13. Madrasah Jadam. Montasik (Aceh Besar).
14. Madrasah Ishlahiyah, Sungai Limpah (Aceh Besar).
15. Madrasah Hasbiyah, Indrapuri (Aceh Besar).
16. Madrasah Tadrijiyah, Lam Jampok (Aceh Besar).
17. Madrasah Al-Muslimin, Lam Sie (Aceh Besar).
18. Madrasah Perguruan Islam, Keunalau Seulimun (Aceh Besar)
19. Madrasah Al-Muslimin, Lam Tamot (Aceh Besar).
20. Madrasah Hasbiyah, heu (Aceh Besar).
21. Madrasah Ishlahiyah, Krueng Raya (Aceh Besar).
22. Madrasah Falahiyah, Pieuyeung (Aceh Besar).
23. Madrasah Al-Muslimin, Tibang Phui (Aceh Besar).
24. Madrasah Al-Muslimin, Hoho (Aceh Besar).
25. Madrasah Al-Muslimin, Cot Saloran (Aceh Besar).
26. Madrasah Ishaliyah, Lam Birah (Aceh Besar).
27. Madrasah Al-Muslimin, Jeureula (Aceh Besar).
28. Madrasah Seupakat, Bukloh (Aceh Besar).
29. Madrasah Ishlahiyah, Meunasah Keumude (Aceh Besar).
30. Madrasah Al-Muslimin, Lam Panah (Aceh Besar).
31. Madrasah Al-Muslimin, Lam Teuba (Aceh Besar).
32. Madrasah Al-Muslimin, Padang Tiji (Pidie).
33. Madrasah Al-Muslim, Peudaya (Aceh Besar).
34. Madrasah Al-Muslim, Kunyet (Pidie).
35. Madrasah Al-Muslim, Tanjong (Pidie).
36. Madrasah Al-Muslim, Beurabo (Pidie).
37. Madrasah Al-Muslimi, Neucah (Pidie).

38. Madrasah Al-Muslim, Gogo (Pidie).
39. Madrasah Al Ummahat, Montasik (Aceh Besar).
40. Madrasah Diniyah, Blang Paseh Sigli (Pidie).
41. Madrasah Darul Huda, Bambi (Pidie).
42. Madrasah Khairiyah, Blang Anore (Pidie)
43. Madrasah Darul Ma'arif, Garot (Pidie).
44. Madrasah Persatuan Islam, Peukan Pidie (Pidie).
45. Madrasah Diniyah, Teupin Raya (Pidie).
46. Madrasah Persatuan Islam, Sangeue (Pidie).
47. Madrasah Wathaniyah, Ie Leubeu (Pidie).
48. Madrasah Wathaniyah, Ie Leubeu (Pide).  
Madrasah Khairiyah, Paru (Pidie).
49. Madrasah Islam Sejati, Kota Bakti (Pidie).
50. Madrasah Diniyah, Teubung (pidie).
51. Madrasah Diniyah Tangse (Pidie).
52. Madrasah Diniyah, Geupang (Pidie).
53. Madrasah Diniyah, Kampung Pukat Meureudu (Pidie).
54. Madrasah Perguruan Tajungan, Bireun (Aceh Utara).
55. Madrasah Perguruan Kuta Blang (Aceh Utara).
56. Madrasah mesjid Keule. Cot Meurak (Aceh Utara).
57. Madrasah Al-Muslim, Cot Meurak (Aceh Utara).
58. Madrasah Al-Muslim, Matang Glumpang Dua (Aceh Utara).
59. Madrasah Diniyah, Geurugo' (Aceh Utara).
60. Madrasah Darul Ulum, Bale Seuntai Peusangan (Aceh) Utara).
61. Madrasah Khairiyah, Takengon (Aceh Tengah).
62. Madrasah Khairiyah, Teritet (Aceh Tengah).
63. Madrasah Diniyah, Idi Rayeuk (Aceh Timur).
64. Madrasah Diniyah, Blang Sekoci (Aceh Timur).
65. Madrasah Diniyah, Simpang Ulim (Aceh Timur).
66. Madrasah Diniyah, Madat (Aceh Timur).
67. Madrasah Madaniyah, Idi (Aceh Timur).
68. Madrasah Diniyah, Pampung Jawa Langsa (Aceh Timur).
69. Madrasah Jadam, Calang (Aceh Barat).
70. Madrasah Jadam, Krueng Sabe (Aceh Barat).
71. Madrasah Jadam, Lageuen (Aceh Barat).
72. Madrasah Islamiyah, Keutapang (Aceh Barat).
73. Madrasah Khairiyah, Lhok Kruet (Aceh Barat).
74. Madrasah Hadaniyah, Patek (Aceh Barat).
75. Madrasah Diniyah, Lam No. (Aceh Barat).
76. Madrasah Al-Muslim, Teumon (Aceh Barat).
77. Madrasah Washliyah, Meulaboh (Aceh Barat).
78. Madrasah Perguruan Muda, Lhok bubon (Aceh Barat).
79. Madrasah Diniyah, Jeuram (Aceh Barat).

80. Madrasah Diniyah, Peureume (Aceh Barat).
81. Madrasah Al-Muslim, Sinabang (Aceh Barat).
82. Madrasah Diniyah, Alur Bilie (Aceh Barat).
83. Madrasah Diniyah, Lama Inong (Aceh Selatan).
84. Madrasah Diniyah, Kampung Rawa (Aceh Selatan).
85. Madrasah Al-Muslim, Susoh (Aceh Selatan).
86. Madrasah Perguruan Muda, Kuta Buloh (Aceh Selatan).
87. Madrasah Tadris, Labuhan Haji (Aceh Selatan).
88. Madrasah Al-Muslim, Sawah (Aceh Selatan).
89. Madrasah Al-Muslim, Lhok Bangkuang (Aceh Selatan).
90. Madrasah Diniyah, Tapak Tuan (Aceh Selatan).
91. Madrasah Al-Muslim, Terbangsan (Aceh Selatan).<sup>126</sup>

Diakui pengurus *Jami'iyah Al Islamiyah* tersebut bahwa catatan yang mereka kumpulkan itu masih belum lengkap, masih terdapat daerah-daerah yang data-data tentang itu belum terkumpul, misalnya *Madrasah Al-Huda* Geudong, *Madrasah Al-Ikhlâs* Keude Dua, yang terletak di daerah *onderafdeeling Lhok Seumawe* dan sekitarnya,<sup>127</sup> serta juga *Madrasah Islamiyah* yang masing-masing terdapat di Meukek dan Manggeng (Aceh Selatan); *Madrasah Khairul Islamiyah* dan *Jamiatul Khairiyah* di eilayah Tamiyang (Aceh Timur) yang masing-masing didirikan oleh Mohd. Syai dan O.K. Dahlan. Selain itu juga *Madrasah Akbariyah* di Ujong Kalak Meulaboh (Aceh Barat) yang dipimpin oleh Teungku Nyak Cut; dan *Madrasah Al-wasliyah* di Tanggeng Meulaboh, yang dipimpin oleh Toke Pirus dan Teungku Arsyad Thalib Lubis.

Dapat pula disebutkan bahwa pada tahun 1938, di Sigli berdiri sebuah sekolah menengah Islam yang para pelajarnya tidak hanya diterima dari lulusan madrasah, tetapi juga diterima dari lulusan sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda seperti H.I.S., *Inlandsche School* dan *Vervolgschool*. Lembaga ini diberi nama *Dunia Akhirat Middelbare School* disingkat DAMS. Sistem pengajaran di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan *Onderbouw* yang masa belajarnya 2 tahun. bagian kedua bernama *Bovenbouw* yang lama belajarnya 4 tahun. Pada bagian *onderbouw* dibagi lagi menjadi dua, yaitu A terdiri dari pelajar yang berasal dari sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda seperti tersebut di atas, dan bagian B terdiri dari pelajar yang berasal dari madrasah-madrasah. Pada bagian *bovenbouw* kesemua para pelajar ini dicampur menjadi satu, karena pengetahuan mereka dianggap sudah berimbang. Pendirian DAMS ini dipelopori oleh T. Pakeh Mahmud (Uleebalang Pidie) dan T.M. Amin. Dapat ditambahkan bahwa dua orang tenaga pengajar pada sekolah ini didatangkan dari luar daerah, yang seorang berasal dari Sumatra Barat, yaitu Isin Saleh (alumni Darul Ulum Mesir) dan yang seorang lagi dari Yogyakarta, yaitu Kusmani (Alumni H.I.K. Yogyakarta).

126. Lihat buku *Verslag Pertemuan Oelama-Oelama* (Sungai Limpah: Jam'iyah Al Ishlahiyah, Oktober 1936), hal. 12.

127. A. Hasjmy, *op. cit.*, hal. 99.

ta). Di sekolah mereka mengajar pengetahuan umum, bahasa Belanda dan bahasa Inggris.<sup>128</sup>

Selain madrasah-madrasah yang telah disebutkan di atas, hingga awal tahun empat puluhan pertambahan jumlah madrasah di Aceh terus meningkat. Di antaranya dapat disebutkan *Ma'had Imaul Muchlis* disingkat MIM; dan untuk nama ini kemudian ada juga yang menamakan *Ma'had Iskandar Muda* yang disingkat pula dengan MIM, namun nama yang populer digunakan untuk menyebut madrasah ini adalah MIM Lampaku. Didirikan di desa Lampaku wilayah *sagi XXII mukim* (Aceh Besar), pada tanggal 1 Januari 1940.<sup>129</sup> Tujuan daripada pendirian madrasah ini adalah selain untuk menggalakkan pendidikan agama di Aceh, juga untuk mendidik guru-guru sekolah agama untuk wilayah Sagi XXII Mukim, khususnya dan daerah Aceh umumnya yang dirasakan sangat kekurangan akan tenaga itu. Patut dicatat di sini bahwa yang mengambil inisiatif pendirian lembaga ini adalah uleebalang di daerah itu sendiri atau Kepala Sagi XXII Mukim, T. Muhammad Daud Panglima Polem,<sup>130</sup> bersama puteranya T. Muhammad Ali, Pimpinan dari pada madrasah ini khusus didatangkan dari Sumatra Barat (Minangkabau), yaitu Ustaz H. Ilyas Muhammad Ali-Azhari. Selain sebagai pimpinan (direktur) Ustaz ini juga memberi pelajaran tentang bahasa Arab, ilmu mendidik, tauhid dan sejarah Islam pada madrasah tersebut. Tenaga-tenaga pengajar lainnya dapat pula disebutkan di antaranya Teungku H. Hasbi Ash Shiddieqy yang mengajar tafsir hadist, fiqih dan balaghah; Mr. S.m. Amin yang mengajar *Staatsrecht* (hukum tata-negara); Soetikno Padmosoemarto yang mengajar sejarah dan tata hukum; Zainal Abidin yang mengajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda, ilmu bumi dan seni suara; dan Zainal Arifin yang mengajar *boekhouding* (memegang buku) dan olah raga.<sup>131</sup>

Dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modernis dalam bentuk madrasah-madrasah seperti telah diutarakan di atas, dalam perkembangannya telah melahirkan pula suatu kelompok ulama yang modernis. Oleh karenanya telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperanan aktif dalam masyarakatnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat. Dan karenanya posisi mereka menjadi kuat kembali dalam masyarakat Aceh.<sup>132</sup> Untuk mempertahankan kedudukan ini serta memperkuat integritas dan solidaritas antar ulama ini, maka pada tanggal 5 Mei 1939 mereka mendirikan suatu organisasi yang dise-

---

128. Ismuha, *op. cit.*, hal. 18–21.

129. Lihat Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hal 177.

130. Alfian, *op. cit.*, hal. 214.

131. Ismuha, *op. cit.*, hal. 31.

132. Lihat Alfian, *loc. cit.*



but POESA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).<sup>133</sup> Tidak lama sesudah berdiri, Pesa masuk ke dalam MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia) dan dengan demikian para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya aktif pula melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia.

Selain dengan tujuan untuk memperkuat integritas dan solidaritas, organisasi Poesa juga bergerak dalam bidang sosial, politik dan memajukan sistem pendidikan agama di Aceh. Salah satu usaha dalam bidang pendidikan ini adalah pendirian sebuah sekolah *Normaal Islam Isntitut* atau *Ma'had Al-Mu'alimin* di Bireun (Aceh Utara) pada tanggal 27 Desember 1939, dalam rangka menyediakan guru-guru bagi madrasah-madrasah di Aceh. Dan dengan sekolah ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan sistem pengajaran agama pada madrasah-madrasah di seluruh Aceh.<sup>134</sup> Untuk ini sistem pengajarannya dipedomani dari yang diberikan pada *Normaal Islam* PGAI (Padang, Sumatra Barat) dan lama masa belajarnya juga disamakan, yaitu 4 tahun.<sup>135</sup> Perlu dicatat di sini bahwa tenaga pengajar teras pada sekolah ini adalah Teungku M. Nur El-Ibrahimi, tamatan Al-Azhar Cairo, yang bertindak sebagai direktur dan guru dalam ilmu-ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pendidikan; serta Mr. Muhammad, tamatan Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta, yang mengajar mata pelajaran umum, bahasa Belanda dan bahasa Inggris.<sup>136</sup>

Muhammadiyah mulai masuk ke Aceh (Kutaraja) pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah Cabang Betawi S. Djaja Soekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada *Atjeh Tram*. Dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yaitu A.R. Sultan Mansur, maka pada tahun 1927 organisasi Muhammadiyah cabang Kutaraja berdiri resmi; yang menjadi pimpinan pertama adalah R.O. Armadinata seorang dokter gigi di Kutaraja.<sup>137</sup> Dalam perkembangannya organisasi ini mempunyai cabang-cabang pula di beberapa kota di Aceh. Menurut memori serah terima jabatan Gubernur A.H. Phipips (yang memegang jabatan Gubernur di Aceh sejak tanggal 30 Mei 1929 hingga 31 Mei 1932), pada tahun 1932 terdapat tujuh buah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh, yaitu di Kutaraja, Sigli, Bireu, Takengon. Lhok Seumawe, Langsa dan Kuala Simpang,

---

133. Tentang kelahiran dan perkembangan organisasi Poesa ini dapat misalnya dalam A.J. Piekaar, *op.cit.*, hal. 18–22. Dan dalam Muhammad Ibrahim (Ketua), *op.cit.*, hal. 124–128.

134. Mahmud Junus, *op. cit.*, hal. 179.

135. *Ibid.*

136. Lihat Ismuha, "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, 30 tahun yang lalu," *Sinar Darussalam* No. 14 dan 15, (Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969), hal. 43–47 dan hal. 33–40.

137. *Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh ke 26*, tahun 1962, hal. 60–61.

serta dua buah cabang kecil yaitu di Sabang dan Paya Bedi yang masing-masing berada di bawah cabang Kutaraja dan cabang Kuala Simpang.<sup>138</sup>

Pada tanggal 9 Juli 1928, Muhammadiyah cabang Kutaraja berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu sebuah H.I.S. (*Hollandsch Inlandsch School*) Muhammadiyah, Pendirian lembaga ini dipelopori di antaranya oleh seorang uleebalang, yaitu T. Muhammad Glumpang Payong, Kamarusyid, Abdul Karim Mukti dan Idham. Pada mula didirikan H.I.S. ini mempunyai tiga orang guru, yaitu Syamsuddin berasal dari Sumatra Barat (Minangkabau), Sadi Tarkhoran berasal dari Tapanuli (yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah) dan Ridwan Hajir berasal dari Yogyakarta, sedang jumlah murid lebih dari 90 orang, dengan sekitar 27% terdiri dari anak-anak suku Aceh.<sup>139</sup> Selain itu Muhammadiyah cabang Kuala Simpang (Aceh Timur) pada tanggal 7 Oktober 1928, juga berhasil mendirikan sebuah sekolah *Diniyah* dan *Yuniah* dengan jumlah murid masing-masing pada mulanya 92 dan 134 orang.<sup>140</sup> Selanjutnya pada masa akhir jabatan gubernur A.H. Philips, di Aceh sudah terdapat empat buah H.I.S. Muhammadiyah, yang masing-masing berlokasi di Kutaraja, di Sigli, Kuala Simpang dan Lhok Seumawe. Yang tersebut terakhir (H.I.S. Lhok Seumawe) karena kurang peminat terpaksa ditutupi buat sementara.<sup>141</sup> Tetapi dalam bulan April 1929 oleh Muhammadiyah cabang Lhok Seumawe sudah berhasil mendirikan sebuah kepanduan yang beranggotakan 37 orang pemuda dan 20 orang anak-anak.<sup>142</sup> Dalam tahun 1936 di Kutaraja juga dibuka sebuah lembaga yaitu yang disebut *Leergang Muhammadiyah* (Sekolah Kursus Muhammadiyah) yang kemudian diubah namanya menjadi *Darul Mu'allimin Al Muhammadiyah*, dengan direktornya Teungku H. Ismail Yakub.<sup>143</sup>

Menurut catatan bekas Residen Aceh J. Jongejans (5 Maret 1936–September 1938), pada akhir tahun 1938 di seluruh Aceh terdapat tujuh buah H.I.S. swasta, dengan kurikulum serupa dengan H.I.S. milik pemerintah kecuali ditambah dengan mata pelajaran Agama. Dan ke tujuh sekolah ini dibiayai oleh perkumpulan Muhammadiyah.<sup>144</sup> Hingga menjelang Perang Dunia II jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat di seluruh Aceh di antaranya dapat disebutkan tujuh buah H.I.S., yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Kuala Simpang, Meulaboh dan Tapak Tuan; satu MULO dan satu Darul Mu'allimin yang keduanya berlokasi di Kutaraja; satu Taman Kanak-Kanak (*Bustanul Atfal*) yang didirikan atas

138. Memori van overgave De Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, A.H. Philips, hal. 27. *Mailr.* 1624/32.

139. *Mailr.* No. 130 geh./29, hal.1.

140. *Ibid.*, hal. 5.

141. Memorie van overgave van A.H. Philips, *loc. cit.*

142. *Kolonial Verslag (Verslag van Bestuur En Staat van Nederlandsch-Indie, Suriname En Cura Cao)*, 1930, hal. 9.

143. Lihat Islamil Suny, *op. cit.*, 1930, hal. 352.

144. J. Jongejans, *op. cit.*, hal. 261.

inisiatif Ibu Sakdiah di Kutaraja; serta 10 buah Diniyah yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Takengon, Kuala Simpang, Calang, Idi, Meureudu dan Bireun.<sup>145</sup>

Perguruan Nasional Taman Siswa mulai didirikan di Aceh (Kutaraja) pada bulan Juli 1932. Sebelum perguruan ini didirikan terlebih dahulu telah dibentuk sebuah panitia untuk itu, yang komposisinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang bertempat tinggal di Kutaraja pada waktu itu; yaitu sebagai Ketua Panitia: T. Hasan Glumpang Payong; Wakil Ketua: T. Nyak Arief Sekretaris: Pohan; Anggota: 1. A. Azis (asal Minangkabau), 2. Paman Ras Martin (asal Ambon), dan lain-lain. Pada akhir Juli 1932 Perguruan Taman siswa ini juga dibuka di Sabang yang diprakarsai oleh dr. Latumeten (berasal dari Ambon) yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa di Sabang. Dan Pembukaan ini ikut dibantu secara langsung oleh *Zelfbestuurder* (uleebalang) setempat yang bernama T. Abbas. Selanjutnya pada tahun 1934, di Meulaboh (Aceh Barat) dibuka pula perguruan serupa yang juga disponsori oleh uleebalang setempat, yaitu T. Abdurrahman dan T. Muhammad Yusuf; sekolah ini dipimpin oleh Usman Abdullah dan Suwarno yang berasal dari Pulau Jawa. Tempat lainnya yang juga terdapat Perguruan Taman Siswa di Aceh adalah di Jeunib (Aceh Utara) yang juga ikut didukung oleh uleebalang setempat, yaitu T. Ahmad.<sup>146</sup>

Dari beberapa keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa kebanyakan mereka yang mendukung berdirinya Persatuan Taman Siswa di Aceh adalah para uleebalang. Yaitu umumnya mereka yang telah diberi kesempatan pertama oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menikmati sistem pendidikan mereka dan yang dikehendaki agar terpisah dari masyarakatnya. Jadi hal ini sesuai seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa tidak semua dari mereka yang telah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu berhasil dirangkul oleh Belanda, bahkan terdapat di antara mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh pembangkit kesadaran nasional di Aceh. Seperti disebutkan oleh R. Soetikno Padmo Soemarto (salah seorang tokoh Taman Siswa terkenal di Aceh) bahwa Perguruan Taman Siswa didirikan di Aceh adalah atas permintaan dari masyarakat Aceh sendiri, terutama para pemimpinnya yang terdiri dari uleebalang-uleebalang. Pada umumnya merekalah yang menjadi sponsor untuk membangun lembaga pendidikan nasional di Aceh.<sup>147</sup> Dan dalam realisasinya tidak diwujudkan oleh para uleebalang saja, tetapi juga ikut serta semua unsur yang mempunyai cita-cita nasional.

---

145. Djamaluddin Abdullah, *Pergerakan Muhammdiyah di Atjeh*, Thesis Sarjana Keguruan Universitas Syiah Kuala yang belum diterbitkan, hal 38-39.

146. Nasruddin Sulaiman, *Perguruan Taman Siswa di Aceh*, Thesis Sarjana Keguruan Universitas Syiah Kuala yang belum diterbitkan, 1976, hal. 48-50.

147. *Ibid.*

Setelah perguruan ini didirikan, untuk pengembangan dan pengasuhnya juga didatangkan tenaga-tenaga guru yang berasal dari luar Aceh, baik yang dari Jawa maupun yang dari daerah lain terdekat seperti dari Medan. Dalam bidang kurikulum, Perguruan Taman Siswa di Aceh secara umum mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur (Pengurus Besar) Taman Siswa yang berkedudukan di Yogyakarta. Tetapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat Taman Siswa yang di Aceh ini mengambil kebijaksanaan sendiri sesuai dengan situasi setempat. Yaitu pada perguruan ini selain diberikan mata pelajaran umum, juga diberikan mata pelajaran agama. Dan untuk ini harus didatangkan guru-guru dari sekolah-sekolah agama, yang sebaliknya guru-guru dari Taman Siswa sendiri juga menyumbangkan tenaga mereka pada sekolah-sekolah agama. Jadi terdapat saling kerjasama antara Perguruan Taman Siswa ini dengan sekolah-sekolah agama, khususnya dengan madrasah-madrasah. Dalam segi pembiayaan, lembaga ini mendasarkan pada kekuatan sendiri, tanpa ketergantungan kepada bantuan pemerintah Hindia Belanda. Dan biaya-biaya ini diperoleh dari pada anggotanya sendiri, sesuai dengan sikap hidup yang dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa secara keseluruhan.

Perlu pula diutarakan di sini bahwa pada tahun 1929 di Kenegerian Peureulak (Aceh Timur), berdiri suatu perkumpulan yang diberi nama *Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak* yang disingkat PUSAKA. Di bawah perkumpulan ini didirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda. Adapun perguruannya adalah sebagai berikut. Pelindung: T. Chiek Muhammad Thayeb (ulebalang setempat) yang juga sebagai aktifis dan anggota N.I.P. (*Nasional Indische Partij*), Penasehat: T. Tjut Ahmad, Ketua: T.M. Nurdin, Sekretaris: H.M. Zainuddin, Bendahara: H. Hasyim, serta Komisariskomisarisnya: T.M. Hasan, T. Itam. T. Sabi dan Muhammad Syam.<sup>148</sup>

*Sumatra Thawalib* yang mendapat pengaruh langsung dari Perguruan Thawalib di Sumatra Barat juga terdapat di Aceh, tetapi hanya terbatas di Aceh Selatan dan Aceh Barat (dahulu kedua daerah ini disebut *Westkust van Atjeh*) yaitu di kota Tapak Tuan, Labuhan Haji dan Meulaboh. Sebagai tokoh terkenal yang memasukkan pertama kali perguruan ini ke Aceh Selatan adalah H. Jalaluddin Thaib, yang juga terkenal sebagai Ketua Umum Partai Politik PERMI (Partai Muslimin Indonesia). Oleh karena keaktifannya dalam bidang politik, maka H. Jalaluddin Thaib kemudian dibuang ke *Boven Digul* Irian Jaya) oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>149</sup> Mula berdirinya Sumatra Thawalib di Tapak Tuan dan labuhan Haji adalah pada perempatan pertama abad ke-20. Adapun guru-gurunya yang mengajar di Sumatra Thawalib ini umumnya berasal dari Sumatra Barat. Di antaranya adalah Teungku Lebai Usman, Teungku

---

148. H.M. Zainuddin, *Bungong Rampoe*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965), hal. 127-9.

149. Ismail Suny, *op. cit.*, hal. 335.

Ramaya, Teungku H. Jalaluddin Thaib (yang kemudian dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda seperti tersebut di atas), Teungku Muhammad Saleh Al Anif, H. Muhammad Jamil, Teungku Muhammad Isa dan Teungku A Murad Sutan Makmur.

Kesemuanya perguruan Sumatera Thawalib yang terdapat di Aceh Barat/Selatan adalah tingkat *Ibtidaiyah*. Yang menjadi pimpinan pengurus Sumatera Thawalib di Tapak Tuan (ibukota Aceh Selatan) adalah H. Bustaman dan H. Abdullah, keduanya sebagai pengusaha di kota itu. Pada sekolah ini juga menganut sistem klasikal. Di antara kitab-kitab yang diajarkan pada perguruan ini juga termasuk kitab karangan Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Sementara di Meulaboh, Sumatera Thawalib didirikan pada tahun 1930-an. Pendiri dan guru-gurunya kebanyakan juga berasal dari Sumatera Barat (Padang), di antaranya dapat disebutkan Mohd. Syukur, H. Habib dan Sidi Kha-tib. Oleh karena Sumatera Thawalib dianggap menjurus kepada kegiatan politik, maka perguruan ini selalu mendapat pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda yang dalam hal ini dilakukan oleh Kontrolur setempat.<sup>150</sup>

### 3. Tokoh-tokoh dan Pemikirannya

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa langkah untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam yang merupakan bahagian dari pada pendidikan Pergerakan Nasional di Aceh, dipelopori oleh Tuanku Raja, Keumala, salah seorang Keluarga keturunan Sultan Aceh.<sup>151</sup> Dengan suratnya bertanggal 22 Oktober 1915, Tuanku Raja Keumala meminta kepada penguasa pemerintah Hindia Belanda di Aceh, agar di Kutaraja diizinkan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama moderen yang disebut madrasah. Meskipun disertai dengan beberapa syarat, pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Dan pada tahun 1916 madrasah dimaksud, berhasil didirikan dengan diberi nama *Madrasah Khairiyah*. Oleh karenanya dapat disebut di sini bahwa Tuanku Raja Keumala adalah dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh yang mempunyai andil dalam memperbaharui sistem pendidikan Islam di Aceh.

Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan munculnya pendidikan Pergerakan Nasional di daerah Aceh, dapat dilihat dalam hubungan dengan berbagai peremputan pertama abad ke-20. Di antaranya adalah pengaruh yang datang dari Timur Tengah, terutama dari mereka (putera-putera Aceh) yang pernah mengenyam pendidikan dan berdiam di sana. Salah seorang di antaranya adalah Teungku. Syekh Abdul Hamid (lihat foot noot no. 104 di atas). Untuk mengetahui bagaimana peranan dari pada Teungku Syekh Abdul Hamid dalam kaitan dengan modernisasi pendidikan Islam di Aceh, Ismuha da-

150. Memorie van overgave van A.H, Philips, *op. cit.*, hal. 29.

151. A. Hasjmy, *op. cit.*, hal. 88.

lam karyanya "Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh"<sup>152</sup> antara lain menulis sebagai berikut:

*Kira-kira dalam tahun 1920, SI (Serikat Islam) melebarkan sayapnya ke Aceh. Di antara pemimpin-pemimpin SI di Aceh ialah Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga yang lebih terkenal dengan panggilan Ayah Hamid, di samping Teungku Bujang Krueng Geukeuh dan Teuku Chiek Muhammad Said Cunda. Pada tahun 1926, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin S.I. di seluruh Indonesia. Di antara yang tertangkap di Aceh ialah Teuku Bujang dan Teuku Muhammad Said dan dibuang ke Digul. Adapun Ayah Hamid, dapat melarikan diri ke Jedah dan Mekkah. Di Jedah dan di Mekkah, Teungku Syekh Abdul Hamid bergaul dengan tokoh-tokoh politik yang datang dari pelbagai negeri, seperti dari Mesir, Irak, Syria, Turki, Maroko, Aljazair, Tunisia, India dan entap apa lagi. Ayah Hamid ingin menyampaikan ke Aceh hal-hal yang dianggap perlu, tetapi disadarinya bahwa hal tersebut akan membahayakan orang yang menerima berita itu. Lahu dicarinya jalan keluar. Pertama ia memilih orang-orang yang akan dikirim berita-berita itu, orang-orang kira-kira tidak dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua yang dikirim itu bukan surat, melainkan surat Kabar berbahasa Arab seperti Ummul Qura. Di dalam celah-celah surat kabar itulah Ayah Hamid menulis berita-berita yang ingin disampaikan kepada kawan-kawannya di Aceh. Di antara orang-orang yang dikirim surat kabar itu ialah Teungku H. Abdullah Ujong Rimba. Dan di antara berita-berita yang disampaikan ialah anjuran memperbaharui sistem pendidikan Agama di Aceh. Menurut Ayah Hamid, cara lama yang berlaku di dayah-dayah di seluruh Aceh, di mana Teungku-Teungku di dayah hanya pasif saja, hanya menunggu siapa yang mau datang saja yang diajar, dan cara mengajar juga hanya dipakai cara talqin saja, maka dikuatirkan pada suatu saat nanti dayah-dayah akan kosong dan Aceh akan kehabisan para ulama dan akan kehikangan pendidikan agama. Oleh karena itu dianjurkan supaya para ulama memikirkan untuk mengubah cara belajar duduk berhalqah mengelilingi guru, menjadi cara madrasah yang memakai bangku dan papan tulis sebagai alat pembantu.*<sup>153</sup>

Berita atau anjuran dari Teungku Abdul Hamid ini disambut baik oleh salah seorang yang menerimanya, yaitu Teungku H. Abdulllah Ujong Rimba. Dan yang tersebut terakhir ini menyampaikan anjuran itu kepada salah seorang rekannya yang dianggap berpengaruh pada waktu itu, yaitu Teungku **Muhammad Daud Beureueh**, yang rupa-rupanya juga menyambut baik idee

152. Ismuha, *op. cit.*, hal 12-14.

153. Uraian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ismuha, masing-masing dengan Teungku. Daud Beureuh dan Teungku H. Abdullah Ujong Rimba pada tahun 1974.

pembaharuan sistem pendidikan agama di Aceh, seperti yang dianjurkan oleh Teungku Syekh Abdul Hamid tersebut. Hal ini dapat diketahui karena Teungku Muhammad Daud Beureueh selanjutnya menyampaikan pula anjuran itu kepada rekan-rekannya para ulama lainnya, di antaranya kepada Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap di Matang Glumpang Dua yang mempunyai sebuah dayah (lembaga pendidikan agama yang tradisional) dan kepada para ulama di sekitar Sigli yang juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan agama yang tradisional. Dalam perkembangannya idee atau anjuran dari pada Teungku Syekh Abdul Hamid tersebut, sedikit banyak telah ikut mempengaruhi perubahan ke pembaharuan sistem pendidikan Agama di Aceh. Khususnya seperti pada madrasah Al-Muslim Peusangan dan madrasah Saadah Abadiyah di dekat Sigli, yang merupakan madrasah-madrasah paling populer di Aceh pada masa itu. Oleh karenanya, baik Teungku Syekh Abdul Hamid maupun mereka atau pelaksana-pelaksana anjuran tersebut seperti Teungku H. Abdulloh Ujong Rimba (yang juga sebagai tenaga pengajar yang mula-mula pada madrasah Saadah Abadiyah), Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (pendiri madrasah Al-Muslim Peusangan), dapat digolongkan sebagai tokoh-tokoh dalam pembaharuan sistem pendidikan Agama di Aceh.

## BAB IV

### PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA

Masalah pendidikan di Daerah Istimewa Aceh selama dua kurun waktu yaitu masa penjajahan Jepang dan masa sesudah Indonesia merdeka, banyak kaitan dengan periode sebelumnya atau pada waktu Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Dalam membahas perkembangan pendidikan pada periode ini akan dibagi ke dalam sub. bagian, sesuai dengan penanganan usaha pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pendidikan yang diusahakan oleh masyarakat atau apa yang lazim disebut dengan pendidikan swasta. Dari kedua sub bagian itu sendiri akan dibicarakan secara terpisah antara pendidikan formal yang melalui pendidikan resmi dengan pendidikan yang bersifat non formal seperti kursus-kursus, dan latihan-latihan yang bersifat ketrampilan lainnya. Pendidikan formal akan dibahas pula secara terpisah sesuai dengan jenis/jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, (pendidikan menengah yang bersifat umum), pendidikan kejuruan (menengah kejuruan) dan pendidikan tinggi.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesudah Indonesia merdeka di Propinsi Daerah Istimewa Aceh tidak semata-mata ditangani oleh sebuah Departemen, tetapi diusahakan oleh banyak Departemen. Secara umum pendidikan yang bersifat formal itu memang ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sejak dari namanya Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan — P.P.K). Namun demikian dalam kenyataannya dewasa ini hampir semua Departemen mempunyai lembaga pendidikan (yang bersifat sekolah) sendiri, yang walaupun hanya tujuan untuk memperoleh tenaga-tenaga khusus di bidangnya masing-masing menurut kebutuhan.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta pada umumnya didirikan atas usaha lembaga-lembaga masyarakat, baik yang bersifat organisasi-organisasi tertentu seperti Muhammadiyah, Al Wasliah, Taman Siswa, maupun ya-



yasas-yayasan yang khusus dibentuk untuk memikirkan serta mendirikan sekolah-sekolah yang sesuai dengan kebutuhan akan warga masyarakatnya.

## A. PENDIDIKAN PEMERINTAH

### 1. Pendidikan Dasar

Membahas masalah perkembangan pendidikan pada tingkat terendah yaitu pendidikan dasar, di mana anak-anak mendapat pendidikan formal untuk pertama kalinya. Dalam kaitannya dengan itu pendidikan dasar dewasa ini dapat dibagi dalam dua jenjang yaitu pendidikan pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang lama belajarnya dua tahun, dan Sekolah Dasar (SD) yang lama belajarnya enam tahun. Taman Kanak-Kanak sesungguhnya dapat digolongkan pada tingkat pra-pendidikan, oleh karena itu Taman Kanak-kanak masih sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah SD yang telah ada. Hal mana disebabkan karena belum adanya suatu peraturan yang mewajibkan setiap anak untuk memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) TK untuk memasuki Sekolah Dasar.

Seperti telah dijelaskan dalam Bab terdahulu bahwa pada masa penjajahan Belanda di Daerah Istimewa Aceh sekarang, pemerintah Belanda telah mendirikan Sekolah Dasar dalam berbagai jenis dan variasinya,<sup>1</sup> terutama menjelang berakhirnya kekuasaan mereka. Pada masa ini boleh dikatakan keadaan pendidikan telah menggembirakan. Walaupun tidak seluruhnya anak-anak yang berusia Sekolah Dasar dapat ditampung semuanya. Keadaan ini berubah dengan sangat cepat setelah masuknya balatentera Jepang ke Aceh pada khususnya, di mana usaha Jepang di Bidang pendidikan menuju kepada kemunduran/kemerosotannya baik di segi jumlah maupun dari segi mutunya. Dengan kata lain keadaan pendidikan pada masa ini menjadi tidak menentu.

Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942 di tiga tempat yaitu Aceh Timur, Aceh Besar dan Sabang, serta dalam tempo dua minggu kekuasaan telah berada di tangan mereka tanpa memperoleh perlawanan dari pemerintah sebelumnya yaitu Belanda. Pemerintah Jepang tidak banyak melakukan perubahan terutama di bidang sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan Belanda tetap diteruskan.<sup>2</sup> Salah satu perubahan yang dilakukan di dalam lapangan pendidikan adalah menyatukan pendidikan dasar menjadi satu macam saja yakni Sekolah Dasar enam tahun yang di dalam bahasa Jepang disebut *Kokumin Gakko* (Sekolah Negara), dari berbagai jenis pendidikan dasar pada masa pemerintahan Belanda seperti yang telah disebutkan itu. Selain menyeragamkan sekolah yang telah ada, juga diadakan perubahan lainnya seperti bahasa pengantar dengan seluruhnya menggunakan

1. Lihat bab. III bagian A terutama point 2 di atas.

2. Muhammad Ibrahim (Ketua), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh): Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Aceh, 1977/1978), hl. 168-169.

bahasa Melayu dan memasukkan bahasa Jepang sejak dari kelas satu.<sup>3</sup> Sebenarnya Jepang mengadakan penyeragaman tersebut adalah hanya untuk memudahkan pengawasan baik di dalam isi maupun dalam hal penyelenggaraannya. Penyeragaman ini sesungguhnya menguntungkan bangsa Indonesia, terutama dilihat dari sudut pendidikan yaitu menghapuskan diskriminasi.

Dalam bidang kurikulum selain memasukkan bahasa Jepang, para pelajar diharuskan menghormati adat kebiasaan Jepang, Murid-murid diharuskan melakukan kerja bakti (*Kinrohosi*), seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, memperbaiki jalan dan lain-lain. Selain itu juga diadakan latihan jasmani dan latihan kemiliteran. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ini ditujukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.<sup>4</sup> Banyaknya Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Aceh yang berstatus negeri pada masa ini tim peneliti belum mendapatkan suatu angka yang pasti.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya masalah pendidikan tampaknya menjadi perhatian utama, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Pada masa penjajahan Belanda banyak sekolah terutama yang terdapat di desa-desa yang pada waktu pemerintahan Jepang sebagian besar tidak berjalan, baik karena gedungnya dipergunakan sebagai tangsi militer Jepang maupun sebab-sebab lainnya, setelah Indonesia merdeka dihidupkan kembali walaupun dalam keadaan sangat sederhana. Hal ini dapat dimalumi oleh karena kekurangan guru dan perlengkapan-perengkapan sekolah.

Membahas perkembangan pendidikan dasar yang diasuh oleh pemerintah pada permulaan kemerdekaan di Daerah Aceh kita agak mengalami kesukaran dalam data-data yang kongkrit. Seperti diketahui Aceh pada waktu sesudah Indonesia merdeka termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatra, dan Aceh merupakan Keresidenan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1948 Sumatra menjadi tiga Propinsi otonom yaitu Utara, Tengah dan Selatan., sedangkan Aceh termasuk ke dalam Propinsi Sumatra Utara. Pada akhir tahun 1949 dengan peraturan wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/Wk.P.M./49 tanggal 17 Desember 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatra Utara dan menjadi Propinsi tersendiri. Propinsi Aceh merupakan bahagian dari negara Republik Indonesia tidak berumur lama, karena kemudian dalam rangka kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950 serta pernyataan bersama tanggal 20 Juli 1950, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 yang antara lain Aceh dimasukkan kembali ke dalam Propinsi Sumatra Utara. Sesudah 6 tahun berstatus sebagai keresidenan, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1956 dibentuklah Propinsi Aceh untuk kedua kalinya, yang serah terima

3. *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*, (Darussalam-Banda Aceh: Jajasan Pembina Darussalam, 1969), hl. 374 – 375.

4. *10 Tahun Darussalam*, *op. cit.*, hal. 173 dan 375.

pemerintahan dilakukan pada tanggal 27 Januari 1957 dari Propinsi Sumatra Utara ke Propinsi Aceh dan pada hari ini pula dilantik Gubernur A. Hasjmy.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pembentukan Propinsi Aceh dan sesuai dengan P.P No. 65/1951 tentang penyerahan sebagian dari tugas Kementerian P.P dan K. kepada Daerah Otonom, dibentuk pula Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Aceh. Pembentukan ini didasarkan kepada Keputusan Gubernur (Dewan Pemerintah Peralihan Swatantra Tingkat I Aceh) tanggal 31 Oktober 1959 Nomor 34/DPD/1959. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 9 September 1960 Nomor 79/1960 ditetapkan pula lapangan tugas, susunan dan kewajiban dinas P.D. dan K. yang pada dasarnya adalah menyelenggarakan Sekolah Dasar.<sup>6</sup> Dengan demikian pada masa-masa transisi data yang lengkap mengenai perkembangan sekolah dasar agak kabur, karena masih bersama dengan Sumatra Utara. Secara Umum sampai tahun 1952 di Propinsi Sumatra Utara (termasuk Aceh) telah terdapat 2.244 Sekolah Rakyat (SR), terdiri dari 1.086 SR 3 Tahun dan 1.158 SR 6 tahun, sedangkan jumlah murid negeri sebanyak 504.026 orang dengan guru seluruhnya 9.205 orang.<sup>7</sup> Dari jumlah tersebut di atas hanya 432 SR Negeri, yang menampung 79.863 murid dengan guru sebanyak 1.308 orang.<sup>8</sup>

Usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan dasar di Aceh telah dirintis sejak periode Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik), namun pada masa ini keadaannya masih sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan daerah tetangganya sendiri seperti Sumatra Timur dan Tapanuli. Sesudah Periode Perang Kemerdekaan, pemerintah juga tidak dapat berbuat banyak untuk memajukan pendidikan di Aceh, karena sejak tahun 1953 terjadi lagi peristiwa DI/TII yang berlangsung sampai tahun 1959. Meletusnya Peristiwa DI/TII ini mempunyai akibat yang sangat besar di dalam lapangan pendidikan, karena di masa ini tidak ada sekolah baru yang didirikan dan bahkan banyak gedung sekolah di desa-desa yang dibakar. Selain dibakar sebagian gedung sekolah juga terbengkalai oleh karena guru-guru sukar melaksanakan tugasnya, disebabkan dalam keadaan tidak aman.<sup>9</sup>

Guna memperoleh kemajuan dalam setiap lapangan termasuk pendidikan, Pemerintah Daerah (Gubernur) bersama Komando Daerah Militer Aceh Iskandar Muda, Kepolisian Aceh dalam tahun 1957 telah bertekad untuk mengembalikan Aceh menjadi suatu Daerah yang benar-benar aman. Untuk itu Pemerintah telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Pimpinan DI/TII

5. T. Ali Basyah Talsya, *10 Tahun Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969), hl. 28-31.

6. 10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan, *op. cit.*, hal 287-388.

7. Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hl. 72.

8. Adnan Abdullah, "Sekolah Desa, *Santunan*, No. 13, 1977, hl. 22; Bandingkan Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hl. 225, Jumlah SR 437 buah dengan murid 89.372 orang.

9. Muhammad Ibrahim, *Ibid.*, hal. 225-6.

yang pada akhirnya melahirkan suatu Ikrar Bersama yang disebut dengan *Ikrar Lamteh*,<sup>10</sup> Inti dari Ikrar ini adalah secara bersama memajukan agama Islam, membangun Aceh dan memberi kemakmuran rakyat dan masyarakat Aceh. Setelah lahirnya Ikrar ini, Pemerintah Pusat mengutuskan Wakil Perdana Menteri (Mr. Hardi) untuk berkunjung ke Aceh yang bertujuan membicarakan masalah yang menyangkut usaha di dalam lapangan keamanan dan pembangunan. Hasil kerja misi Pemerintah Pusat selama di Aceh, setelah mengadakan pertemuan baik dengan Pemimpin DI/TII maupun dengan Penguasa Daerah (Gubernur, KDMA) yang akhirnya melahirkan sebuah Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959, yang menegaskan bahwa Daerah Swatantra Tk. I Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh dengan otonomi yang seluas-luasnya di dalam lapangan keagamaan, Peradatan dan Pendidikan.<sup>11</sup> Untuk dapat kita mengetahui sejauh mana Perkembangan Pendidikan Dasar sampai tahun 1959 yaitu saat tercapainya suasana keamanan di Aceh, jumlah SR Negeri dan Swasta sebanyak 658 buah dengan jumlah murid 109.239, yang di asuh oleh 3.299 orang guru.<sup>12</sup>

Dengan lahirnya Daerah Istimewa Aceh yang salah satu otonominya di bidang Pendidikan, dan didorong oleh keinginan rakyat Aceh untuk mengejar ketinggalan ini, mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Program yang disebut program Aceh Membangun dengan menempatkan pendidikan menjadi program terdepan dalam rencana pembangunan Daerah. Selanjutnya dengan surat Keputusan Gubernur No. 90/1960 tanggal 5 Oktober 1960, telah menetapkan pula tanggal 2 September sebagai Hari Pendidikan dalam Daerah Istimewa Aceh. Sejalan dengan ditetapkannya Hari Pendidikan daerah setiap tanggal 2 September, oleh Pemerintah Daerah disediakan sebuah piala Bergilir yang diberikan kepada setiap Kabupaten yang telah menunjukkan prestasi yang memuaskan di bidang pendidikan. Di samping piala bergilir yang diperebutkan oleh Kabupaten dan Kota Madya, tiap-tiap Kabupaten serta Kota Madya menyediakan pula sebuah piala Bergilir yang diperuntukkan kepada Sekolah Dasar yang termaju dan menjadi pemuncak di Daerahnya masing-masing. Tentang penyediaan serta pemberian piala bergilir ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 91/1960 tanggal 6 Oktober 1960.<sup>13</sup> Adapun tujuan penyediaan piala bergilir ini untuk mendorong setiap daerah Tk. II guna memajukan pendidikan di daerahnya. Demikian juga halnya dengan piala bergilir Kabupaten dan Kota Madya guna mendorong setiap SD memajukan sekolahnya dalam semua segi.

---

10. Lamteh adalah nama sebuah *Gampong* (desa) yang terletak di dekat Uleelheue Aceh Besar. Ikrar Lamteh ini merupakan sebuah usaha yang lahir dari suatu konsepsi yang dicetuskan oleh Komando Daerah Militer Aceh (KDMA) yang terkenal dengan nama "Konsepsi Prinsipil Bijaksana" dalam menangani usaha keamanan di Aceh.

11. T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 37-46.

12. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 377.

13. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 378-380.

Sejak dicetuskannya Hari Pendidikan Daerah dengan memperebutkan piala bergilir, setiap daerah Kabupaten ternyata berusaha sekeras-kerasnya untuk memajukan pendidikan di daerahnya sejak dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan Menengah. Sebagai suatu gambaran yang menunjukkan perkembangan Pendidikan Dasar selama lima tahun kemudian dapat kita lihat dari angka di bawah ini: Kalau dalam tahun 1959 jumlah sekolah SD (termasuk SD Swasta) 658 buah, dengan jumlah guru 3.299 orang dan jumlah murid 109.239 orang maka dalam tahun 1964 jumlah sekolah ini meningkat menjadi 723 buah, SD negeri 659 buah dengan jumlah guru 3709 orang dan jumlah murid 144.681 orang.<sup>14</sup>

Perkembangan sekolah dasar negeri makin bertambah pesat sesudah tahun 1959 karena faktor-faktor yang kita sebutkan di atas yang antara lain adanya suatu kewajiban moral bagi setiap Bupati/Walikota/madya untuk memajukan pendidikan serta berlomba memperoleh penghargaan di dalam lapangan pendidikan ini. Kebutuhan akan pendidikan dasar semakin terasa oleh setiap penduduk yang mengharapkan setiap anak mereka setidaknya-tidaknya harus menamatkan SD. Di setiap desa yang pada waktu yang lalu belum memiliki SD sekarang telah berusaha untuk memperoleh sebuah SD Negeri, yang kebanyakan pada waktu didirikan berstatus swasta, yang lambat laun diusahakan penegriannya. Dalam perkembangan selanjutnya karena hasrat untuk mendapat kesempatan pendidikan di SD semakin meningkat yang tidak dapat ditampung sesuai dengan pasilitas gedung yang tersedia, telah ditempuh beberapa kebijaksanaan yang antara lain memecahkan SD yang padat muridnya. Ini dapat kita lihat misalnya saja pada tahun 1964 seperti yang telah disebutkan di atas jumlah SD Negeri sebanyak 659, padahal pada tahun ini jumlah gedung yang tersedia sebanyak 501 buah. Dari jumlah gedung yang tersedia ini yang dibangun oleh pemerintah dari tahun 1959-1959 yaitu 39 unit, masing-masing 3 lokal yang dibangun dalam rangka misi Hardi (1959) dan 1 unit 3 lokal yang dibangun dalam rangka Pembangunan Semesta Berencana.<sup>15</sup> Selebihnya adalah sisa gedung yang dibangun pada masa Penjajahan Belanda dan yang dibangun oleh swadaya masyarakat.

Dalam sepuluh tahun berikutnya yaitu sebelum adanya Sekolah Dasar Inpres, perkembangannya dapat kita lihat seperti tabel berikut ini.<sup>16</sup>

---

14. sumber Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh; lihat juga 10 Tahun Darussalam, *Ibid.*, hl. 377.

15. Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh, *Beberapa catatan singkat*, Kepala Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh (Drs. Idris Adami) dari tahun 1964 sampai dengan 1979 sebagai lampiran serah terima jabatan pada tanggal 24 Oktober 1979.

16. *Ibid.*

Tahun	SD	Gedung	Kelas	Guru	Murid
1964	659	501	3.687	3.306	120.660
1965	674	606	3.902	3.707	124.802
1966	685	595	4.323	3.824	131.291
1967	712	564	4.446	4.034	135.492
1968	740	541	4.702	4.611	141.759
1969	749	547	4.901	4.644	149.202
1970	759	562	5.386	4.815	157.927
1971	784	614	5.425	4.789	165.993
1972	841	665	5.842	4.858	177.630
1973	885	731	6.007	5.025	176.388

Berdasarkan angka-angka di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah, kelas, guru dan murid setiap tahun terus meningkat. Tentang jumlah gedung yang dari tahun 1966 sampai tahun 1969 menunjukkan angka-angka yang menurun, hal ini disebabkan karena banyak di antara gedung-gedung peninggalan Belanda dan gedung yang dibangun dengan swadaya masyarakat, banyak yang sudah menjadi rusak.

Usaha untuk menampung anak-anak usia sekolah seluruhnya di SD mulai ditangani secara nasional dengan keluarnya Instruksi Presiden sejak tahun 1973 (Inpres No. 10/1973) dengan membangun gedung-gedung SD yang merupakan SD baru serta sekaligus mengangkat guru-gurunya. Sasaran dari SD Inpres ini adalah guna mencapai tiap unit SD mendapat prioritas, terutama daerah-daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mempunyai SD. Untuk mendapat suatu gambaran selama PELITA I (1969–1974) jumlah SD Negeri di Aceh 1.029 buah yang terdiri dari 749 SD sebelum PELITA I, 145 buah SD yang dinegerikan selama Pelita I dan 135 SD Inpres.<sup>17</sup>

Dengan adanya Inpres berarti jumlah SD negeri setiap tahun semakin meningkat jumlahnya, di samping terus diusahakan penegerian SD-SD swasta yang telah memenuhi syarat. Sampai tahun 1979 jumlah SD Inpres yang telah dibangun di Aceh dapat dilihat dari tabel berikut:

SD Inpres	Tahun	Guru untuk SD Inpres	Murid
1974	135	1.211	11.446
1975	235	2.384	23.718
1976	325	2.224	37.814
1977	325	3.451	37.814
1978	700	4.729	92.319
1979	700	4.729	110.818

17. *Ibid.*

Sampai dengan akhir tahun 1979 perkembangan SD Negeri di Aceh, jumlah SD seluruhnya 1.607, lokal 6462, gedung 1.883 unit, kelas 9.608, guru 9.834 orang (termasuk 369 orang guru agama), 225 orang pesuruh dan 322.410 orang murid.<sup>18</sup>

Seperti telah disebutkan di atas bahwa lembaga pendidikan dasar yang langsung ditangani oleh pemerintah tidak hanya SD, namun masih terdapat madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang berada di bawah tanggungjawab Departemen Agama.

Pada zaman pendudukan Jepang oleh pemerintah Petadbiran Militer Jepang semua sekolah swasta yang bersifat umum tidak dibenarkan, kecuali sekolah-sekolah yang bersifat agama. Madrasah-madrasah masih tetap dibiarkan untuk menyelenggarakan pendidikan walaupun dengan pengawasan yang ketat. Madrasah-madrasah ini sesudah Indonesia merdeka menjadi Madrasah yang berada langsung di bawah Departemen Agama.

Kehidupan Madrasah yang selama awal tahun 1946 masih berstatus swasta, selanjutnya atas dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Aceh, sekolah-sekolah agama di Aceh yang jumlahnya 180 buah dengan gurunya 36.000 orang secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan Madrasah-madrasah secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Nopember 1946 dengan suatu piagam penyerahan yang disebut "Kanun Penyerahan Sekolah-sekolah Agama kepada Pemerintah," yang pengelolaannya diserahkan kepada Pejabat Agama Aceh, yaitu Kepala Bahagian Pendidikan Agama Sejak saat itu Madrasah tersebut telah berubah status menjadi negeri dan guru-gurunya juga diangkat menjadi pegawai negeri yang jumlahnya sebanyak 750 orang. Setelah penyerahan, namanya menjadi Sekolah Rendah Islam Negeri (S.R.I.) dengan lama waktu belajarnya 7 tahun dan mata pelajaran umum setingkat dengan Sekolah Rakyat pada waktu itu.<sup>19</sup>

Dari tahun ke tahun perkembangan SRIN semakin bertambah. Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 43 tanggal 24 Desember 1952 yang menyediakan anggaran bagi pembelian alat-alat dan buku-buku pelajaran untuk SRIN. Kedudukan Sekolah Rendah Islam Negeri baru mendapat kepastian di bidang hukum setelah dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1959 yang merupakan dasar hukum untuk pemeliharaan dan pengasuhan SRI Negeri di Aceh oleh Departemen Agama. Penetapan ini berlaku surut sejak tahun 1952, dengan jumlah yang tercantum di dalam lampiran penetapan ini sebanyak 205 buah SRI Negeri. Dalam tahun 1959 ini selain 205 SRI Negeri masih terdapat SRI swasta sebanyak 21 buah dengan jumlah murid seluruhnya (Negeri, swasta) 45.648 orang.<sup>20</sup>

18. *Ibid.*

19'10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 401-3; A Hasjmy *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hl. 105-7; H. Ismuha, *Proses Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh*, *Santunan*, No. 20, 1978, hl. 16-17.

20. *Ibid.*, hal. 404-5.

Sekolah Rendah Islam dalam perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (M.I.N) dan Swasta (M.I.S) yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1962. Dalam tahun 1962 jumlah MIN dan MIS seluruhnya sebanyak 385 buah dengan guru 1.605 orang. MIN semakin hari semakin bertambah jumlahnya, yang dalam tahun 1968 MIN dan MIS menjadi 500 buah, 80.000 murid, dengan jumlah guru pengasuh 2.089 orang.<sup>21</sup> Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam perkembangan selama 10 tahun kemudian baik menyangkut jumlah sekolah, guru, murid dan lokal, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.<sup>22</sup>

Tahun	Jumlah MIN	Guru	Murid	Lokal
1969	206	1.640	93.221	1.201
1970	206	1.601	93.000	1.204
1971	206	1.540	92.402	1.208
1972	206	1.502	92.043	1.209
1973	206	1.610	91.334	1.210
1974	206	1.261	80.419	1.213
1975	207	1.134	59.608	1.276
1976	207	1.060	51.884	1.276
1977	207	1.076	54.150	1.249
1978	209	1.176	50.182	1.182

Dari angka di atas menunjukkan jumlah peminat untuk memasukkan anaknya ke MIN semakin menciut, hal ini disebabkan karena jumlah daya tampung pada SD negeri semakin banyak dengan adanya SD Inpres yang lokasinya terjangkau sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu mungkin juga diakibatkan bahwa tamatan MIN harus meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah, demikian pula seterusnya, oleh karena sekolah umum (SMP) tidak dapat menerima tamatan MIN kalau tidak memiliki STTB SD, sungguhpun kurikulum MIN pelajaran umum setingkat SD dan lama belajar juga telah menjadi enam tahun. Sebab lain juga diakibatkan oleh karena tamatan MIN yang sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menjaga Pegawai, kecuali pada Departemen Agama.

## 2. Pendidikan Menengah Umum

Sebagaimana yang telah disebutkan di permulaan Bab ini bahwa dalam pembahasan pendidikan menengah ini akan dibicarakan lembaga pendidikan menengah umum (SMP dan SMA) dan juga pendidikan yang diselenggarakan

21. *Ibid.*, hl. 406; A. Hasjmy, *op. cit.*, hl. 107-108.

22. Bidang Pendidikan Agama Islam, "Data Statistik Sekolah/Madrasah dalam lingkungan kegiatan Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Aceh" (naskah Ketikan), 1978



oleh Departemen Agama yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri. Hal ini didasarkan bahwa kedua lembaga pendidikan ini bukanlah suatu sekolah kejuruan.

Pada masa Pemerintahan Jepang tidak banyak yang dapat kita kemukakan, sama halnya juga dengan Sekolah Dasar. Sebenarnya sejak periode terakhir kekuasaan Belanda untuk Aceh hanya terdapat sebuah Sekolah Menengah Negeri yang disebut MULO yang berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh sekarang). Sekolah ini di zaman Jepang tetap diteruskan hanya saja namanya yang diubah menjadi *Chu Gakko* yang artinya Sekolah Menengah. Mengenai kurikulum sama dengan Sekolah Dasar, selain tidak boleh lagi diajarkan bahasa Belanda yang diganti dengan bahasa Jepang, mata pelajaran lain disesuaikan dengan suasana peperangan. Selain dari MULO pada zaman Belanda atau *Chu Gakko* pada zaman Jepang, di Aceh tidak terdapat jenis sekolah menengah atas lainnya.

Di dalam Indonesia merdeka barulah pertumbuhan pendidikan menengah umum ini mulai ada kemajuannya, hal mana disesuaikan dengan kebutuhan dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh telah lama tidak memperoleh kesempatan pendidikan menengah umum. Dalam periode perang kemerdekaan perkembangan pendidikan secara umum tidak dapat berjalan dengan lancar oleh karena banyak guru-guru yang memasuki lasykar-lasykar rakyat. Kendatipun belajarnya tidak teratur, namun dalam periode ini jumlah sekolah menengah umum tercatat 7 buah SMP Negeri yaitu di Banda Aceh, Takengon, Meulaboh, Sigli, Tapaktuan, Lhok Seumawe dan Langsa. Selain SMP juga terdapat satu-satunya SMA Negeri dalam periode ini yaitu di Banda Aceh. Para pelajar sekolah menengah pada masa ini selain belajar juga turut serta dalam mempertahankan tanah air, ada yang bergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) ada pula yang memasuki Tentara Pelajar Islam (TPI).<sup>23</sup>

Sesudah pengakuan kedaulatan barulah pemerintahan Republik Indonesia bersama rakyat di daerah-daerah telah banyak mencurahkan perhatiannya untuk membuka sekolah-sekolah baru. Pertambahan SMP dan SMA di Aceh dalam sepuluh tahun kemudian yaitu sampai tahun 1959 boleh dikatakan sangat lambat, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Aceh. Hanya 13 buah SMP Negeri yang dapat bertambah dalam masa ini yaitu di Sabang, Sibreh, Sinabang, Singkel, Beureunun Meureudu, Samalanga, Bireun, Lhoksukon, Idie, Kutacane, Blang Keujeren dan Kuala Simpang.<sup>24</sup> Penambahan sekolah negeri ini adalah berkat kerja keras dari masyarakat setempat yang mendapat bimbingan dari pemerintah. Dalam masa ini masyarakat mendirikan sekolah-sekolah serta menyediakan perlengkapan yang kemudian diminta kepada pemerintah untuk dinegerikan.

Seirama dengan pertambahan SMP baik negeri maupun swasta, memerlukan pula penambahan sekolah menengah tingkat atas termasuk di dalamnya

---

23. 10 Tahun Darussalam, op.cit., hal.329-332.

SMA. Sampai tahun 1957 di Aceh belum ada penambahan SMA Negeri, selain yang telah ada di Banda Aceh. Baru kemudian dalam tahun 1958 dan 1959 mulai ada pada tiap Kabupaten. SMA yang dinegerikan dalam tahun 1958 adalah SMA Sigli, Takengon, Langsa, dan Meulaboh. Dalam tahun 1959 adalah SMA Lhokseumawe dan Tapaktuan.<sup>25</sup>

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa perkembangan pendidikan menengah umum (SMP dan SMA) Negeri sampai akhir tahun 1959 masih sangat sedikit sekali. Untuk SMP Negeri baru mulai ada di beberapa Kecamatan dan belum merata di tiap Kecamatan, sedangkan SMA Negeri baru ada di ibu kota Kabupaten. Dengan demikian dapat dimengerti masih sangat sedikit sekali yang dapat menduduki bangku sekolah menengah, jika dibandingkan pada tahun 1959 ini jumlah SD negeri dan swasta di Aceh sebanyak 658 dengan jumlah muridnya 109.239 orang.

Dalam perkembangan selama sepuluh tahun kemudian sampai tahun 1970, SMP Negeri dan SMA Negeri menunjukkan suatu grafik yang menarik. Karena dalam masa ini banyak sekolah yang didirikan atas swadaya masyarakat dinegerikan oleh pemerintah. Penegerian itu dapat dilihat sejak tahun 1960 yaitu SMP II dan SMP III Banda Aceh (SMP ini sebenarnya peleburan Sekolah Guru B Negeri). Selain itu juga dinegerikan SMP Jeuram, Susoh, Kotabakti, Glumpang Minyak, Takengon II dan Lawe Sigala-gala. Tahun 1961 mendapat penegerian hanya satu SMP yaitu di Labuhan Haji. Tahun 1962 dinegerikan tiga buah (Matang Glumpang Dua, Peugasing dan Redelong). Tahun 1963 sebanyak satu buah yaitu Panton Labu. Dalam masa ini yang paling banyak mendapat penegerian adalah pada tahun 1965 sebanyak enam buah yaitu Indrapuri, Galang, Meukek, Menggeng, Kandang dan Ulee Glee.<sup>26</sup> Dengan demikian sampai tahun 1970 jumlah SMP Negeri yang terdapat di daerah ini tercatat 51 buah, 466 orang guru dengan muridnya sebanyak 11.543 orang.<sup>27</sup>

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa sekolah yang didirikan ini pada mulanya adalah sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat setempat. Adapun yang mendorong masyarakat memperbanyak SMP di setiap Kecamatan atau dengan kata lain mendirikan SMP di Kecamatan yang belum memilikinya adalah didorong oleh keinginan agar putra-putri mereka memperoleh kemajuan. Selain ini diakibatkan sedikit sekali daya tampung pada SMP-SMP Negeri yang terdapat di Kabupaten, yang menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar di SMP. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya adalah kurang mampunya orangtua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya ke ibukota Kabupaten. Hal-hal inilah

25. *Ibid.*, Lihat juga Laporan Tahunan Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh", Tahun 1970, Lampiran B Nomor XI.

26. *Ibid.*, hal. 342 - 344.

27. Laporan Tahunan, *ibid.*,

yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah setempat memikirkan serta berusaha mendirikan sekolah, serta untuk mengurangi beban dari orang tua murid lambat laun diusahakan penegeriannya. Karena kalau telah dinegerikan setidaknya pemerintah telah menyediakan guru dan kebutuhan pengajaran, sedangkan masyarakat tetap berusaha untuk menambah kekurangan-kekurangan yang masih terdapat seperti gedung/ruang belajar, meubiler dan lain-lain.

Sejalan dengan penambahan SMP baik negeri maupun swasta dalam periode tersebut di atas menunjukkan suatu kemajuan yang pesat, menyebabkan banyak anak-anak yang tamat SMP yang tidak dapat ditampung seluruhnya pada SMA Negeri yang hingga akhir tahun 1959 hanya ada 7 buah, seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu banyaknya peminat dari murid-murid tamatan SMP untuk melanjutkan ke SMA jika dibandingkan dengan ke sekolah Kejuruan, hal ini juga disebabkan karena terbatasnya jumlah SLTA kejuruan negeri. Segi lain yang menyebabkan banyak peminat untuk memasuki SMA terutama yang negeri adalah disebabkan bila mereka tamat SMA terutama yang negeri adalah disebabkan bila mereka tamat SMA dengan mudah dapat memasuki Perguruan Tinggi menurut keinginan mereka dan sesuai dengan jurusan yang mereka pilih sewaktu di SMA. Selain yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, mereka yang tamat SMA untuk mencari lapangan kerja juga lebih mudah jika dibandingkan dengan tamatan kejuruan pada masa ini. Tamatan kejuruan hanya diperlukan oleh instansi-instansi tertentu terutama yang relevan dengan sekolah kejuruan itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan banyak peminat untuk memasuki SMA, meskipun SMA Negeri yang telah ada tidak mampu menampung semua lulusan SMP. Dengan demikian timbul usaha untuk menegerikan SMA-SMA swasta yang telah memenuhi persyaratannya.

Pertambahan SMA Negeri dari tahun 1960 sampai tahun 1969 tidak begitu banyak, oleh karena pada masa ini pemerintah tidak langsung mendirikan sekolah negeri tetapi menegerikan sekolah swasta yang telah memenuhi syaratnya. Seperti diketahui bahwa SMA yang didirikan oleh masyarakat keadaannya serba kekurangan dan oleh karena itu banyak yang tidak memenuhi persyaratannya untuk dinegerikan. Sampai akhir tahun 1968 jumlah SMA Negeri di Aceh sebanyak 16 buah dengan murid 3.446 orang yang diasuh oleh 149 orang guru.<sup>28</sup> Ke 16 buah SMA Negeri itu terdapat di tiap Kabupaten/Kotamadya adalah SMA Negeri Sabang, (Kodya Sabang), SMA Negeri Banda Aceh, SMAN Darussalam (Kodya Banda Aceh), SMAN Montasik, SMAN Sibreh (Kab. A. Besar), SMAN Sigli (Kab. Pidie), SMAN Langsa (Kab. A. Timur), SMAN Takengon (Kab. A. Tengah), SMAN Kutacane (Kab. A. Tenggara), SMAN Meulaboh (Kab. A. Barat), SMAN Tapaktuan, SMAN Blang Pidie (Kab. A. Selatan).

---

28.10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 350.

Keadaan SMA Negeri di Aceh dilihat dari segi jumlahnya tidak bertambah lagi sampai akhir tahun 1971, tetapi jika dilihat dari segi jumlah murid yang masuk tiap tahun semakin bertambah. Untuk mengatasi jumlah murid yang semakin banyak telah diambil beberapa kebijaksanaan yang antara lain menambah jumlah kelas dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian jumlah daya tampung dapat diperbesar untuk tiap tahun dalam batas-batas yang dimungkinkan. Dalam tahun 1971 jumlah SMA Negeri 16 buah, 1.498 orang murid dengan jumlah guru sebagai pengasuh 293 orang.<sup>29</sup>

Untuk memberikan suatu gambaran tentang perkembangan perkembangan pendidikan menengah negeri di daerah Istimewa Aceh sampai tahun 1975 dapat dilihat dari tabel berikut ini.<sup>30</sup>

Banyak SMP Negeri, murid dan guru menurut Kabupaten/Kotamadya.

Kabupaten Kotamadya	Banyaknya SMP Negri	Banyaknya Kecamatan	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Banda Aceh	4	2	2.716	148
Sabang	1	—	490	20
Aceh Besar	6	12	1.872	89
P i d i e	10	23	3.872	170
Aceh Utara	8	23	3.121	86
Aceh Timur	4	16	1.993	80
Aceh Tengah	4	6	1.561	103
Aceh Tenggara	4	9	1.087	63
Aceh Barat	5	19	2.036	105
Aceh Selatan	9	18	2.212	116

Jika kita melihat kepada jumlah SMP Negeri yang terdapat di tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya sampai pada tahun 1975 seperti yang terlihat di tabel di atas dapatlah disebutkan bahwa sampai pada tahun ini di Daerah Aceh masih belum setiap Kecamatan memiliki sebuah SMP Negeri. Hal ini disebabkan karena penegerian SMP atau pendirian sebuah SMP Negeri tidak langsung didirikan oleh pemerintah, tetapi adalah berkat usaha masyarakat setempat dalam memperjuangkannya serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah agar sebuah SMP Swasta dapat dinegerikan.

Perkembangan SMP Negeri dalam usaha menambah jumlahnya semata-mata tergantung kepada kegiatan masyarakat setempat, sebab sebelumnya adalah SMP Swasta yang didirikan serta dibiayai seluruhnya oleh masyarakat.

29. Perwakilan Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1971*.

30. Kanwil Dep. P dan K. Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1975*, hal. 52-53; Mengenal banyaknya Kecamatan setiap Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah Istimewa Aceh lihat T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 67-72.

Apabila dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan barulah sekolah itu diusahakan penegeriannya. Dengan demikian setiap SMP Negeri yang berkedudukan di salah satu Kecamatan akan menampung murid-murid yang berasal dari Kecamatan itu sendiri serta dari kecamatan-kecamatan yang berdekatan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SMP Negeri sangat terbatas sekali oleh karena lembaganya yang sangat terbatas. Selain pendidikan di SMP Negeri, hal yang lebih terbatas lagi adalah jumlah SMA Negeri dalam periode yang sama. Pada tahun 1975 jumlah SMA Negeri di seluruh Daerah Istimewa Aceh adalah 22 buah, hal ini berarti bertambah 5 buah jika dibandingkan dengan tahun 1968. Pertambahan mana menunjukkan suatu hal yang sangat lambat sekali, jika dibandingkan dengan penambahan jumlah SMP Negeri. Kalau diperinci menurut Kabupaten/Kotamadya, jumlah SMA Negeri, murid dan guru dapat dilihat dari tabel berikut ini:<sup>31</sup>

Kabupaten/ Kotamadya	Banyaknya SMA Negeri	Banyaknya M u r i d	Banyaknya Guru
Banda Aceh	3	1.212	82
Sabang	1	210	20
Aceh Besar	2	307	15
P i d i e	3	917	42
Aceh Utara	4	829	62
Aceh Timur	3	753	39
Aceh Tengah	1	394	18
Aceh Barat	2	276	14
Aceh Selatan	2	200	30
Aceh Tenggara	1	278	19

Dari jumlah sekolah di atas termasuk di dalamnya 2 buah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) Negeri yaitu di Banda Aceh dan Bi-reun, yang masing-masing didirikan pada tahun 1974 dan 1975. Kedua SMPP Negeri ini didirikan oleh pemerintah pusat baik gedung, meubiler dan perlengkapan sekolah lainnya secara lengkap disediakan oleh pemerintah. SMPP Negeri sewaktu didirikan adalah merupakan konsepsi Menteri P dan K Mashuri, sekolah ini berbeda dengan sekolah yang ada baik mengenai tujuannya, sistemnya dan metodenya. Anak-anak yang masuk sekolah ini mulai diperkenalkan kepada jenis-jenis lapangan kerja, selain diberikan pelajaran teori seperti di SMA. Mereka yang telah menamatkan sekolah ini bagi yang tidak mampu telah memperoleh suatu ketrampilan dan dengan sendirinya telah dapat berusaha sendiri setelah menamatkan sekolah.<sup>32</sup> Namun demikian dalam kenyataannya SMPP ini setelah berjalan beberapa lama, akhirnya baik kurikulum

31. *Ibid.*, hal. 54-56

maupun metoda tetap sama dengan sistem SMA lainnya. Sedangkan keterampilan tidak begitu menonjol dalam pengajarannya.

Sejak adanya Pembangunan Lima Tahun (Pelita) secara nasional, walau dalam Pelita I (1969/1970 – 73/74) maupun Pelita II (1974/1975 – 1978/79) prioritas pertama bukan di bidang pendidikan, namun masalah pendidikan tidak pula terlupakan. Dengan program Pelita banyak gedung SMP Negeri dan SMA Negeri yang mendapat biaya baik dalam merehabilitasi ruang-ruang yang telah rusak serta pengadaan meubiler, juga ada penambahan-penambahan ruang kelas baru. Di samping itu dibangun pula Laboratorium-laboratorium untuk tiap SMA dan SMP Negeri. Untuk buku-buku pelajaran telah diprogramkan buku paket pelajaran yang direncanakan secara nasional sekolah-sekolah yang berada di daerah tinggal memakainya.

Menurut data-data yang terakhir pertambahan jumlah SMP Negeri menunjukkan angka yang tinggi, sedangkan SMA tidak begitu cepat. Jumlah SMP Negeri sampai tahun 1980 adalah Kotamadya Sabang (1 buah), Kotamadya Banda Aceh (7 buah), Kabupaten Aceh Besar (15 buah), Kabupaten Pidie (20 buah), Aceh Utara (20 buah), Aceh Timur (13 buah), Aceh Tengah (9 buah), Aceh Barat (14 buah), Aceh Selatan (19 buah) dan Aceh Tenggara (9 buah).<sup>33</sup> Pertambahan jumlah SMP ini disebabkan beberapa hal yaitu masyarakat yang mengurus SMP-SMP Swasta telah berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi persyaratannya untuk SMP itu dapat dinegerikan. Selain itu adanya SMP Negeri yang langsung didirikan oleh pemerintah secara lengkap baik gedung dan perlengkapannya, dan hal lain ada beberapa SLTP Negeri Kejuruan yang diintegrasikan menjadi SMP Negeri yaitu yang berasal dari SMEP dan SKKPN. Jumlah SMA Negeri sampai tahun 1980 adalah 1 di Sabang, 4 di Banda Aceh termasuk 1 SMPP, 5 di Aceh Besar, 4 di Pidie, 6 di Aceh Utara termasuk 1 SMPP, 4 di Aceh Timur, 2 di Aceh Tengah, 4 di Aceh Barat, 4 di Aceh Selatan dan 1 di Aceh Tenggara.<sup>34</sup> Pertambahan SMA Negeri pada dasarnya juga berasal dari SMA Swasta yang diusahakan oleh masyarakat untuk kemudian dinegerikan. SMA yang didirikan oleh pemerintah secara langsung (gedung dan meubiler) di Aceh hanya ada 4 buah yaitu di Banda Aceh (SMA Negeri III), di Peureulak Aceh Timur dan di Takengon (Aceh Tengah), di Panton Labu (Aceh Utara).

Membahas masalah kurikulum SMP dan SMA secara garis besar dapat dikemukakan bahwa sejak Indonesia merdeka untuk SMP terdapat dua jurusan atau bagian yaitu Bagian A dan B. Pada Bagian A pelajaran lebih dititik beratkan kepada Sastra dan Ilmu Sosial seperti, Sejarah, Ilmu Bumi, dan lain-lain sedangkan untuk Bagian B lebih ditekankan kepada mata

32. Nugroho Notosusanto (Ed), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 283–284.

33. Kanwil Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, "Naskah Laporan Tahunan 1980," belum diterbitkan.

34. *Ibid.*

pelajaran Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam dan lain-lain yang berdekatan dengan itu. Untuk SMA jurusannya dibagi kepada tiga yaitu Bahagian A, B dan C. Pada bahagian A mata pelajaran yang ditanamkan adalah Sastra, pada bahagian B mata pelajaran Ilmu Alam, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Kimia, Biologi dan pelajaran lain yang banyak hubungannya dengan Ilmu Pasti dan Alam, sedangkan bahagian C adalah lebih dititikberatkan pada Ekonomi. Sejak tahun 1962 sistem pendidikan untuk SMP dan SMA mengalami perubahan, dimana mulai diterapkan sistem pelajaran SMP dan SMA Gaya Baru. Untuk SMP sampai siswa menamatkan sekolah tidak dikenal lagi pembagian Jurusan. Semua pelajaran diberikan kepada semua pelajar. Bagi SMA dengan sistem gaya baru mempunyai satu jenis kelas I dan empat jurusan di kelas II dan III (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam). Di kelas I semua siswa diajarkan semua jenis pelajaran yang ada di SMA dan bagi setiap pelajar diberikan kesempatan untuk lebih mengenal minat dan bakatnya. Dengan demikian mulai kelas II telah terarah sesuai dengan minat serta bakat yang dimiliki pada waktu belajar di kelas I.<sup>35</sup>

Seerti telah dijelaskan di muka bahwa dalam membahas pendidikan menengah ini tidak saja dibicarakan tentang SMP dan SMA, tetapi juga akan dibahas perkembangan Madrasah Tsanawiyah yang berada di bawah Departemen Agama. Pertumbuhan Madrasah Tsanawiyah adalah seiring dengan pertumbuhan M I N, oleh karena madrasah ini adalah merupakan lanjutan dari MIN. Sejalan dengan Qanun penyerahan sekolah-sekolah Agama kepada Pemerintah Daerah Aceh seperti yang telah disebutkan di muka, *Normal Islam Institiut* yang ada pada zaman Jepang diubah namanya menjadi Perguruan Normal Islam di Bireun yang diserahkan kepada pemerintah yang untuk selanjutnya dipindahkan ke Kutaraja (Banda Aceh sekarang) dan sekaligus ditukar namanya menjadi Sekolah Guru Islam (SGI). Dalam tahun 1946 ini pula di samping SGI dibangun Sekolah Menengah Islam (SMI) di Banda Aceh dan pada tahun 1949 dibangun pula SMIA yang merupakan lanjutan dari SMI. SMIA ini usianya tidak begitu lama, dengan penetapan Menteri Agama No: 5 tahun 1951 tanggal 1 Januari 1951 SMIA ini ditetapkan menjadi Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) dan pada tahun 1951 ini pula didirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama tanggal 14 Agustus 1951.<sup>36</sup>

Sejak tahun 1951 sesudah diresmikan PGA Negeri di Banda Aceh yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan agama yang mempersiapkan guru agama untuk MIN dan guru agama untuk sekolah dasar, dirasakan tidak mencukupi. Dalam perkembangannya 11 tahun kemudian yaitu pada tahun 1961 diresmikan sebuah PGA Negeri lagi yang terdapat di Meulaboh yang berasal dari PGA Swasta, PGA Negeri Meulaboh ini merupakan PGAN 4 Tahun

---

35. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 407-408, Ismuha, *loc. cit.*,

36. . . .

sedangkan di Banda Aceh PGAN 6 Tahun. Dalam perkembangan selanjutnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan guru agama baik untuk MIN dan SD, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama secara bertahap menambah jumlah PGA Negeri yang pada akhir tahun 1968 di Aceh terdapat 7 buah PGA Negeri yaitu Banda Aceh (1951), Meulaboh (1961), Lhoksemawe (1963), Kutacane (1967), Sigli (1967), Takengon (1967), Beureunuen (1968)<sup>37</sup> Jumlah ini tidak banyak bertambah lagi, hanya satu-satunya yang bertambah adalah PGAN Tapaktuan (1969). Keadaan ini bertahan sampai dengan akhir tahun 1977 dengan jumlah muridnya sebanyak 4.124 orang yang diasuh oleh 135 orang guru.<sup>38</sup> Dalam tahun 1978 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 tahun 1978 jumlah PGA Negeri di Banda Aceh disederhanakan yang hanya tinggal 6 buah lagi yaitu PGAN Banda Aceh, Sigli, Meulaboh, Lhokseumawe, Takengon dan Tapaktuan.<sup>39</sup>

Kembali membicarakan perkembangan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, yang kedua-duanya merupakan sekolah lanjutan pertama dan Atas yang diasuh oleh Departemen Agama. Nama dari sekolah ini adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 1967 sebagai suatu jenjang di dalam struktur kependidikan Departemen Agama yang sekaligus merupakan sumber bagi calon mahasiswa IAIN. Lama belajar dari masing-masing lembaga ini adalah tiga tahun, dengan susunan kurikulum secara garis besar adalah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTSAIN), 55% pelajaran agama dan 45% pelajaran Umum, sedangkan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) dengan 65% pelajaran agama dan 35% pelajaran umum. Sampai akhir tahun 1968 di Aceh terdapat 19 buah MTSAIN dan 2 buah MAAIN. Secara terperinci dapat disebutkan ke 19 buah MTSAIN itu adalah 1 di Banda Aceh, 3 buah di Aceh Besar (Lhoknga, Sibreh dan Tungkop), 5 di Pidie (Glumpang Minyeuk, Meureudu, Tangse, Kembang Tanjung, Banda Dua Ulee Gle), 3. di Aceh Utara (Matang Glumpang Dua, Gandapura, Lhoksukon), 2 di Aceh Tengah (Takengon, Simpang Tiga), 3 di Aceh Barat (Meulaboh, Peuremee, Jeram), 2 di Aceh Selatan (Sama Dua, Suak Bakong). Di samping itu masih terdapat 3 buah MTSAIN yang Surat Keputusannya ditetapkan oleh Jawatan Pendidikan Agama Daerah Aceh yaitu MTSAIN Bireun, Samalanga dan Susoh. Selain 19 buah seperti tersebut di atas dan 3 buah yang ditetapkan oleh Jawatan Agama Daerah Aceh, masih terdapat 5 buah lagi yang statusnya masih filial yang berinduk kepada salah sebuah MTSAIN yang dianggap induk yaitu di Suak Timah, Blang Balee, Teunom dan Lamno yang ke empat-empatnya berinduk pada MTSAIN Meulaboh dan satu lagi di Kuta Blang yang berinduk pada MTSAIN Gandapura. Sedang

---

37) *Ibid.*, hal. 410-412.

38) Bidang Pendidikan Agama Islam, *op. cit.*, hal. 4-6.

39. *Ibid.*, Majalah *Santunan* No. 80, hal. 3



kan jumlah MAAIN seluruhnya 2 buah masing-masing di Banda Aceh dan Meulaboh.<sup>40</sup>

Perlu dikemukakan bahwa MTSAIN dan MAAIN yang telah dinegerikan itu sebahagian besarnya adalah berasal dari sekolah swasta. Dalam tahun 1969 jumlah MTSAIN menjadi 28 buah yang berarti bertambah satu buah dan keadaan ini tidak bertambah lagi sampai tahun 1977. Sedangkan MAAIN hanya berubah satu buah dalam tahun 1970 dan sampai tahun 1977 masih tetap 3 buah. Sesuai dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Negeri dan PGA Negeri dalam lingkungan Departemen Agama No. 17 tahun 1978 yang menyatakan seluruh Sekolah Persiapan IAIN dileburkan menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dengan sendirinya seluruh SP IAIN yang terdapat di Aceh menjadi MAN dan dengan Keputusan ini MAN di Aceh menjadi 15 buah. Untuk MTSAIN yang kemudian diubah nama menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) dengan keluarnya SK Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 yang meleburkan sebagian PGAN menjadi MTSN, sesuai dengan SK tersebut jumlah MTSN di seluruh Aceh pada tahun 1978 menjadi 35 buah.<sup>41</sup> Dengan demikian sampai tahun 1978, jumlah sekolah menengah yang diasuh oleh Departemen Agama dapat disebutkan sebagai berikut: MTSAIN 35 buah dengan guru 225 orang dan murid 6393 orang; MAN 15 buah, guru 79 dan muridnya 1745 orang; PGAN 6 buah, guru 59 orang dengan jumlah murid 1959 orang.<sup>42</sup>

### 3. Pendidikan Menengah Kejuruan

Pendidikan menengah Kejuruan baik pertama maupun atas di daerah Aceh pada waktu zaman pendudukan Jepang tidak terdapat satu pun. Pertumbuhan sekolah menengah kejuruan baru dimulai setelah Indonesia merdeka, yang keadaannya pada masa revolusi fisik hanya terdapat dua jenis pendidikan kejuruan yaitu Sekolah Guru Menengah (SGM) yang terdapat di Kutaraja (Banda Aceh sekarang), di Takengon dan satu lagi adalah Sekolah Tehnik di Banda Aceh. Dari kedua jenis sekolah ini yang banyak muridnya adalah sekolah guru, karena sekolah ini memberi bea siswa kepada muridnya. Pada tahun 1950 sudah melepaskannya murid yang pertama sekali, yang lulus lebih kurang 10 orang pada umumnya menjadi guru SMP. Hasil yang dikeluarkan oleh sekolah tehnik sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga tehnik pada masa itu.<sup>43</sup>

Barulah setelah tahun 1950 sekolah menengah kejuruan mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Hal ini dapat kita lihat dengan daerah ini. Untuk lebih jelasnya dalam mengikuti perkembangan sekolah kejuruan ini

40. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 412-414.

41. Majalah, *San tunan*, no. 21, hal. 38.

42. Bidang Pendidikan Agama Islam, Kanwil Dep. Agama Daerah Istimewa Aceh, *loc. cit.*

43. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 332-334.

ada baiknya dalam uraiannya akan dikelompokkan menurut jenisnya yang meliputi, pendidikan guru, pendidikan ekonomi, pendidikan teknik, kewani-taan, keadministrasian dan yang terakhir dari uraian ini akan kita ketengahkan lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh Departemen-departemen di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejak tahun 1951 Sekolah Guru Menengah (SGM) yang ada di Banda Aceh dibagi menjadi dua bagian yaitu Sekolah Guru Atas (Sekolah Guru 6 Tahun) dan SGB 4 Tahun. Dengan dibagi menjadi dua bagian, tamatan SGA mengajar di sekolah Menengah dan SGB mengajar di Sekolah Dasar. SGB hanya berumur sampai tahun 1960, hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan yang antara lain untuk menghasilkan guru bagi SR dirasa cukup dari lulusan SGA. Meskipun SGB dibubarkan dalam tahun 1960, beberapa tahun kemudian dibuka lagi sekolah yang setingkat dengan itu yang disebut SPG C.I yang lama belajarnya juga 4 tahun dan muridnya pun diterima dari tamatan Sekolah Dasar. SPG C.I ini hanya terdapat di Kotacane dan dibuka semata-mata untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah tersebut. Berbarengan dengan itu dibuka pula SPG C.II sejak tahun 1963 yang terdapat di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Barat. SPG C. II ini sebenarnya dibuka untuk mengatasi kekurangan guru SD di Aceh. Mereka yang diterima di sini adalah tamatan SMP dan lama belajarnya 1 tahun, kemudian langsung menjadi guru SD.

Sekolah Pendidikan Guru yang merupakan lembaga pendidikan yang bertugas mendidik calon guru SD adalah merupakan penggantian nama dari SGA yang dulu. Sampai dengan tahun 1968 jumlah SPG di Aceh 7 buah yang bertempat di Banda Aceh Bireun, Langsa, Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan Kutacane, dengan muridnya sebanyak 1132 orang.<sup>44</sup> Di samping SPG juga terdapat KPG (Kursus Pendidikan Guru) yang pada umumnya dibuka di tiap-tiap SPG Negeri, yang bertujuan memberi pendidikan kepada guru-guru SD yang belum memiliki ijazah SPG. KPG dibuka khusus bagi mereka yang telah menjadi guru yang dulunya adalah tamat KPKPKB, SPG C.I dan SPG C.II dan mereka yang telah tamat KPG ijazahnya disamakan dengan SPG Negeri.

Pertumbuhan SPG dilihat dari segi jumlah lembaganya tidak mendapat kemajuan, oleh karena sampai tahun 1980 masih tetap 7 buah. Di segi lain SPG menunjukkan suatu kemajuan yang sangat pesat, karena jumlah murid yang mendaftar selalu di atas daya tampung. Untuk mengatasi kemampuan daya tampung SPG Negeri terpaksa dibuka SPG Swasta yang pada tahun 1975 masih berjumlah 2 buah dan pada tahun 1979 sudah meningkat menjadi 10 buah.<sup>45</sup> Melonjaknya minat pada SPG sejak tahun 1974 ada kaitannya de-

---

44. *Ibid.*, hal. 348.

45. Bidang PDG Kanwil Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, *Memperkenalkan Bidang Pendidikan Dasar dan Guru*, 1980, hal. 21-24.

ngan kesempatan kerja, di mana pemerintah telah mulai dengan program INPRES SD yang sekaligus mengangkat guru-guru SD untuk SD Inpres tersebut. Sejak adanya Inpres SD semua tamatan SPG telah mendapat kesempatan kerja dan yang belum masuk SPG berusaha menjadi siswa SPG dengan harapan dapat menjadi guru. Sekolah Pendidikan Guru sejak didirikan di Banda Aceh sampai dengan tahun 1980 hanya dibuka satu jurusan yaitu jurusan guru Sekolah Dasar. Bukan saja SPG Negeri Banda Aceh, akan tetapi semua SPG Negeri yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh dengan satu jurusan yang sama. Meskipun SPG mempunyai beberapa jurusan seperti jurusan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa, namun untuk Aceh tetap dibuka satu jurusan, hal ini disebabkan kelangkaan tenaga pengajar bagi jurusan tertentu. Usaha untuk memperoleh guru olahraga baik untuk SD maupun SLTA telah ditangani sejak tahun 1961. Dengan dibukanya sebuah lembaga pendidikan guru yang bernama Sekolah Guru Pendidikan Jasmani Sekolah ini bertujuan untuk mendidik guru-guru olahraga terutama untuk SLTP yang masih sangat langka di Aceh. Dari mendidik tenaga guru, sekolah ini diubah tujuannya dalam tahun 1966 yaitu mempersiapkan kader-kader di bidang olahraga yang sekaligus perubahan namanya menjadi Sekolah menengah Olah Raga Atas (SMOA). Sejak diubah menjadi SMOA pendidikannya lebih diarahkan menjadi olahragawan-olahragawan yang terdidik, namun ada di antara mereka juga menjadi guru olahraga pada SLTP setelah tamat SMOA.<sup>46)</sup>

Selama 10 tahun SMOA mempersiapkan tenaga olahraga yang terdidik yang diharapkan menjadi pembina-pembina olahraga di dalam masyarakat, sekolah ini diroboh lagi namanya dalam tahun 1976 menjadi sekolah guru olahraga (SGO). Atas dasar perobahan nama, sekaligus diubah pula tujuannya yaitu kembali mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar olahraga di sekolah-sekolah terutama adalah SD. Melihat kepada perkembangannya sekolah ini sejak dari namanya SPG sampai SMOA perhatian dan minat anak-anak untuk memasuki sekolah ini sangat kurang sekali. Pada tahun pertama dibuka (1961) jumlah murid yang belajar di sini hanya 22 orang (18 laki-laki, 4 wanita) dan pada tahun 1975 tercatat siswa sebanyak 87 orang (79 laki-laki, 8 wanita). Dari angka-angka ini dapat disimpulkan selama 15 tahun rata-rata yang menjadi siswa di sekolah ini belum mencapai seratus orang. Minat anak untuk memasuki sekolah ini baru terlihat pada tahun 1976 sesudah menjadi SGO, yang dalam tahun ini jumlah muridnya telah menjadi 141 orang (118 laki-laki, 23 wanita). Minat memasuki SGO semakin bertambah pada tahun 1980 tercatat sebanyak 373 orang (299 laki-laki, 74 wanita, sedang jumlah

---

46. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 348.

guru tahun 1961 satu orang, tahun 1980 sebanyak 13 orang)<sup>47)</sup> Meningkatnya jumlah siswa di SGO ada kaitannya dengan lapangan kerja sebagaimana halnya dengan SPG, sebab mereka yang tamat di sini bisa diangkat menjadi guru SD.

Usaha untuk memperoleh guru SLTP yang di daerah Aceh dirasakan langka, dibukalah sebuah sekolah yang khusus mempersiapkan tenaga-tenaga guru SLTP menurut kebutuhan yaitu Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (PGSLP Sekolah ini dibuka di Banda Aceh sejak tahun 1956 yang pada waktu itu lamanya belajar 2 tahun, yang menjadi siswanya adalah guru-guru tamatan SGA yang mengajar di SLTP. Mereka yang belajar di sini adalah dalam rangka tugas belajar atau izin belajar, jadi merupakan suatu sekolah tempat menatar guru-guru SLTP. Pada dasarnya sekolah ini dibuka untuk menutupi kebutuhan guru SLTP dan apabila telah mencukupi akan ditutup kembali.<sup>48)</sup>

Kebutuhan guru SLTP dari tahun ke tahun semakin dirasakan tidak cukup, sesuai dengan penambahan SLTP ini yang semakin meningkat. PGSLP kalau dulunya membuka kesempatan kepada guru tamatan SGA, untuk selanjutnya telah diberi kesempatan kepada yang bukan guru (tamatan SMA, SKKA dan lain-lain) untuk belajar di sini dan lama waktu belajarpun telah diubah menjadi satu tahun. Pada PGSLP ini dibuka berbagai jurusan menurut kebutuhan guru SLTP, seperti jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Bumi, Sejarah, Tata Buku, Keterampilan, Makanan dan Rumah Tangga. Jurusan-jurusan ini selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan kurikulum yang berlaku di SLTP.

Perkembangan sekolah-sekolah teknik di daerah ini sangat lambat. Lambatnya perkembangan pendidikan ini disebabkan karena kurangnya minat yang ingin memasuki sekolah ini, disebabkan karena kurangnya tenaga teknis untuk membinanya. Selain itu juga karena kurangnya alat-alat perlengkapan guna memenuhi kebutuhan pelajar dalam melakukan praktikum. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kelangkaan sekolah teknik di Aceh. Pertambahan sekolah teknik baru nampak pada tahun 1957 yaitu dengan dinegerikan 2 buah ST masing-masing di Sigli dan Langsa. Sampai tahun 1957 baru terdapat 3 buah ST dan 1 buah STM di Banda Aceh, yang keadaannya pun berjalan tidak lancar oleh karena sebab-sebab tersebut di atas.<sup>49)</sup> Keadaan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama sampai dengan tahun 1978. Atas swadaya masyarakat Bireun, pada tahun 1979 berhasil dinegerikan sebuah ST di Bireun. Kehadiran ST di Bireun ini sangat dirasakan kebutuhannya lebih-lebih dengan adanya Perusahaan Gas (LNG) yang membutuhkan tenaga teknik di daerah itu.

---

47. Bidang PDG, *op. cit.*, hal. 11-12

48. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 349

49. *Ibid.*, hal. 246.

Apabila pertumbuhan sekolah teknik di daerah Aceh berjalan sangat lambat, demikian pula halnya dengan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang merupakan kelanjutan dari ST. Memang membuka sebuah sekolah Teknik memerlukan banyak persyaratan yang diperlukan di samping harus memiliki peralatan yang cukup guna memenuhi praktek para siswa, juga memerlukan tenaga ahli (guru) yang dapat mempergunakan alat-alat tersebut. Sampai tahun 1968 STM yang terdapat di Aceh hanya 1 di Banda Aceh dengan guru tetapnya 4 orang dan muridnya 243 orang dan sekolah ini sejak didirikan sampai tahun ini masih dipimpin oleh Anwar Bustam.<sup>50</sup> Hal ini dapat dibayangkan untuk seluruh daerah Aceh hanya terdapat sebuah STM dan dengan sendirinya banyak para peminat yang tidak tertampung di sekolah ini, tamatan STM banyak sekali dibutuhkan bagi daerah ini.

Walaupun kebutuhan akan tenaga teknik menengah banyak diperlukan dalam pembangunan khususnya di daerah Aceh, namun penambahan STM sangat terbatas sekali oleh karena faktor-faktor tersebut di atas. Dalam perkembangan selanjutnya sampai tahun 1980 jumlah STM di Aceh terdapat 4 buah yaitu: masing-masing di Banda Aceh, Langa dan Meulaboh. STM di Langa dari sebuah STM Swasta baru dalam Tahun 1974 Meulaboh yang juga dari STM Swasta baru dinegerikan pada tahun 1977 dan STM Bireun yang diresmikan penegeriannya tahun 1980. Jumlah guru yang mengajar di keempat STM ini 93 orang, yang di antaranya terdapat guru non teknik (bahasa Inggris, Indonesia dan lain-lain). Lama belajar di STM 3 tahun dengan jurusan-jurusannya Bangunan Gedung, Bangunan air, Mesin dan Listrik.<sup>51</sup>

Selain keempat STM yang bersifat umum juga terdapat sebuah STM yang bersifat khusus yaitu STM Pertanian di Takengon (Aceh Tengah), yang dibuka atas prakarsa pemerintah daerah setempat dalam tahun 1976. Adapun hal yang mendorong dibukanya SMTP adalah disebabkan Daerah Aceh Tengah merupakan salah satu daerah pertanian yang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Selama ini daerah Aceh Tengah merupakan salah satu daerah pertanian yang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Selama ini daerah Aceh Tengah merupakan daerah penghasil kopi yang terbesar di Aceh dan juga penghasil sayur-sayuran untuk daerah Aceh. Dengan berkembangnya Aceh Utara sebagai daerah industri yang merupakan daerah tetangga Aceh Tengah, kehadiran sekolah ini dibutuhkan agar dapat tercapai mekanisasi di bidang pertanian.<sup>52</sup> Sekolah ini baru dinegerikan tahun 1979 dengan areal tanah yang cukup untuk tempat pembangunan gedung dan tempat praktikum.

Guna meningkatkan ketrampilan bagi kaum wanita dalam alam Indonesia dalam rangka menuju kesejahteraan keluarga, dibukalah sekolah khusus tentang kewanitaan yang terdiri dari dua tingkatan yaitu tingkatan menengah

50. *Ibid.*, hal 347

51. Margono, *Wawancara*

52. *Ibid*

pertama dan atas, yaitu SKKP dan SKKA. Pertumbuhan SKKP di Daerah Aceh telah pernah mencapai kemajuan, di mana sampai tahun 1959 sekolah ini telah terdapat di setiap kabupaten. Jika dilihat dari sudut murid yang ingin memasuki sekolah ini sebenarnya tidak begitu besar dan bahkan di beberapa daerah seperti Tapaktuan hampir tidak ada yang memasukinya. Kurangnya minat untuk memasuki sekolah ini disebabkan karena kurangnya guru yang mengasuh pelajaran dan besarnya biaya yang diperlukan untuk kepentingan praktek.<sup>53</sup> Keadaan ini mulai terjadi sejak tahun 1961 dan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K telah berusaha untuk menghidupkan kembali sekolah ini oleh karena dirasakan ada kepentingannya dalam memajukan kaum wanita. Sampai akhir tahun 1971 jumlah SKKP Negeri di seluruh Daerah Istimewa Aceh sebanyak 10 buah yaitu di Banda Aceh, Sigli, Bireun, Samalanga, Lhokseumawe, Langsa, Kutacane, Tapaktuan, Meulaboh dan Takengon.<sup>54</sup>

Sejak tahun 1975 minat untuk memasuki sekolah ini jadi merosot kembali sebagaimana halnya dengan tahun-tahun 1960. Kemerostotan ini mungkin disebabkan karena untuk melanjutkan ke SKKA (SMKK) sekarang sukar mendapat kesempatan hal ini bisa dimengerti sampai tahun 1976 hanya terdapat 2 SKKA Negeri di Aceh yaitu di Banda Aceh dan Langsa. Selain itu untuk memasuki SKKA tidak hanya diterima dari tamatan SKKP saja, tetapi juga diterima dari SMP, sedangkan yang dari SKKP mereka tidak dapat melanjutkan sekolahnya selain ke SKKA. Di lain pihak minat untuk memasuki SMP tiap tahunnya tidak tertampung dan oleh karena itu diadakanlah integrasi SKKP menjadi SMP Negeri di beberapa tempat. Sedangkan SKKP yang masih banyak peminatnya masih tetap dipertahankan, pengintegrasian ini mulai dijalankan sejak tahun 1979. Sampai tahun 1980 SKKP Negeri yang masih dapat dipertahankan hanya tinggal 6 buah lagi yaitu di Banda Aceh, Sigli, Samalanga, Bireun, Lhokseumawe dan Matang Glumpang Dua.<sup>55</sup> Selebihnya telah diintegrasikan menjadi SMP yaitu di Langsa, Kutacane, Meulaboh, Takengon dan Tapaktuan.

Sejalan dengan perkembangan SKKP, demikian juga halnya dengan SKKA yang sekarang disebut Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), sampai saat ini, SMKK Negeri di Aceh hanya 3 buah yaitu SMKK Banda Aceh, yang didirikan pada tahun 1961 yang pada saat itu masih bernama Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) sudah barang tentu sasaran pendidikannya berbeda dengan SMKK sekarang, di mana SGKP sesungguhnya mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik untuk SKKP. Dengan berubah nama menjadi SKKA yang kemudian diubah lagi menjadi SMKK, sekolah ini diharapkan mempersiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk dapat bekerja sendiri atau bekerja pada perusahaan-perusahaan yang relevan dengan jurusannya.

53. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 339, 345-346

54. Perwakilan Dep. P dan K, Laporan Tahunan Lamp. XXV.

55. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 338.

SMKK Langsa dinegerikan pada tahun 1969 dan Lhokseumawe pada tahun 1977. Dengan demikian SMKK yang terdapat di Aceh sampai tahun 1980 masih sebanyak 3 buah dengan animo murid untuk memasuki sekolah ini tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan SMA.

Pendidikan Ekonomi yang lazimnya diselenggarakan dalam bentuk pendidikan khusus, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi baik tingkat pertama maupun tingkat atas, yang lazim disebut dengan SMEP dan SMEA. Sekolah Menengah Ekonomi yang pertama di Aceh adalah di Sigli pada tahun 1951. Beberapa tahun kemudian didirikan di Banda Aceh (1953), Takengon (1955) dan sampai akhir tahun 1959 SMEP telah berjumlah 10 buah yang berarti untuk setiap Kabupaten telah terdapat sebuah SMEP. Penambahan SMEP ini ada yang merupakan peleburan dari SGB N seperti di Tapaktuan, dan Lhokseumawe. Pada permulaannya minat untuk memasuki SMEP tidak banyak menarik perhatian.<sup>56</sup> Pertumbuhan SMEP sejak tahun 1959 sampai sekarang tidak ada pertambahan dan yang ada hanya usaha untuk menghidupkan sekolah-sekolah yang sudah ada. Hal ini disebabkan kekurangan murid yang ingin memasuki sekolah ini, jika dibandingkan dengan SMP yang setiap tahunnya selalu dapat menampung.

Guna mendapatkan suatu gambaran tentang pembangunan SMEP Negeri di Aceh, pada tahun 1968, jumlah SMEP Negeri sebanyak 10 buah, murid 1.147 orang dengan gurunya sebanyak 72 orang.<sup>57</sup> Pada akhir tahun 1976 jumlah SMEP masih tetap 10 buah, dengan jumlah murid 1.784 orang dan guru 100 orang.<sup>58</sup> Dari angka-angka ini tidak menunjukkan suatu kemajuan yang berarti, jika dibandingkan dengan lulusan SD yang terus meningkat. Kebanyakan mereka yang memasuki SMEP adalah pelamar-pelamar yang tidak tertampung di SMP Negeri, dari pada mereka menganggur atau memasuki sekolah swasta. Sejak tahun 1978 pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan baru terhadap sekolah-sekolah kejuruan tingkat pertama (SMEP dan SKKP) untuk diintegrasikan menjadi SMP secara berangsur-angsur. Pengintegrasian ini tidak semata-mata didasarkan kepada kurangnya peminat yang akan memasuki kedua sekolah ini, tetapi hal lain yang sangat penting adalah penyelenggaraan pendidikan kejuruan tingkat lanjutan pertama dinilai tidak relevan dengan penyediaan tenaga kerja karena usia lulusannya sangat muda.<sup>59</sup> Untuk Daerah Istimewa Aceh kebijaksanaan pemerintah ini telah berjalan bagi kedua jenis sekolah tersebut di mana seluruh SMEP sebanyak 10 buah telah diintegrasikan menjadi SMP Negeri yaitu (SMEP Negeri Banda Aceh, Sigli, Meureudu, Lhokseumawe, Langsa, Kutacane, Blan Pidie, Meulaboh,

---

56. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 338

57. *Ibid.*, hal. 344

58. Kanwil Dep P dan K Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1976*, hal. 120-121.

59. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, masalah Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh, Kertas Kerja pada pekan komunikasi Pelajar/Mahasiswa Aceh se Jawa, di Yogyakarta, 13 April 1980, hal. 5.

Tapaktuan dan Takengon), sedangkan SKKP masih ada yang dipertahankan seperti telah disebutkan di atas.

Selain pendidikan ekonomi tingkat pertama di Aceh terdapat pula SMEA yang merupakan lanjutan SMEP. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa SMEP telah ada sejak tahun 1951, sedangkan SMEA baru ada 6 tahun kemudian yaitu dengan didirikan SMEA Negeri Banda Aceh tahun 1957. Sesudah itu baru menyusul SMEA Negeri lainnya Sigli, Takengon dan Langsa pada tahun 1964 SMEA Negeri Lhokseumawe, Kutacane dan Meulaboh pada tahun 1967.<sup>60</sup> Lambatnya perkembangan SLTA Kejuruan ini adalah karena sangat besarnya biaya yang diperlukan dan sangat sukarnya mencari tenaga pengajar yang berkualifikasi baik untuk sekolah kejuruan terutama STM dan STM Pertanian.<sup>61</sup>

Perkembangan SMEA dapat dikatakan sama halnya dengan SMEP dan tidak menunjukkan suatu grafik yang melonjak dari tahun ke tahun. Perkembangannya sangat lamban dan demikian pula halnya dengan minat para siswa tamatan SMP yang tidak begitu tertarik untuk memasuki SMEA' lain halnya dengan tamatan SMEP, yang dengan sendirinya harus memasuki SMEA. Sebagai suatu gambaran dapat dilihat pada tahun 1968 jumlah SMEA Negeri sudah 8 buah dengan murid sebanyak 1.257 dan gurunya 46 orang.<sup>62</sup> Dalam tahun 1976 SMEA masih tetap 8 buah, murid 1.611 dan guru 80 orang.<sup>63</sup> Pertambahan murid ini tidak begitu menggembirakan jika dibandingkan dengan murid SMP kelas III tahun 1976 sebanyak 6.826 dari 56 buah SMP Negeri ditambah dengan 2.736 orang murid kelas III dari 102 SMP Swasta, ditambah lagi dengan 495 siswa kelas III dari 10 SMEP Negeri. Dari 1.611 orang siswa SMEA Negeri yang menduduki kelas I pada tahun 1968 itu adalah sebanyak 713 orang untuk 8 buah SMEA Negeri.<sup>64</sup>

Demikianlah perkembangan SMEA dari tahun ke tahun selalu tidak menunjukkan suatu kemajuan yang pesat, sesungguhnya tamatan SMEA tidak saja dapat melanjutkan ke perguruan tinggi mereka dapat bekerja sebagai pegawai negeri dan dapat bekerja sendiri dengan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku sekolah.

Selain dari beberapa jenis pendidikan menengah kejuruan seperti yang telah disinggung itu masih ada satu lagi yang perlu kita ketengahkan, walaupun pendidikan ini lebih menyerupai kursus kedinasan yaitu Pegawai Adiministrasi Tingkat Pertama (KPA) dan Kursus Adiministrasi Tingkat Atas (KP-AA). Kedua jenis kursus ini kita masukkan ke dalam pendidikan menengah kejuruan dan penyelenggaraannya bukan bersifat sementara, tetapi sudah merupakan sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah biasa. Kedua jenis

60. Perwakilan Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1970*.

61. Kepala Kantor Wilayah, *loc. cit.*

62. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal. 349-350.

63. Kanwil Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1976*, hal 123.

64. *Ibid.*, hal. 109-124.



kursus ini baik KPA dan KPAA berada langsung di bawah Departemen P dan K, yang di daerah di bawah pengawasan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan. Tujuan pembukaan KPA dan KPAA adalah mendidik dan melatih para pegawai yang bersifat kedinasan dalam rangka pembangunan.<sup>65</sup> Oleh karena itu yang diterima menjadi KPA adalah para pegawai tamatan SD atau mereka yang telah memiliki pangkat sederajat dengan tamatan SD, sedangkan untuk KPAA adalah mereka yang telah menjadi pegawai yang telah memiliki ijazah SMP sederajat dan juga mereka yang pangkatnya sederajat dengan tamatan SMP.

Perkembangan KPA untuk pertama kali dibuka di Banda Aceh pada tahun 1957 dan kemudian dibuka di Takengon pada tahun 1966. Dalam perkembangan selanjutnya KPA sangat tergantung kepada sumber muridnya yang berasal dari pegawai tertentu saja ada tahun-tahun tertentu yang tidak dibuka oleh karena kekurangan pelamar. Sampai saat ini jumlah KPA yang masih terdapat hanya satu buah yaitu di Banda Aceh.

Sebagai tindak lanjut dari KPA dibuka pula KPAA yang mula-mula di Banda Aceh dan Takengon, kemudian dibuka di tempat-tempat lain yaitu di Langsa dan Kutacane. Sampai tahun 1979 jumlah KPAA yang masih terdapat adalah di Banda Aceh Langsa dan Kutacane. Demikianlah beberapa lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu lembaga Pendidikan formal yang bersifat kejuruan tidak saja diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi diselenggarakan pula oleh Departemen-departemen lain, seperti industri, pertanian dan kesehatan. Berikut ini akan dicoba untuk membahas beberapa sekolah menengah kejuruan yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh yang penyelenggaraannya di luar Departemen P dan K.

Salah satu sekolah yang bersifat teknik menengah yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian yang penanganannya sehari-harinya adalah Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Aceh adalah Sekolah Teknik Industri Menengah Atas (STIMA) Sekolah ini merupakan milik pemerintah Daerah yang didirikan pada tahun 1965 dengan surat Keputusan Gubernur Nomor 46/Pend/65 tanggal 30 Nopember 1965. Secara teknis sekolah ini berada langsung di bawah pengawasan pusat pendidikan dan latihan pegawai Departemen Perindustrian.<sup>66</sup> Sekolah ini didirikan atas prakarsa dari beberapa tokoh yang berkecimpung di bidang industri yang dapat kita sebutkan seperti Ir. Ibrahim Abdullah, Ir. Hayatun Nusuf, dan mereka yang sudah pernah belajar di Akademi Industri. Tujuan utama mendirikan sekolah ini adalah untuk mendapatkan kader-kader di bidang industri baik yang akan bekerja di lapang-

---

65.10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hal 339 dan 247.

66. Sukirman, *Wawancara*.

an pemerintah maupun yang akan menjadi kader industri yang dapat bekerja sendiri.<sup>67</sup>

STIMA sejak didirikan telah menaruh minat yang besar dari tamatan SMP maupun SLTP yang sederajat untuk belajar di sekolah ini. Lama belajarnya 3 tahun dengan pelajaran yang diberikan meliputi pelajaran pokok (industri) 60%, penunjang yang terdiri dari pelajaran sosial 25% dan wiraswasta 15%. Sekolah ini pada waktu didirikan sarananya masih sangat sederhana baik gedung maupun peralatan merupakan bantuan dari masyarakat industri yang terdapat di daerah ini. Dalam perkembangannya sampai tahun 1980 telah mendapat bantuan laboratorium dari Departemen Perindustrian, bengkel dari pemerintah Daerah Aceh dan gedung belajar juga dari Departemen Perindustrian. Untuk memimpin sekolah ini telah dipercayakan kepada Ir. Hayatun Nusuf (1965–1970) dan kemudian dilanjutkan oleh Wahidin A. Aziz (1970–sekarang).<sup>68</sup> Kehadiran STIMA, bagi Daerah Istimewa Aceh sungguh diharapkan oleh masyarakat mengingat daerah ini akan dikembangkan industri-industri besar, serta dapat menghidupkan industri kecil yang telah berkembang.

Selain STIMA di daerah Aceh, terdapat pula Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) yang didirikan pada tahun 1970 atas prakarsa Abdullah Ali, Drh. Rusli Yusuf (Kepala Dinas Peternakan Daerah Istimewa Aceh) dan M Nur Majid. Ada pun yang menjadi motivasi dari pendirian sekolah ini adalah atas pertimbangan bahwa daerah Aceh merupakan sumber potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah peternakan. Di samping itu dilihat dari segi kehidupan masyarakat bahwa masyarakat Aceh merupakan masyarakat pertanian yang rata-rata mempunyai ternak walaupun dalam bentuk kecil atau lebih tepat disebut petani peternak, dan satu hal lagi yang cukup penting yang mendorong dibukanya SNAKMA di Aceh adalah Aceh ditetapkan sebagai golongan I di bidang Peternakan.<sup>69</sup> Hal-hal inilah yang mendorong dinas peternakan untuk terus membina sekolah ini. Secara teknis edukatif sekolah ini langsung berada di bawah Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian. SNAKMA Negeri Aceh adalah merupakan salah satu dari tiga buah SNAKMA yang terdapat di seluruh Indonesia, yaitu masing-masing di Aceh, Bogor dan Malang.

Sekolah lain yang juga berada di bawah Departemen Pertanian adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), yang didirikan pada tahun 1970 atas prakarsa Hasbi Hamid (Kepala Dinas Pertanian Daerah Aceh). Kedua jenis sekolah ini memiliki kurikulum pokok yang sama, yang dalam tahun 1975 sekolah ini disebut sekolah Pertanian Pembangunan, yang walaupun masing-masing tetap berdiri sendiri, SPMA statusnya adalah milik pemerintah daerah yang langsung berada di bawah Dinas Pertanian Daerah Aceh.

---

67. *Ibid.*

68. *Ibid.*

69. Imra Jmar, *Wawancara*.

sedangkan SNAKMA langsung berada di bawah Departemen Pertanian. Kedua sekolah ini mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan produktivitas pertanian/peternakan. Mereka yang telah belajar di sekolah ini diharapkan menjadi penyuluh pertanian/peternakan, baik mereka bekerja pada lembaga resmi pemerintah atau pun sebagai petani biasa yang dapat memberikan penyuluhan kepada petani lainnya.<sup>70</sup> SNAKMA sejak didirikan telah memiliki lokasinya di Saree, karena daerah ini masih cukup luas tersedianya padang rumput untuk areal peternakan, iklimnya cocok dan mempunyai ketenangan belajar, karena letaknya yang jauh dari keramaian penduduk. Sejak didirikan telah dipimpin oleh Drh. Rusli Yusuf (1970–1975) dan Drs. Imran Umar (1975–sekarang). Mengenai minat pelajar yang ingin memasuki sekolah ini setiap tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 1970 atau tahun pertama jumlah murid yang belajar di sini hanya 28 orang yang umumnya adalah masyarakat peternak dan pegawai pada dinas peternakan. Jumlah pelamar setiap tahun semakin meningkat yang dalam tahun 1980 yang mendaftar 80 orang, yang karena sarana dan fasilitasnya yang terbatas. Adapun yang mendorong tamatan SMP memasuki sekolah ini besar kaitannya dengan lapangan kerja. Mereka yang telah selesai di kedua sekolah ini seluruhnya dapat ditampung menjadi pegawai pemerintah sebagai tenaga penyuluh, oleh karena lapangan kerja yang cukup luas sesuai dengan sasaran pembangunan nasional bahwa dalam Pelita I, II dan III prioritas pertama adalah pembangunan di sektor pertanian.<sup>71</sup>

#### 4. Pendidikan Tinggi

Dalam suatu upacara besar yang dilaksanakan bertepatan dengan hari nasional peringatan Proklamasi Republik Indonesia yang ke XII (17 Agustus 1958), Wakil Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kyai Haji Ilyas, Panglima Kodam I Aceh Kolonel Syaun Gaharu, Gubernur Aceh A. Hasjmy dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Teungku H.M. Ali Balwi, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, di Darussalam Banda Aceh. Dan pada tanggal 24 Agustus 1958 oleh Menteri P.D. dan K Republik Indonesia Prof. Prijono, melantik panitia yang sudah dibentuk sebelumnya (3 Mei 1958) yaitu panitia persiapan Pendirian Fakultas Ekonomi di Banda Aceh. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1959, Presiden Republik Indonesia Soekarno dengan disaksikan oleh para pembesar negara dari Pemerintah Pusat, pembesar-pembesar daerah, dan beberapa Kepala Perwakilan Asing dari Jakarta, meresmikan pembukaan Kota Pelajar tersebut, yang dilanjutkan pula dengan peresmian Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang dari USU di Medan.

---

70. *Ibid.*

71. *Ibid.*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 11/1961 tanggal 21 Juni 1961, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1961, ditetapkan adanya sebuah Universitas Negeri di Aceh (yang lokasinya di Darussalam). Dan Universitas ini diberi nama Universitas Syiah Kuala, yang diambil dari nama seorang ulama, pujangga dan ahli hukum terkenal di Kerajaan Aceh pada abad ke-17. Peresmian berdirinya Universitas ini juga telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 22 April 1962. Meskipun Surat Keputusan Menteri tersebut bertanggal 21 Juni 1961 dan berlaku tanggal 1 Juli 1961, tetapi dalam surat itu dinyatakan Dies Natalis Universitas Syiah Kuala di tetapkan tanggal 2 September 1959 telah lahir Fakultas Ekonomi yang merupakan Fakultas pertama dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.<sup>72</sup>

Pada saat berdirinya Universitas Syiah Kuala mempunyai empat Fakultas; yaitu Fakultas Ekonomi (berdiri 2 September 1959), Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan (berdiri pada 17 Oktober 1960), Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (berdiri pada 2 September 1961) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (berdiri pada 2 September 1961). Berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 232/63 dan Keputusan Menteri PTIP No. 62 Jo. 161/1963, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terpisah dari Universitas Syiah Kuala dan menjadi Cabang dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Tetapi pada 2 September 1964 dan 2 September 1965, Universitas Syiah Kuala bertambah dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Dan dalam perkembangannya, berdasarkan keputusan Direktur Perguruan Tinggi No. 161 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967 Jo. No. 1 tahun 1968 tanggal 22 Januari 1968, dan instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 2 tahun 1968 yang bertanggal 19 Maret, cabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung tersebut di atas, diintegrasikan kembali dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan dibagi menjadi dua Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan demikian sejak berdirinya hingga sekarang terdapat tujuh Fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pada mula berdirinya, Universitas Syiah Kuala dipimpin oleh yang disebut Presiden Universitas yang dalam segala hal kedudukannya didampingi oleh Senat Universitas atas dasar musyawarah, baik yang bersifat pelaksanaan pendidikan maupun tentang administrasi. Untuk pertama kali jabatan ini dipegang oleh Pejabat Presiden yang dipercayakan kepada Panglima Kodam I Iskandar Muda yang pada waktu itu dipegang oleh Kolonel M. Jasin (sejak 1 Juli 1961—13 Juli 1963). Selanjutnya dengan kepindahan Kol. M. Jasin maka pimpinan Universitas Syiah Kuala (sejak tanggal 2 Agustus 1963) dipegang oleh suatu Presidium yang pada mulanya didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1403/UP/II/65, sejak 11

---

71.10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 124.

Maret 1965 pimpinan Universitas Syiah Kuala dipegang oleh Drs. A. Majid Ibrahim ke Jakarta, maka jabatan Rektor dijabat oleh Drs. Ibrahim Hasan (sekarang Prof DR.) hingga sekarang. Sejak berdirinya hingga tahun 1969, jumlah tenaga pengajar baik yang tetap maupun luar biasa pada Fakultas-Fakultas yang bernaung di bawah Universitas Syiah Kuala adalah sebanyak 184 orang. Dan jumlah mahasiswanya sebanyak 3.960 orang.<sup>73</sup>

Selain Universitas Syiah Kuala pada waktu yang hampir bersamaan, di komplek Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, terdapat pula sebuah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diberi nama IAIN Jamiah Ar-Raniry; juga berasal dari nama seorang ulama besar di Kerajaan Aceh pada abad ke-17. Perintisan ke arah pendirian Institut ini, dimulai pada tahun 1959 dengan dibentuk sebuah panitia Pendirian Fakultas Agama Islam Negeri yang diketuai oleh Kolonel Syamaun Gaharu (pada waktu itu sebagai Panglima Kodam I Aceh) dan wakilnya A. Hasjmy (pada waktu itu sebagai Gubernur Aceh). Panitia ini ditetapkan dengan surat Penetapan Menteri Agama No. 48 tahun 1959 tanggal 1 Nopember 1959. Sebagai hasil kerja panitia ini, dengan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 40 tanggal 12 Agustus 1960, maka pada tanggal 2 September 1960 di Kota Pelajar tersebut dilangsungkan upacara pembukaan Fakultas Syariah yang merupakan cabang dari Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta. Peresmian ini dilakukan oleh Prof. R.H.A. Sunarjo, mewakili Menteri Agama R.I. dan untuk pimpinan Fakultas ini ditunjuk H. Usman Yahya Tiba. Selanjutnya dalam tahun itu juga dibentuk sebuah panitia persiapan Pembukaan Fakultas Tarbiyah Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah cabang Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1960. Panitia ini diketuai oleh Gubernur A. Hasjmy dan wakilnya Kolonel M. Jasin. Sementara itu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy membentuk pula sebuah panitia persiapan Pendirian Fakultas-Fakultas Agama Islam Swasta dengan Surat Keputusan 2 Maret 1962 No. 35/1962. Panitia ini berhasil membuka sebuah Fakultas Usuluddin Swasta yang peresmian Pembukaannya dilakukan pada tanggal 13 Juli 1962 Fakultas ini dipimpin oleh H. Usman Yahya Tiba L.T. dan sekretarisnya Drs. M. Thahir Harun. Pada tahun ini juga, dengan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 72 tahun 1962 tanggal 17 Oktober 1962, dibuka pula Fakultas Tarbiyah, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 15 Desember 1962 di Kota Pelajar mahasiswa Darussalam. Sebagai pimpinan Fakultas ditetapkan Ibrahim Husen M.A. sebagai Pd. Dekan dan Drs. Soufyan Ras sebagai Sekretaris Fakultas. Pada kesempatan pembukaan ini Menteri Agama telah melantik sebuah Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jamiah Ar-Raniry Banda Aceh. Panitia ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 101 tahun 1962 tanggal

---

73. *Ibid.*, h1 136 dan 138.

12 Desember 1962. Panitia ini terdiri dari 3 orang ketua, 6 orang wakil ketua, 2 sekretaris dan 17 Anggota.<sup>74</sup>

Hasil dari pada panitia ini maka pada tanggal 5 Oktober 1963 lahirlah IAIN Jamiah Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 tahun 1963 yang peresmian dilakukan oleh menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri. IAIN Jamiah Ar-Raniry ini merupakan IAIN yang ketiga lahir di Indonesia setelah IAIN Yogyakarta dan Jakarta. Sebagai pd. Rektor yang pertama telah ditetapkan dan dilantik A Hasjmy, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga ketua komisi pencipta Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam. Pada waktu IAIN Jamiah Ar-Raniry diresmikan telah ada tiga Fakultas seperti telah disebutkan di atas. Selanjutnya pada tahun 1968 telah dibuka dan diresmikan Fakultas Dakwah sebagai Fakultas yang keempat dalam lingkungan IAIN Jamiah Ar-Raniry. Di samping keempat buah Fakultas tersebut, IAIN juga mempunyai dua buah Fakultas Cabang di Medan Sumatra Utara yang diresmikan pada bulan Oktober 1968 oleh Menteri Agama K.H.M. Dahlan yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah. Akan tetapi setelah berjalan lima tahun kedua Fakultas ini melepaskan diri dengan IAIN Jamiah Ar-Raniry dan bergabung dengan IAIN Imam Bonjol di Padang Sidempuan.<sup>75</sup> Dengan lahirnya Perguruan Tinggi Agama Swasta di beberapa ibu kota Kabupaten di Aceh, maka dua Fakultas Syariah yaitu Fakultas Syariah PTI. Al Hilal di Sigli berafiliasi ke Fakultas Syariah IAIN Jamiah Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada saat IAIN Jamiah Ar-Raniry diresmikan (5 Oktober 1963), jumlah karyawan seluruhnya adalah 22 orang yaitu sembilan orang tenaga edukatif dan 13 orang tenaga administratif. Pada tahun 1968 jumlah ini meningkat menjadi 73 orang, yang terdiri dari 44 orang tenaga akademis dan 29 orang tenaga administrasi. Dan pada tahun 1973 terdaftar 137 orang karyawan yaitu 52 orang tenaga edukatif yang terdiri dari 34 orang Dosen dan 16 orang Asisten. Pada tahun 1978 jumlah karyawan ini sudah meningkat menjadi 177 orang, 101 di antaranya tenaga edukatif (terdiri dari 84 orang Dosen dan 17 orang asisten), tenaga administrasi berjumlah 46 orang. Adapun jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif kuliah pada tahun 1978 berjumlah 1190 dengan perincian sebagai berikut, Fakultas Syariah 302 orang, Fakultas Tarbiyah 597 orang, Fakultas Usuluddin 108 orang dan Fakultas Dakwah 183 orang.<sup>77</sup>

Selain kedua lembaga pendidikan tinggi pemerintah yang telah disebutkan di atas, di Propinsi Daerah Istimewa Aceh juga terdapat dua buah Akademi, Negeri, yaitu Akademi Administrasi Niaga Negeri (A.A.N.N) dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (A.P.D.N.). Akademi yang tersebut pertama

74. *Ibid.*, h1. 231.

75. *15 Tahun IAIN Jamiah Ar-Raniry*, (Darussalam, Banda Aceh: Panitia Hari Jadi ke XV IAIN Jamiah Ar-Raniry, 1978), hl. 39.

76. *Ibid.*, h1. 40.

77. *Ibid.*, hl. 144.

didirikan pada tanggal 1 Maret 1966, dengan Surat Keputusan Menteri P.D dan K Republik Indonesia No. B.3/Kesy. tanggal 23 September 1966. Tujuan pendirian Akademi ini adalah untuk mencetak kader-kader *middle manager* yang ahli dalam bidang administrasi. Dan diharapkan dari mereka agar dapat memberikan jasa-jasanya dalam pembangunan negara, terutama dalam penyempurnaan administrasi dan aparatur negara. Oleh karenanya program pendidikan yang dilaksanakan pada akademi ini lebih ditekankan pada yang bersifat praktika, teologika, *case studies*, ilmu administrasi, di samping yang bersifat teoritis. Akademi ini direncanakan mempunyai dua jurusan, tetapi karena keterbatasan tenaga dan fasilitas maka yang berjalan hanya jurusan Kesekretariatan. Hingga tahun 1972 jumlah karyawan pada akademi ini sebanyak 15 orang, dengan perincian sebagai berikut, tujuh orang tenaga pengajar tetap/dosen tetap, lima orang perawat tidak tetap dan tiga orang tenaga honorer.<sup>78</sup>

Adapun Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (A.P.D.N.) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1965, tanggal 15 Mei 1965. Pendirian Akademi ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan Pemerintah Daerah dalam rangka mengisi tenaga-tenaga *skil* pada daerah-daerah Kecamatan di Aceh khususnya di Indonesia pada umumnya. Adapun pengelolaan dan pembiayaan dari pada Akademi ini diatur seluruhnya oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh..<sup>79</sup>

## 5. Pendidikan Non Formal

Membahas perkembangan pendidikan tidak saja pendidikan yang bersifat formal, tetapi pendidikan non formal juga memegang peranan penting dalam pemeratakan pendidikan. Pendidikan non formal di dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak lama telah ada, yang merupakan pendidikan luar sekolah dengan istilah yang sering disebut pendidikan masyarakat. Di dalam penanganannya mendapat tempat yang sama dengan usaha penanganan pendidikan formal melalui sekolah. Sejak tahun 1975 di dalam struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sebuah Direktorat Jenderal yang mengurus Pendidikan non formal ini, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga yang mencakup ruang pembinaannya pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan pembinaan olah raga.

Pada permulaan kemerdekaan non formal yang secara khusus, pendidikan masyarakat diarahkan untuk pemberantasan buta huruf, hal ini adalah disebabkan kebanyakan rakyat Indonesia pada masa penjajahan tidak sempat mengecap pendidikan dasar. Di daerah Aceh usaha untuk memberantas buta

78. *Monografi Daerah Pro. Daerah Ist. Aceh*, (Darussalam Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Penelitian Daerah Untuk Bahasa Perencanaan Pembangunan, (Persiapan Pelita II), 1972, hl. 94-95.

79. *Ibid.*

huruf telah dimulai sejak tahun 1950, walaupun keadaannya tidak merata untuk seluruh daerah Pemberantasan buta huruf baru intensif dijalankan setelah adanya komando Gubernur Aceh pada tanggal 2 Pebruari 1962 yang menyatakan jihad terhadap buta huruf.<sup>80</sup> Dengan adanya komando ini di semua tempat di seluruh Aceh dengan giat melakukan pemberantasan buta huruf dengan mengerahkan guru-guru dan pegawai-pegawai memasuki desa-desa melaksanakan program ini. Selain menyelenggarakan pemberantasan buta huruf, dalam rangka peningkatan pendidikan melalui pendidikan non formal ini pada tahun-tahun enam puluhan juga telah dibuka taman perpustakaan rakyat di desa, kursus pendidikan rumah tangga, kursus kerajinan, kursus peternakan dan lain-lain.<sup>81</sup>

Pelaksanaan penanganan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat pada masa itu mengalami banyak hambatan baik yang menyangkut tenaga pelaksana, biaya dan bahan-bahan yang akan disajikan kepada para pengikut kursus. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membentuk Inspeksi Pendidikan Masyarakat di tiap Kabupaten/Kotamadya guna memprogramkan serta melaksanakannya usaha-usaha yang menyangkut pendidikan masyarakat.

Usaha untuk menangani pendidikan non formal ini semakin gigih dilaksanakan setelah pemerintah melakukan usaha pembangunan Nasional secara berencana dan terpadu melalui tahap-tahap pembangunan atau apa yang sering disebut pembangunan lima tahun (PELITA) demi pelita. Sasaran dari pendidikan masyarakat pada khususnya adalah mereka yang tidak mendapat kesempatan belajar di sekolah formal terutama SD, mereka yang putus sekolah, dan mereka yang telah menamatkan sesuatu tingkat sekolah formal tetapi masih memerlukan tambahan melalui pendidikan khusus.<sup>82</sup> Dari sasaran yang hendak dibina dapatlah diketahui bahwa yang menjadi tugas utama adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dari mereka yang tidak pernah bersekolah sehingga memiliki pengetahuan setingkat SD, bagi mereka yang putus sekolah atau yang telah menamatkan sekolah agar mereka dapat menjadi warga masyarakat dengan memiliki pengetahuan ketrampilan khusus yang diberikan sehingga dapat bekerja sendiri.

Jenis-jenis pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Masyarakat secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pendidikan dasar, pendidikan kejuruan keluarga, dan pendidikan kejuruan masyarakat. Tingkat pendidikan dasar sarasannya adalah mereka yang belum pernah menamatkan SD, dengan sendirinya setelah mengikuti kursus tingkat dasar ini mereka telah mempunyai pengetahuan sama dengan mereka yang mengikuti pendidikan formal di SD. Kursus kejuruan kesejahteraan keluarga sarasannya adalah kaum ibu dan dengan mengikuti kursus ini

80. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 351.

81. *ibid.*

82. Djamaluddin Abdullah, *Wawancara.*



telah memiliki pengetahuan yang menyangkut tentang kerumahtanggaan dan pengetahuan tentang kaum ibu pada umumnya. Pendidikan kejuruan masyarakat adalah mereka yang putus sekolah atau yang telah pernah mengikuti pendidikan formal (SD dan SMP), di mana mereka perlu dibekali dengan pengetahuan khusus untuk dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat.<sup>83</sup>

Sesuai dengan tingkatan pendidikan seperti yang telah disebutkan itu, bermacam-macam kursus telah diselenggarakan. Kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) masih diselenggarakan sampai tahun 1973 dari jumlah yang lebih kecil dari kursus-kursus lain. Selain dari PBH yang telah diselenggarakan bermacam-macam bentuk kursus baik untuk tingkat dasar maupun tingkat kejuruan seperti KPP, KSM, KPM, KKW, Pertukangan, Perbengkelan, peternakan, pertanian, ketrampilan khusus, dan lain-lain.<sup>84</sup> Jumlah dari kursus ini telah cukup banyak diselenggarakan di tiap-tiap desa.

Mulai awal tahun 1975 pola pembinaan dan penanganan pendidikan non formal ini telah diubah dari cara mengajar yang biasa di mana guru/pamong menyampaikan sejumlah pengetahuan kepada warga masyarakat atau dengan istilah lain para pamong yang aktif kepada bentuk kelompok belajar sendiri dengan bimbingan para pamong. Dalam metode ini para peserta baik di tingkat dasar atau kejuruan lebih banyak belajar sendiri melalui buku-buku paket seperti "Paket A" dari A1 sampai A100. Paket A1 sampai 10 setingkat dengan pengetahuan SD, dan yang lainnya berupa pengetahuan Kejuruan yang meliputi pertukangan, menjahit, pertanian dan lain-lain. Untuk melaksanakan sesuai dengan program ini terdapatlah jenis-jenis pendidikan yang non formal, yaitu tingkat pendidikan dasar yang disebut Kelompok Belajar Pengetahuan Dasar (KBPD). Untuk tingkat ketrampilan terdapat kejuruan untuk kaum ibu yang disebut Kelompok Belajar Pengetahuan Kesejahteraan Keluarga (KBPKK) dan kejuruan ketrampilan-ketrampilan pertukangan, perbengkelan, bahasa, perkantoran Niaga, Ketrampilan khusus dan lain-lain.<sup>85</sup>

Sejalan dengan pembentukan kelompok belajar yang tersebar di seluruh Daerah, diperlukan pula tenaga pembina yang memadai. Guna memperoleh tenaga pembina dibentuklah kelompok belajar pembina yang merupakan pendidikan peningkatan mutu petugas/pelaksana di masyarakat yaitu Kelompok Belajar Pembina Pengetahuan Dasar (KBPPD), Kelompok Belajar Pembina Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (KBPPKM). Yang mengikuti pendidikan di KBPPD, KBPKK dan KBPPKM ada yang berasal dari petugas-petugas dalam lingkungan pendidikan masyarakat ada pula yang berasal dari peserta KBPD, KBPKK dan KBPKM yang kemudian menjadi *tutor* untuk masing-masing jenis.<sup>86</sup> Sejak tahun 1975 di antara kelompok belajar yang banyak

---

83. *Ibid.*

84. Kegiatan Bidang Pendidikan Masyarakat Kanwil Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh Tahun 1969-1979, Naskah Ketikan.

85. Jamaluddin Abdullah, *loc cit.*

86. *Ibid.*

diselenggarakan adalah KBPD yang sampai dengan tahun 1979 telah berjumlah 903 buah dengan jumlah peserta 22.407 orang, KBPPD 51 buah dengan peserta 963 orang, KBPKK 263 buah dengan peserta 4.759 orang, dan KBPPKK 5 buah dengan peserta 138 orang, Perbengkelan 34 buah dengan peserta 851 orang, ketrampilan khusus 36 buah dengan peserta 959 orang, Per Pertukangan 36 buah dengan pesertanya 856 orang serta kejuruan lainnya dalam jumlah yang kecil.<sup>87</sup>

Guna mencapai sasaran dalam rangka pembinaan non formal melalui pendidikan masyarakat dibentuklah instansi yang merencanakan, melaksanakan serta mengawasinya. Lembaga itu pada tingkat Propinsi disebut Bidang Pendidikan Masyarakat, pada tingkat Kabupaten Seksi Pendidikan Masyarakat. Selain ini masih terdapat sebuah badan lagi yang khusus mengurus pendidikan non formal yaitu Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) yang di Aceh terdapat di Kampung Lubuk (Aceh Besar), Lhokseumawe (Aceh Utara), dan Bambi (PIDIE). Untuk selanjutnya PLPM ini telah diubah namanya menjadi Sanggar kegiatan Belajar (SKB) yang dimulai pada awal tahun 1980 dan telah terdapat di seluruh Kabupaten/Kotamadya.<sup>88</sup>

Selain Bidang Pendidikan Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam lingkungan Departemen P dan K, masih terdapat pula Bidang Pembinaan Generasi Muda (PGM) yang turut menangani pendidikan non formal ini. Sasarannya berbeda dengan Bidang Penmasy. Kalau pendidikan masyarakat mencakup seluruh lapisan masyarakat, seperti telah disebut di atas, sedangkan PGM yang menjadi sasarannya adalah generasi muda. Berbagai bentuk ketrampilan telah dilaksanakan seperti ketrampilan pertukangan kayu, montir radio, bengkel, fotografer dan lain-lain yang semuanya diberikan kepada para pemuda yang putus sekolah. Dengan memberikan ketrampilan seperti ini, pemuda yang tidak lagi belajar di bangku sekolah-sekolah dapat memiliki pengetahuan dasar dalam bidang-bidang yang ia minati. Dengan demikian mereka tidak lagi hidupnya bergantung kepada orang lain dan dengan ketrampilan ini mereka telah dapat bekerja pada lapangan pekerjaan yang tersedia maupun membuka pekerjaan sendiri.<sup>89</sup>

Departemen-departemen lain seperti Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah turut pula menyelenggarakan pendidikan non formal melalui berbagai-bagai bentuk kursus yang telah mereka laksanakan. Departemen Pertanian misalnya mereka melaksanakan kursus penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan, penyuluhan perikanan, dan lain-lain bentuk kursus yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan produksi pertanian. Departemen Tenaga Kerja membuka kursus yang menyangkut dengan lapangan kerja yang tersedia, seperti

---

87. Kegiatan Bidang Pendidikan Masyarakat, *loc. cit.*

88. Jamaluddin Abdullah, *loc. cit.*

89. Hamzah Ibrahim, *Wawancara.*

melalui "mobile unit training." Demikian pula halnya dengan Departemen-departemen lainnya.

## B. PENDIDIKAN SWASTA

Pembinaan masalah pendidikan swasta di Daerah Istimewa Aceh seperti telah disinggung terdahulu, telah memainkan peranan yang penting terutama dalam mempercepat pelayanan akan kebutuhan pendidikan yang tidak mampu dijangkau oleh pemerintah. Selain itu dapat pula disadari bahwa sekolah-sekolah pemerintah barulah dalam tahun-tahun tujuh puluhan menunjukkan suatu jumlah yang agak memadai, namun masih belum mampu untuk menampung semua mereka yang ingin menduduki bangku sekolah. Oleh karena peranan sekolah-sekolah swasta masih tetap memegang peranan penting dalam rangka membantu pemerintah guna pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga masyarakat. Sekolah-sekolah swasta mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi pada dasarnya diusahakan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan ada pula yang diusahakan oleh perorangan. Pada dasarnya ada beberapa golongan sekolah swasta yang berkembang di Indonesia yaitu:

1. Sekolah yang berdasarkan keagamaan
2. Sekolah yang berdasarkan cita-cita masyarakat tertentu.
3. Sekolah yang menganut metoda yang lain sebagai ciri khas.
4. Sekolah yang didirikan berdasarkan pertimbangan sosial, yaitu membuka kesempatan belajar/bersekolah bagi anak-anak masyarakat sekelilingnya.
5. Sekolah yang bersifat komersil.<sup>90</sup>

Jika diperhatikan dari sejarah lahirnya sekolah-sekolah swasta yang terdapat di Aceh dapatlah disebutkan golongan sekolah yang terbanyak adalah golongan yang ke-empat yaitu sekolah yang didirikan berdasarkan pertimbangan sosial untuk memberi kesempatan belajar yang luas kepada warga masyarakat. Beberapa orang tokoh masyarakat yang terdapat pada sesuatu daerah melihat banyak anak warga masyarakat yang tidak dapat tertampung pada sekolah negeri, lalu timbullah ide untuk mendirikan sekolah seperti yang diinginkan oleh warga masyarakat itu. Selain itu sekolah yang didirikan berdasarkan keagamaan menempati urutan kedua, sedangkan golongan sekolah lain hampir tidak terdapat di Aceh. Misalnya sekolah yang berdasarkan cita-cita masyarakat tertentu, sekolah yang menggunakan metoda yang lain dan sekolah yang bersifat komersial ini hampir tidak dijumpai. Yang bersifat komersial lebih banyak kita jumpai pada sekolah/pendidikan non formal seperti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh individu-individu tertentu.

---

90. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen. PDM Dep. P dan K, "Pembinaan Sekolah Swasta 1979-1980," hl. 5.

## 1. Pendidikan Dasar

Membicarakan perkembangan pendidikan swasta yang terdapat di Aceh dalam dua kurun waktu yaitu masa pendudukan Jepang dan masa sesudah Indonesia merdeka mempunyai masalah tersendiri. Pada masa pendudukan Jepang Sekolah-sekolah Dasar dari berbagai jenis peninggalan Belanda dihapuskan dan dijadikan menjadi satu jenis SD, seperti yang telah disebut pada perkembangan pendidikan dasar negeri. Lain halnya dengan pendidikan dasar yang bersifat keagamaan masih tetap diteruskan dan tidak memperoleh peringatan dari Jepang untuk menutupnya. Sekolah Dasar yang bersifat keagamaan ini yang disebut dengan Madrasah yang dalam tahun 1936 jumlah Madrasah yang telah terdaftar seluruhnya sudah berjumlah 92 Madrasah.<sup>91</sup>

Kehidupan Madrasah pada masa pendudukan Jepang ini walaupun dibenarkan berjalan terus namun tidak dapat berjalan dengan lancar seperti sebelumnya, oleh karena beberapa sebab seperti banyak guru yang telah meninggalkan madrasah yang dipaksakan oleh Jepang untuk bekerja pada mereka. Di samping itu adanya campur tangan pemerintah Militerisme Jepang untuk mengawasi dengan cara mengatur rencana pelajaran dan mengadakan pemeriksaan terhadap jalannya madrasah-madrasah tersebut. Badan yang mengawasi madrasah ini disebut Pemeriksaan Sekolah Agama untuk seluruh Aceh (Aceh Syu Syukio Gakko).<sup>92</sup> Walaupun jalannya tidak selancar dahulu, tetapi telah mempunyai arti yang besar bagi perkembangan pendidikan agama selanjutnya yang merupakan modal dalam alam merdeka, oleh karena setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946 seluruh madrasah di serahkan kepada pemerintah untuk dijadikan sekolah negeri.

Pada permulaan kemerdekaan di pelosok daerah yang belum memiliki SD Negeri, masyarakat setempat berusaha untuk mendirikan SD Swasta yang kadang-kadang gedungnya sangat darurat. Usaha mendirikan SD yang berstatus swasta pada masa kemerdekaan dapat digolongkan kepada tiga golongan yaitu:

- a. Sekolah Dasar yang didirikan oleh organisasi-organisasi sosial yang mempunyai program di bidang pendidikan seperti Muhammadiyah dan lain-lain.
- b. Sekolah Dasar yang didirikan oleh masyarakat pada suatu Desa tertentu.
- c. Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Dari ketiga golongan yang mendirikan SD Swasta itu, golongan yang terbanyak mendirikannya adalah golongan kedua, yaitu sekolah yang didirikan oleh masyarakat. Dasar mendirikan SD Swasta oleh masyarakat adalah

91. A. Hasjmy, *op. cit.*, hl. 95<sup>\*</sup>-99.

92. *Ibid.*, hl. 105; Ismail Yakub, "Gambaran Pendidikan di Aceh setelah Perang Aceh-Belanda Sampai Sekarang," dalam Ismail Suni, (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Penerbit Bhartara Karya Aksara, 1980), hl. 361-363.

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar oleh masyarakat pada suatu daerah tertentu, karena pada daerah tersebut tidak terdapat SD Negeri. Untuk itu melalui tokoh-tokoh, masyarakat memikirkan untuk merealisasikan cita-cita mereka dengan mendirikan gedung-gedung tempat belajar dalam bentuk permanen, semi permanen dan terbanyak dalam bentuk darurat, mencari guru serta membiayai kehidupan sekolah tersebut. Jumlah SD yang semacam ini selalu tidak tetap jumlahnya, oleh karena mereka sesudah mendirikannya juga berusaha agar sekolah itu lambat laun dijadikan sekolah negeri. Sesudah dinegerikan beban masyarakat menjadi agak ringan yang walaupun mereka tetap bertanggung jawab dalam memeliharanya. SD-SD yang telah memenuhi syaratnya dinegerikan dan masyarakat di desa lain membangunnnya lagi, oleh karena itu kita tidak dapat mengetahui berapa jumlahnya dengan pasti.

Sekolah Dasar yang didirikan oleh organisasi-organisasi sosial yang mempunyai program di bidang pendidikan seperti Muhammadiyah jumlahnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan SD yang didirikan oleh masyarakat. Demikian pula halnya SD yang didirikan oleh yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Pada umumnya SD yang didirikan oleh kedua badan ini tidak pernah diusulkan untuk mengubah statusnya dari swasta ke negeri, oleh karena mereka memang dengan sengaja telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu lapangan pengabdian mereka. Sekolah-sekolah yang mereka dirikan pada umumnya mengambil lokasi di kota-kota seperti kota Kabupaten dan Kecamatan.

Guna memperoleh suatu gambaran tentang perkembangan pendidikan dasar swasta dapat diambil sebagai perbandingan dari tahun 1975 dan data terakhir tahun 1980. Perkembangan SD Swasta (subsidi, Berbantuan dan Swasta penuh) pada tahun 1975 adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

Kabupaten/Kotamadya	Jumlah SD	Murid
Kotamaday Banda Aceh	9	3.125
Kotamadya Sabang	2	175
Kabupaten Aceh Besar	1	34
Kabupaten Pidie	8	991
Kabupaten Aceh Utara	1	156
Kabupaten Aceh Timur	28	5.913
Kabupaten Aceh Tenggara	27	4.858
Kabupaten Aceh Tengah	3	302
Kabupaten Aceh Barat	2	518
Kabupaten Aceh Selatan	4	663

93. Kanwil Dep. P dan K. Prop. D.I. Aceh, Laporan Tahunan 1975, hal. 51

Jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1971 keadaan SD Swasta adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

Kabupaten/Kotamadya	Jumlah SD Swasta	Jumlah Murid
Banda Aceh	8	2515
Aceh Besar	—	—
Pidie	—	—
Sabang	—	—
Aceh Timur	20	5.195
Aceh Utara	13	2.275
Aceh Tengah	9	614
Aceh Tenggara	28	4.361
Aceh Barat	2	550
Aceh Selatan	6	2.000

Keadaan pendidikan dasar yang disebutkan di atas belum termasuk perkembangan Madrasah Swasta yang juga menyelenggarakan pendidikan dasar. Keadaan perkembangan madrasah Islam subsidi dan swasta pada tahun 1971 adalah 341 buah dengan jumlah murid 19.941 orang murid, yang kemudian pada tahun 1975 keadaan ini menanjak dengan cepat terutama jumlahnya adalah menjadi 318 buah M.I.S dan Madrasah Islam Subsidi dengan jumlah murid 49.031 orang murid.<sup>95</sup>

Berdasarkan kepada angka-angka di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan pendidikan dasar swasta dalam menciptakan kesempatan belajar kepada anak-anak usia SD. Lembaga pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pihak swasta di Daerah Aceh seperti telah dijelaskan terdapat dua bentuk yaitu Sekolah Dasar yang mengikuti kurikulum SD Negeri dan madrasah Islam Swasta yang mengikuti kurikulum M.I.N. Kedua lembaga ini telah memberikan andil yang besar dalam memajukan usaha pendidikan yang masih belum sepenuhnya dijangkau oleh pemerintah.

Perkembangan Sekolah Dasar Swasta sampai tahun 1980 dapat kita lihat seperti berikut: Kotamadya Banda Aceh, jumlah sekolah 8 buah, jumlah murid 2.99 orang; Sabang jumlah sekolah 2 buah dengan murid 245 orang; Aceh Besar, jumlah sekolah 1 buah dan muridnya sebanyak 363 orang; Pidie jumlah sekolah 9 buah, dengan jumlah murid 1.018 orang; Aceh Utara sekolah 6 buah dengan murid 1.134 orang; Aceh Timur, sekolah 25 buah, murid 4.247 orang; Aceh Tengah, sekolah 4 buah, murid 778 orang; Aceh Tenggara, sekolah 28 buah, murid 3.627 orang; Aceh Barat, sekolah 8 buah dengan mu-

94. Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Laporan tahunan 1971, Lamp. B.

95. Bidang Pendidikan Agama Islam, *loc. cit.*

rid 562 orang dan Aceh Selatan 12 buah sekolah dengan muridnya sebanyak 2.999 orang.

Demikianlah perkembangan pendidikan dasar di Daerah Istimewa Aceh secara garis besar sesudah Indonesia merdeka. Pertambahan SD dan MIS dalam masa-masa terakhir ini tidak tumbuh dengan melaju lagi oleh karena sejak tahun 1974 telah dimulai dengan program SD Inpres yang pembangunannya dititik-beratkan ke desa-desa yang belum memiliki SD Negeri. Melalui program SD Inpres ini ingin pencapaian pemerataan di bidang pendidikan serta memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya terutama tingkat pendidikan dasar, dengan tujuan 85% anak usia SD dapat tertampung atau mendapat kesempatan belajar pada tingkat dasar.

## 2. Pendidikan Menengah Umum

Sebagaimana halnya dengan perkembangan pendidikan dasar demikian pula perkembangan pendidikan menengah umum. Pendidikan Dasar dalam setiap tahun baik negeri maupun swasta terus bertambah, maka memerlukan sekolah untuk melanjutkannya. Kalau pada akhir tahun 1960 jumlah SMP Negeri di Aceh sebanyak 7 buah, tentu dapat dibayangkan bahwa SMP itu lokasinya masih terletak di ibu kota Kabupaten.

Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa pertambahan SMP Negeri di Aceh mulanya adalah berasal dari SMP-AMP Swasta yang didirikan atas inisiatif masyarakat guna menampung anak-anak mereka yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Di samping itu seperti SD, demikian pula SMP Swasta ini didirikan oleh masyarakat dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, jika diperhatikan sejarah dari berdirinya dari sekolah-sekolah ini, yaitu usaha masyarakat sepenuhnya, usaha organisasi sosial dan usaha yayasan-yayasan tertentu. Usaha untuk mendirikan sebuah SMP tidak begitu berat jika dibandingkan dengan mendirikan sekolah-sekolah kejuruan, karena sekolah kejuruan selain membutuhkan gedung tempat belajar juga masih dibutuhkan ruang dan alat-alat praktikum. Dalam periode 1945-1959, di Aceh telah terdapat SMP Swasta baik yang didirikan oleh masyarakat, maupun organisasi seperti SMP Muhammadiyah dan SMP PGRI.<sup>96</sup> Di antaranya adalah SMP Muhammadiyah, karena mereka mempunyai gedung tersendiri dan memiliki guru yang cukup.<sup>97</sup>

Perkembangan SMP Swasta ini dari tahun ke tahun semakin pesat sesuai dengan petambahan sekolah dasar, dan Madrasah. Pada tahun 1968 jumlah SMP Swasta telah menjadi sebanyak 38 buah di samping yang telah dinegerikan dan diantaranya 4 SMP Muhammadiyah yang mendapat bantuan di Banda Aceh, Sigli, Takengon dan Langsa.<sup>98</sup> Keadaan ini terus meningkat

96. Dinas P dan K Prop. D.I. Aceh, Laporan Naskah Ketikan tangan, 1980; Bidang Pendidikan Agama Islam, *loc. cit.*

97. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 335-336.

98. *Ibid.*, hl. 344.

yang pada tahun 1971 berjumlah 65 buah dengan murid 4.302 orang yang diasuh oleh 415 orang guru.<sup>99</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa peranan sekolah swasta tetap besar dalam mencukupi usaha pendidikan yang dijalankan pemerintah. Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat bahwa pada tahun 1971 ini jumlah SMP Negeri sebanyak 51 buah dengan jumlah murid seluruhnya 13.724 orang.<sup>100</sup> Hal ini berarti bahwa jumlah murid SMP yang ditampung di SMP Swasta sudah mencapai 25%.

Sejak adanya program SD Inpres yang jumlah SD meningkat hampir dua kali sejak tahun 1974 dengan sendirinya jumlah murid SD semakin bertambah. Pertambahan ini tidak memungkinkan ditampung seluruhnya oleh SLP Negeri dan sebaliknya animo untuk memasuki sekolah lanjutan Pertama lebih banyak yang memilih SMP dibandingkan dengan kejuruan. Untuk ini memerlukan penambahan SMP Swasta yang cukup banyak guna menampung keseluruhan tamatan SD. Pada tahun 1976 jumlah SMP Swasta menjadi 102 buah dengan jumlah murid 2.736 orang,<sup>101</sup> jumlah ini semakin meningkat pada tahun 1979 menjadi 135 buah.<sup>102</sup>

Di samping SMP terdapat pula Madrasah Tsanawiyah Swasta (M.Ts.S) yang berada di bawah pengawasan Departemen Agama dan setingkat dengan SMP. Pertumbuhan M.Ts.S. ini pun dari tahun ke tahun menunjukkan suatu kemajuan dan pada umumnya mereka yang belajar di sini adalah M.I.N dan M.I.S. Keadaan madrasah ini dapat kita lihat perkembangannya adalah pada tahun 1966 Madrasah Tsanawiyah berjumlah 56 buah dengan murid 6.468 orang, tahun 1969 turun menjadi 42 buah, karena pada tahun 1967 sebagian telah dinegerikan dan pada tahun ini jumlah murid mencapai 2.936 orang. Perkembangan sekolah ini semakin turun sampai dengan tahun 1974 yang berjumlah 30 buah dengan murid 1.638 orang. Menurut jumlah ini disebabkan dengan diadakan penegerian bagi madrasah yang telah memenuhi persyaratannya. Sejak tahun 1975 keadaan menjadi berubah karena pada tahun ini jumlah M.Ts.S. menjadi 46 buah dengan murid 4.191 dan sampai tahun 1978 semakin meningkat dan telah menjadi 84 buah, dengan murid 7.619 orang.<sup>103</sup>

Lanjutan Madrasah Tsanawiyah adalah Madrasah Aliyah Negeri ataupun swasta. Jumlah Madrasah Aliyah dan PGA Swasta pada tahun 1966 sebanyak 9 buah dengan murid 360 orang. Seperti halnya Madrasah Tsanawiyah, madrasah Aliyah pun sejak tahun 1977 sudah dinegerikan. Perkembangan selanjutnya tahun 1969 Aliyah tinggal 4 buah dan PGA Swasta pun berjumlah 29 buah, dengan muridnya masing-masing 242 dan 1.246. Tahun 1975 jumlahnya semakin meningkat, Aliyah 8 buah, PGA 39 buah dengan murid

99. Perw. Dep. P dan K Prop. D.I. Aceh, *Laporan Tahunan 1971*.

100. *Ibid.*

101. *Laporan Tahunan 1976*, hl. 111-115.

102. *Laporan Tahunan 1980*.

103. Bidang Pendidikan Agama, *loc. cit.*



526 dan 5.939 orang, sehingga pada tahun 1978 keadaannya telah menjadi 26 Madrasah Aliyah dan 10 buah PGA dengan jumlah muridnya 2.343 dan 1.959 orang.<sup>104</sup> Merosotnya jumlah PGA disebabkan dengan perubahan kebijaksanaan Departemen Agama yaitu pengurangan jumlah PGA yang mulai berlaku sejak tahun 1977.

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai lanjutan dari SMP perkembangannya selalu mengikuti perkembangan SMP. Jumlah SMA baik negeri maupun swasta semakin meningkat oleh karena tidak saja tamatan SMP yang masuknya tetapi juga yang berasal dari Madrasah-Tsanawiyah. SMA Swasta perkembangannya di Aceh dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pada tahun 1968 jumlahnya telah mencapai 11 buah dengan muridnya 835 orang.<sup>105</sup> Pertumbuhannya baik dari segi jumlah dan kualitas semakin bertambah setiap tahun sehingga tahun 1971 menjadi 18 buah dengan murid 1.498 orang. Pada tahun 1971 tinggal 14 buah dengan 1.492 orang, karena sebagiannya sudah dinegerikan, dan terakhir pada tahun 1980 kembali melonjak sehingga telah berjumlah 58 buah.<sup>106</sup> Pertumbuhan SMA Swasta ini demikian meningkat adalah disebabkan banyaknya tamatan SMP yang tidak dapat ditampung di SMA atau SLA Kejuruan Negeri.

### 3. Pendidikan Menengah Kejuruan

Pertumbuhan pendidikan menengah kejuruan di Daerah Istimewa Aceh yang bersifat swasta tidak begitu menggembirakan. Seperti telah disinggung pada perkembangan menengah kejuruan negeri bahwa usaha untuk membangun pendidikan kejuruan ini sangat sukar terutama di desa-desa, selain membutuhkan biaya yang besar untuk membangun gedung dan meubiler dan kesukaran lain yang dihadapinya adalah tenaga-tenaga teknis untuk membina kelanjutan sekolah itu.

Dalam perkembangannya terutama kejuruan tingkat menengah pertama dapat dilihat pada 1968 terdapat 3 buah SMEP dan 6 buah SKKP.<sup>107</sup> Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1971 sudah terdapat 9 buah SKKP, 7 buah ST dan 4 buah SMEP.<sup>108</sup> Minat untuk memasuki ketiga jenis sekolah ini tidak begitu menggairahkan, terutama bagi SMEP dan ST di samping jalannya pelajaran yang tidak teratur, ditambah lagi kekurangan guru yang sesuai dengan jurusan dan tidak kalah pentingnya adalah kekurangan peralatan. Keadaan SKKP lebih baik dari ST karena SKKP masih tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Pada tahun 1975 jumlah SKKP telah bertambah menjadi 12 buah, sedangkan ST dan

---

104. *Ibid.*

105. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 350.

106. *Laporan Tahunan 1971, 1975 dan 1980.*

107. 10 Tahun Darussalam, *op. cit.*, hl. 345.

108. *Laporan Tahunan 1971.*

SMEP tinggal masing-masing 1 dan 2 buah.<sup>109</sup> Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani SLP Kejuruan, bahwa dianggap tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena tamatan sekolah ini masih muda betul usianya untuk dapat bekerja. Padahal sekolah ini diciptakan semata-mata untuk memperoleh tenaga kerja yang terdidik dan trampil. Untuk tahun 1980 tidak ada lagi SMEP dan SKKP yang bukan negeri dan untuk ST masih ada 1 buah lagi.

Sekolah menengah Kejuruan Tingkat Atas keadaannya sama dengan perkembangan tingkat menengah pertama, di mana tidak menunjukkan suatu keadaan yang menggembirakan. Usaha untuk mendirikan sekolah ini memang telah dimulai walaupun dalam keadaan yang tersendat-sendat, yang diusahakan oleh masyarakat sebagian besar telah dijadikan sekolah negeri sedangkan organisasi sosial dan yayasan kurang berminat untuk mendirikan sekolah ini. Sampai tahun 1971 di Aceh 1 buah SKKP Asiyah di Banda Aceh, 1 buah STM Muhammadiyah di Banda Aceh, 1 STM di Langsa yang kemudian telah dinegerikan, 1 buah SPG Yayasan Cut Meutia di Banda Aceh, dan 3 buah KPG.<sup>100</sup> Dalam perkembangannya yang pernah menunjukkan kemajuan yang pesat adalah SPG, di mana pada tahun 1979 sudah mencapai 10 buah dan pada tahun 1980 terpaksa ditiadakan menjadi 4 buah oleh karena pertimbangan sesuai dengan kebutuhan SD tiap tahun. Adapun SPG yang tinggal adalah SPG Subsidi Cut Meutia Banda Aceh, SPG Cut Nyak Dhien Banda Aceh, SPG Harapan Sigli dan SPG PGRI Lhokseumawe.<sup>111</sup> Sekolah Lanjutan Atas Kejuruan lainnya yang masih tinggal sampai tahun 1980 adalah 3 buah STM yaitu STM Muhammadiyah Banda Aceh, STM Persiapan Banda Aceh, 2 buah SMKK yaitu SMKK Aisyiah Banda Aceh, dan SMKK Swasta di Meulaboh,<sup>112</sup>

#### 4. Pendidikan Tinggi

Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang terdapat di Daerah Propinsi Istimewa Aceh dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Fakultas Sosial Politik (SOSPOL)
- b. Institut Teknologi Sabang.
- c. Akademi Dakwah Muhammadiyah Banda Aceh.
- d. Akademi Bahasa Asing (A.B.A)
- e. Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia (A.K.P.I.)

a. Hampir bersamaan dengan waktu pendirian Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh telah berdiri sebuah yayasan yang disebut Yayasan Universitas Islam Aceh, yang diketuai oleh Teungku H. Ainul Mardhiah Ali. Salah satu tujuan yayasan ini adalah untuk mewujudkan suatu lembaga Pendidikan Tinggi (Universitas Islam Aceh). Selanjutnya atas inisiatif pengurus yayasan,

109. *Laporan Tahunan 1975.*

110. *Laporan Tahunan 1971.*

111. *Bidang PDG, op. cit.*, hl 25.

112. *Laporan Tahunan 1980.*

maka pada tahun 1961 berhasil dibuka suatu Fakultas Sosial Politik (SOSPOL) yang Dekan pertamanya dijabat oleh Dr. T. Iskandar (salah seorang anggota Presidium Universitas tersebut). Pada kesempatan kunjungan Presiden Republik Indonesia Sukarno ke Aceh tahun 1962 untuk peresmian Universitas Syiah Kuala, juga dimanfaatkan oleh pengurus yayasan ini untuk peletakan batu pertama pembangunan gedung Universitas Islam Aceh. Tetapi karena sesuatu hal realisasi dari pada pembangunan gedung tersebut belum terlaksana. Pada tahun 1962 Pd. Dekan dari pada Fakultas SOSPOL (Dr. T. Iskandar) diganti oleh Drs. Abidin Hasyim dan jabatan ini dipegang hingga tahun 1975. Karena sesuatu hal pada tahun 1970 Fakultas ini beralih di bawah naungan Yayasan Universitas Iskandar Muda yang dikoordinasi oleh Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (BAPERIS). Dan sejak tahun 1971 nama Fakultas ini berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Oleh karena keberangkatan Drs. Abidin Hasyim studi ke Amerika Serikat maka pada Lembaga Pendidikan ini pada tahun 1975 dipegang oleh Drs. Hasan Ibrahim yang berlangsung hingga sekarang.

b. Institut ini didirikan pada tahun 1969. Tujuannya adalah untuk mendidik pegawai pejabat pemerintah dan anggota masyarakat lainnya untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan ini erat kaitannya dengan kedudukan Sabang sebagai *Free Port*, terutama untuk menyediakan tenaga-tenaga *skill* di bidang Administrasi dan teknik. Pengelolaan dan pembiayaan Institut ini dilakukan oleh KP4BS (suatu Badan yang mengurus Pelabuhan Sabang), selain dari biaya yang diperoleh dari mahasiswa sendiri.

c. Akademi ini merupakan suatu akademi yang dibina oleh organisasi Muhammadiyah cabang Banda Aceh. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendidik kader-kader Muballigh (Pendakwah-pendakwah) yang mampu mengumandangkan ajaran-ajaran Islam kepada penganut-penganut/pemeluk-pemeluknya.<sup>113</sup>

d. Akademi Bahasa Asing (ABA) mulai dibuka di Aceh pada tahun 1971. Pembinaannya adalah Yayasan Harapan Medan cabang Banda Aceh. Pendirian ini semata-mata dimaksudkan untuk mendidik para peminat dan mahasiswa di Daerah Aceh agar dapat menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan memang karena keterbatasan tenaga dan fasilitas jurusan yang dibuka di ABA ini hanya jurusan Bahasa Inggris.

e. Akademi ini didirikan di Banda Aceh pada 22 September 1974, tetapi kuliah-kuliahnya baru berjalan lancar pada Januari 1975. AKPI pada mulanya berada di bawah Lembaga Pendidikan Kepemimpinan Nasional Indonesia (LPKNI) Jakarta, cabang Banda Aceh. Pimpinan Akademi ini pada mulanya dipegang oleh Drs. Syamsuddin Bransah. Dalam perkembangannya Akademi ini pada mulanya berada di bawah naungan Yayasan LPKNI Jakarta

113. Monografi Daerah . . . , *op. cit.*, hal. 96.

cabang Banda Aceh tetapi sejak bulan Mei 1978 hingga sekarang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh. Selain yang disebutkan di atas lembaga pendidikan tinggi Swasta lainnya juga masih terdapat di Takengon, Lhokseumawe (AAN) dan di Langsa (Akademi Perniagaan).<sup>114</sup>

## 5. Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh swasta pada prinsipnya lebih menyerupai suatu usaha yang bersifat komersil. Mereka menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk ketrampilan-ketrampilan khusus melalui kursus-kursus yang hanya berada di bawah pengawasan pemerintah yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini adalah Bidang Pendidikan Masyarakat. Kepada setiap kursus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian negeri yang dilaksanakan oleh Departemen P dan K.<sup>115</sup>

Penyelenggaraan dari pendidikan non formal ini diselenggarakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidangnya masing-masing, yang kepada setiap peserta harus membayar uang praktikum guna untuk membeli bahan masing-masing peserta. Kursus yang dilaksanakan ini memilih lokasi di kota-kota Kabupaten dan ibukota Propinsi, sedang untuk desa-desa jarang sekali mereka selenggarakannya.<sup>116</sup> Bentuk-bentuk dari pendidikan non formal ini yang banyak diselenggarakan adalah kustum atau kursus jahit-menjahit, kursus bahasa Inggris, tata buku (Bond A dan B), Kursus Tata Kcantikan, kursus Menyetir Mobil dan lain-lain.

Disamping itu masih ada lagi bentuk-bentuk latihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi sosial seperti organisasi ibu-ibu (Pertwi. IKKH, BKOW, KCK), mereka menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan untuk anggotanya sendiri. Dharma wanita misalnya menyelenggarakan kursus bekerja sama dengan Departemen P dan K yang diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat.<sup>117</sup>

---

114. *Ibid.*

115. Djamaluddin Abdullah, *op. cit.*

116. *Ibid.*

117. *Ibid.*

## BAB V KESIMPULAN

Pada bagian lalu telah dikemukakan suatu uraian mengenai berbagai masalah yang bertalian dengan sejarah pendidikan di Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan yang meliputi daerah-daerah Tingkat II (kabupaten) di seluruh Aceh. Dalam bab pertama diuraikan mengenai latar budaya masyarakat Aceh serta garis besar perkembangan pendidikan sejak zaman pra-sejarah sampai dengan zaman kemerdekaan. Uraian secara lebih mendetail mengenai pokok-pokok yang telah disebutkan dalam bab pendahuluan itu dikemukakan dalam bab-bab berikutnya, yakni: bab kedua mengenai pendidikan sebelum dan sesudah kedatangan Islam; bab tiga tentang pendidikan pada zaman penjajahan kolonial Belanda dan pendidikan masa pergerakan nasional; dan bab keempat deskripsi mengenai pendidikan pada zaman Jepang dan Kemerdekaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pokok-pokok permasalahannya. Pendidikan informal dan besar kemungkinan juga pendidikan non-formal telah berlangsung di daerah Aceh sejak zaman pra-sejarah sejalan dengan pembentukan aneka ragam budaya etnis di sana. Diperkirakan tidak mustahil pada waktu itu telah terbentuk kelompok-kelompok belajar secara tidak berkala dalam rangka belajar berbagai keterampilan di bidang pertukangan, seperti cara-cara membuat rumah panggung dan perahu-perahu besar untuk mengarungi lautan luas. Pendidikan non-formal di sini tentu dimaksudkan dalam bentuk yang sangat sederhana: tidak dalam ruangan-ruangan khusus yang disediakan, tetapi mungkin di bawah pohon-pohon besar atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk belajar beberapa saat.

Pendidikan formal di daerah Aceh, besar kemungkinan telah mulai tumbuh sejak datangnya pengaruh Hindu dan Budha. Namun sejauh mana penga-

ruh Hindu-Budha di sana sampai sekarang belum ditemukan sumber-sumber yang otentik. Diperkirakan oleh para ahli pengaruh agama tersebut juga besar di daerah Aceh. Sehubungan dengan ini terdapat beberapa tempat/daerah yang dianggap mempunyai indikasi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Hindu-Budha, seperti Indrapuri, Indrapatra, Lamno Daya dan sebagainya. Kalau demikian halnya dapat dipastikan, bahwa sistem pendidikan Hindu-Budha juga telah tumbuh dan berkembang di daerah Aceh, tetapi sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikannya yang pernah didirikan di sana tidak/belum diketemukan. Barangkali sejumlah penggalian kepurbakalaan yang intensif akan berhasil mengungkapkan tabir rahasia sejauh mana sistem pendidikan Hindu-Budha pernah berkembang di daerah Aceh.

Bentuk pendidikan formal di daerah Aceh yang secara meyakinkan telah mulai tumbuh — berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercayai — adalah sejak tersiarnya agama Islam di sana. Namun kapan akan dan di daerah mana bermula lembaga pendidikan Islam itu sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Hal ini erat kaitannya dengan di daerah mana mula pertama agama Islam itu bertapak, sebab antara penyiaran Islam dan pendidikan Islam adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan permulaan bertapaknya Islam di daerah Aceh, ada yang berpendapat di Peureulak (awal abad ke-9), ada pula di Samudra-Pasei dan daerah Aceh Besar (awal abad ke-13). Tetapi suatu hal yang dapat dipastikan, bahwa selama abad ke-14 dan awal abad ke-15 Samudra-Pasei merupakan pusat studi Islam tidak saja di Indonesia bahkan juga di Asia Tenggara. Kemudian sejak awal abad ke-17 pusat studi Islam itu berpindah ke ibukota Kerajaan Aceh Darussalam: Bandar Aceh Darussalam (sekarang Banda Aceh).

Adapun jenjang pendidikan Islam yang berkembang di Aceh pada waktu itu, diawali dengan pendidikan dasar di *rumoh* (bagi anak-anak wanita dan kadang-kadang juga anak-anak laki), *Deyah* (bari wanita di daerah tertentu) dan *Meunasah* (khusus bagi anak-anak laki-laki). Yang bertindak sebagai pengajar di lembaga ini digelar masing-masing dengan *Teungku Di Rumoh* dan *Teungku Meunasah*. Kemudian untuk pendidikan menengah didirikan pula lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama *Ranggang*, sedang gurunya disini digelar dengan *Teungku Di Ranggang*. Selanjutnya lembaga pendidikan tinggi dikenal dengan nama *Dayah* dan *Dayah Teungku Chiek*. Ulama yang mengajar di lembaga ini digelar dengan *Teungku Chiek*. Suatu hal yang menarik adalah pada umumnya lembaga pendidikan ranggang ada dalam lingkungan lembaga dayah dan yang bertindak sebagai teungku di ranggang ialah para pelajar yang sedang belajar di dayah. Perlu juga ditegaskan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan dayah didirikan atas inisiatif seorang ulama (teungku chiek) dengan bantuan penduduk dan/atau penguasa setempat.

Sehubungan dengan isi pendidikan yang diajarkan, pada dasarnya ditujukan/diarahkan kepada berbagai cabang ilmu Islam. Disiplin yang sekarang dikenal dengan istilah ilmu umum, seperti fisika, biologi, ekonomi dan

lain-lain belum dikenal pada waktu itu. Namun yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum tersebut seperti kimia, ketabiban, sejarah, ilmu bintang dan lain-lain juga diperkenalkan, terutama pada tingkat dayah teungku chiek. Pada tingkat dasar diperkenalkan dengan pokok-pokok *arkanul iman* dan *arkanul Islam* yang diperlukan seorang muslim dalam ibadah sehari-hari; pada tingkat rangkang dipelajari berbagai cabang ilmu Islam, seperti ilmu fiqh, ilmu hadist, ilmu tafsir dan lain-lain dalam bahasa *Jawoe* (Melayu) dan tingkat permulaan bahasa Arab. Pada tingkat dayah baru diajarkan ilmu-ilmu tersebut dalam bahasa aslinya (Arab) ditambah dengan cabang-cabang ilmu lain, terutama tasawuf.

Perlu juga dikemukakan, bahwa sistem pendidikan Islam yang dikembangkan itu adalah sistem pendidikan tradisional; jadi tidak sistem klasikal. Sistem pendidikan tradisional ini selama pertumbuhan dan perkembangannya telah sanggup mencetak ulama-ulama besar yang tersebar di seluruh Aceh; sebagian di antara mereka, bahkan meninggalkan karya-karya besar yang telah turut memperkaya khasanah perpustakaan kita dan menjadi bahan studi bagi para intelektual, baik di Timur maupun di Barat. Rupanya sistem pendidikan tradisional tersebut sampai abad 20 ini masih dapat bertahan dan hidup berdampingan dengan sistem pendidikan Islam yang modern (berupa madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang mulai tumbuh sejak permulaan abad ke-20).

Sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan oleh Belanda kepada masyarakat Aceh baru pada permulaan abad ke-20. Saat peperangan antara rakyat Aceh dengan pihak Belanda masih berlangsung. Karena pada taraf awal pendidikan ini belum terorganisasi secara baik. Mereka yang pertama kali terlibat dengannya adalah golongan uleebalang yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Ini memang disengaja oleh pihak Belanda, karena seperti pada beberapa daerah lain di Indonesia, Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan adat atau golongan bangsawan setempat yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan uleebalang. Sejalan dengan kepentingannya, Belanda menginginkan para uleebalang memiliki ukuran-ukuran Barat dengan memberikan sekedar pendidikan kepada mereka, agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi Belanda di Aceh. Selain itu dengan memperkenalkan pendidikan Barat kepada masyarakat Aceh, pihak Belanda mengharapkan akan dapat mengendalikan atau mengurangi pengaruh dari pemimpin agama (para ulama), sehingga mereka yang mendapat pendidikan ini akan jauh atau terpisah dari masyarakatnya dan tidak lagi mengikuti seruan-seruan para pemimpin agama untuk berperang melawan Belanda.

Pada mula diperkenalkan sistem pendidikan ini, timbul berbagai reaksi dari masyarakat Aceh, baik dari pihak pemimpin agama maupun dari para uleebalang yang tidak setuju dengan hadirnya sekolah-sekolah Belanda di Aceh. Selain itu pada pihak Belanda sendiri juga mengalami berbagai masalah.

Terutama yang menyangkut dengan masalah pelaksanaan dan kelangsungan sistem pendidikan mereka di Aceh. Misalnya tentang masalah pengadaan guru-guru, masalah gedung sekolah, masalah bahasa pengantar dan yang terutama masalah keengganan para orang tua murid untuk mengirimkan anak-anak mereka memasuki sekolah-sekolah buatan Belanda. Berbagai jalan ditempuh oleh Belanda untuk kelancaran sistem pendidikan ini. Termasuk dengan pemaksaan kepada orang-orang tua murid melalui para uleebalang dan kontrolur. Maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Barat di Aceh pada mulanya tidak tumbuh secara wajar, tetapi dipaksakan.

Adapun jenis-jenis pendidikan yang diusahakan oleh pemerintah Belanda yang terdapat di Aceh dapat disebutkan sebagai berikut: *Volkschool, Vervolgschool, Meisjesschool, De 2de School, Inlandsche School, Europeesche Lagere School, Hollandsch Inlandsche School, Hollandsch Chinesche School, Hollandsch Ambonsche School, Ambahtschool, Ambacht Leergang, Weefschool, Normaal Cursus, Landbouwschool, dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* MULO).

Salah satu akibat adanya pendidikan Barat di Aceh, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh, yaitu mereka yang telah dididik dan dibina dengan kebudayaan dan sistem nilai Belanda. Oleh karena sebagian mereka yang pernah mengecap pendidikan ini telah membebaskan diri dari sebagian nilai-nilai tradisional dan ada yang menjadi pendukung sistem pendidikan itu. Tetapi tidak semua dari mereka berhasil diperalat oleh Belanda dan dipisahkan dari masyarakatnya. Karena sebagian dari mereka yang pernah dididik dengan pendidikan Belanda ini malah muncul sebagai cendekiawan yang tetap dekat dan setia dengan rakyatnya, bahkan di antara mereka ada yang menjadi sebagai pembangkit kesadaran nasional dan pembangkit perjuangan kemerdekaan di Aceh. Berdirinya berbagai organisasi pergerakan nasional di Aceh yang pada umumnya dipimpin oleh mereka yang pernah mendapat pendidikan Belanda merupakan bukti tentang hal itu. Dan juga membuktikan bahwa mereka tetap aktif memperjuangkan nasib rakyatnya melalui organisasi-organisasi tersebut.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa akibat adanya diskriminasi dalam penerimaan murid-murid untuk sekolah-sekolah Belanda, telah mendorong pula kelompok lain dalam masyarakat Aceh untuk membuka sekolah-sekolah sendiri ataupun berusaha memodernisasi sistem pendidikan yang telah mereka miliki; yaitu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional ke sistem madrasah yang modern. Dan yang tersebut terakhir ini sebagiannya dapat dikategorikan sebagai pendidikan pergerakan nasional. Karena lembaga-lembaga ini merupakan antitesis terhadap lembaga-lembaga pendidikan Belanda.

Munculnya lembaga-lembaga pendidikan pergerakan nasional di Aceh dalam wujud-wujud madrasah, dapat pula dilihat dalam hubungan akibat masuknya pengaruh modernisme Islam ke Indonesia pada perempatan pertama



abad ke-20. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan ini, dalam perkembangannya telah melahirkan pula sekelompok cendekiawan agama yang modernis. Mereka kemudian berperan dominan dalam masyarakatnya dan umumnya menjadi pendukung utama dari sistem pendidikan pergerakan nasional di Aceh.

Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan ini puncak peningkatannya terjadi pada tahun tiga puluhan. Sehingga periode itu dapat disebutkan sebagai masa pembangunan sekolah-sekolah agama (madrasah-madrasah) di Aceh. Adapun jumlah sekolah-sekolah ini dengan segala tingkatannya di seluruh Aceh pada periode itu melebihi dari seratus buah.

Pada zaman Jepang sistem pendidikan di daerah Aceh diarahkan kepada sistem pendidikan kemiliteran. Dapat disebutkan bahwa situasi pendidikan pada periode itu mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun pendidikan tradisional dan madrasah-madrasah masih diberi kesempatan untuk tetap hidup meskipun dengan pengawasan yang ketat dari pihak Jepang. Suatu hasil positif pendidikan pada zaman Jepang di Aceh adalah lahirnya kader-kader pejuang yang memiliki ketrampilan di bidang kemiliteran.

Pendidikan selama zaman kemerdekaan yang menganut sistem pendidikan nasional dalam pertumbuhan dan perkembangannya dapat dikelompokkan dalam tiga periode, yakni: 1. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950); perkembangan pendidikan pada masa ini tidak mendapat prioritas utama disebabkan rakyat lebih mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagaimana mempertahankan kemerdekaan. 2. Periode demokrasi parlementer (1950-1959); pada masa ini mulai dipikirkan dan direncanakan pembangunan dalam bidang pendidikan. Namun akibat dari pada situasi keamanan yang tidak stabil (timbulnya gerakan DI-TII), maka menyebabkan rencana tersebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya. 3. Periode Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1959-sekarang); masa ini merupakan masa pembangunan pendidikan di daerah Aceh. Titik tolak pembangunannya dimulai pada tanggal 2 September 1959, dengan ditetapkannya sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh. Dalam periode inilah mulai didirikan beberapa perguruan tinggi di samping sekolah-sekolah dasar dan menengah yang tersebar di seluruh pelosok Aceh.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Sumber Arsip dan Laporan-laporan yang diterbitkan

- Aken, A. Ph., *Memorie van Overgave, Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*, Pebruari 1936, *Mailr.* 504/36
- Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie 1907–1934.*
- Beberapa Catatan singkatan Kepala Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh (Drs. Idris Adamy) dari tahun 1964 s/d 1979 sebagai lampiran Serah-Terima Jabatan tanggal 24 Oktober 1979*, Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1979.
- Data Statistik Sekolah/Madrasah dalam lingkungan kegiatan Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Dep. Agama Daerah Istimewa Aceh*, Naskah ketikan, 1978.
- Kegiatan Bidang Pendidikan Masyarakat Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1969-1979*, naskah ketikan, 1980.
- Koloniaal Verslag*, 1900–1933.
- Laporan Tahunan 1970*, Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- Laporan tahunan 1971*, -----
- Laporan tahunan 1976*, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Aceh.
- Laporan tahunan 1977*, -----
- Laporan tengah tahunan 1979*, -----
- Laporan tahunan 1979*, -----
- Laporan tahunan 1980*, -----
- Maier, C.E., (Ass. resident), *Memorie van Overgave van de Afdeeling Groot-Atjeh*, 1935.
- Mailr.* 688/1900.

*Mailr.* 545/09.

*Mailr.* 1613/10.

*Mailr.* 143x/29.

Philips, A.H., Memorie van Overage van Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, 31 Mei 1932, *Mailr.* 1624/32.

*Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* 1932-1938.

Stukken van de adviseur voor Oosterse Talen on Mohammedaans Recht C. Snouck Hurgronje, 1891-1908, betreffende de religieus-politieke toestanden in Atjeh, *Kernpapieren*, No. 410, KITLV, Leiden.

Verslag betreffende het Volksonderwijs in het gewest Atjeh on Onderhorigheden, VB. 1-2-'21 - 87, *Mailr.* 3225/20.

*Verslag Pertemoean Oelama-Oelama di Atjeh*, Sungai Limpah: Oktober 1936. Volkstelling 1930, Vol. IV: *Inheemsche Bevolking van Sumatra*, Batavia, 1935.

Wal. S.L. van der (ed), *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indie 1900-1940*, Groningen: 1963.

## 2. Surat kabar.

*De Deli Courant*, Medan 1932 - 1934.

*De Java Bode*, Batavia 1932 - 1933.

*Sinar Atjeh*, Kutardaja.1908

## 3. Thesis yang belum diterbitkan

Dahlan Hasan, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Suatu Studi tentang Peranan PUSA dalam Pendidikan dan Pergerakan Nasional di Aceh*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Unsyiah, Darussalam, 1977.

Djamaluddin Abdullah, *Pergerakan Muhammadiyah di Aceh*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Unsyiah, Darussalam, 1974;

Isa Sulaiman, M. *Beberapa Aspek Pengaruh Pesantren Darussalam Labuhan Haji terhadap Perkembangan Keagamaan di Aceh Selatan, 1945-1975*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Unsyiah, Darussalam, 1977.

Thamrin Z. M., *Pengaruh Pendidikan Islam pada Rakyat Aceh dalam Menentang Penjajahan Belanda*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Unsyiah, Darussalam, 1975.

## 4. Buku dan Artikel

Abdullah Ujong Rimba, Tgk. Haji, *Ilmu Tharikat dan Hakikat*, Banda Aceh: tanpa penerbit, Rabi'ul Awal, 1395 H.

Adnan Abdullah, "Sekolah Desa", *Santunan*, No. 13, 1977.

Alfian (ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1977.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, "Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Aceh", *Monographs of the Malaysia Branch* Printed Limited, 1966.

- Batuttah, Ibnu, *Travel in Asia and Africa*, terjemahan H.A.R. Gibb, London: George Routledge & Son Ltd.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942–1945*, The Hague: 1958.
- Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, *Memperkenalkan Bidang Pendidikan Dasar dan Guru*, Banda Aceh: Kanwil P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980.
- Broesma, R., *Atjeh Als Land voor Handel en Bedrijf*, Utrecht: Gebrs. Cohen, 1925.
- Brugmans, I.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*, Groningen: 1938.
- C.L., "Meisjesscholen op Atjeh", *TBB* 48, 1915, hal. 140-142.
- C.L., "School on Huwelijk op Atjeh", *TBB* (1915), hal. 306–309.
- Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep. P dan K, *Pembinaan Sekolah Swasta 1979–1980*, Jakarta: 1980.
- Delliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1980–1942*, Singapore-Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- Drewes, G.W.J., De Herkomst van Nuruddin ar-Raniri, *BKI* 111, 1955.
- Du Croo, M.H. en H.J. Schmidt, *Generaal Swart Pacificator van Atjeh*, Maastricht: N.V. Leiter-Nypels, 1943.
- Daudy A., "Syekh Nuruddin ar-Raniry", *Sinar Darussalam*, No. 88 dan No. 89, Darussalam: 1978.
- Gerlach, A.J.A., *Atjeh en de Atjinizen*, Arnhen: 1873.
- Ghazali, H.A., *Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy*, Jakarta: Socialia, 1978.
- Hamidy, UU., "Islamisasi Melalui Hikayat Aceh", *Sinar Darussalam*, No. 65, Desember/Januari, 1975/1976.
- , "Kebijaksanaan Mempergunakan Hikayat dalam Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh," *Prasaran* pada Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Kuala Simpang, 25–30 September 1980.
- Hasjmy, A., *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- , "Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah", *Sinar Darussalam*, No. 63, Agustus/September 1975.
- , "Srikandi Teungku Fakinah", *Sinar Darussalam*, No. 66, Pebruari 1976.
- Hurgronje, *De Atjeher*, Leiden: E.J. Brill, 1893.
- Husein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens de Geschiedenis van het Sultanaat van Atjeh", *BTLV*, 65, 1911.
- , *Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek*, Batavia,: Landsdrukkerij, 1934.

- Ibrahim Alfian, T., "Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah", *Dewan Bahasa*, Jilid XVI, Kuala Lumpur: 1972.
- , "Mengenal Masyarakat Aceh yang Sedang Membangun: Sebuah Catatan", *Bulletin Yaperna*, No. 7 Juni 1975.
- I. Djumhur dan H. Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan*, Bandung-Jakarta: Tjerdas, 1971.
- Isa Sulaiman, M. dan Zakaria Ahmad, "Peranan Meunasah sebagai Pusat Pendidikan di Aceh (suatu studi permulaan)", *kertas kerja*, diskusi dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, Banda Aceh, 28 Agustus 1980.
- Iskandar, T., "Aceh dalam Lintasan Sejarah" suatu tinjauan Kebudayaan, *Prasaran* PKA II, Banda Aceh: Panitia Pusat Pekan Kebudayaan Aceh II, 1972.
- Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara, 1980.
- Ismuha, H., "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 Tahun Yang Lalu," *Sinar Darussalam*, No. 14 dan 15; 1969.
- , "Proses Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh", *Santunan*, No. 20, 1978.
- , "Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh," *paper* dalam Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh, Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Aceh, 1978.
- Jajasan Pembinaan Darussalam, *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Darussalam-Banda Aceh: 1969.
- Jongejans, J., *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu*, Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939.
- Jacobs, Julius, *Het Familie en Kampong leven op Groot Atjeh*, Leiden: E.J. Brill, 1904.
- Junus Djamil, M., *Riwajat Hidup Waliyu'l-Mulki Sjech Abdu'l Rauf bin Ali (Syiah Kuala)*, Banda Aceh: diperbanyak oleh Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, 1975.
- Kanwil Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, "Masalah Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh", *Kertas Kerja Kepala Kantor Wilayah* pada Pekan Komunikasi Pelajar/Mahasiswa Aceh se Jawa di Yogyakarta, 19 April 1980.
- Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*, Jakarta: 1953.
- Kreemer, J., *Atjeh*, jilid I—II, Leiden: E.J. Brill, 1923.
- Kusmiati, Tjoet Nyak, "Manusia dan Kebudayaan Aceh Menjelang Kedatangan Islam", *Prasaran* pada Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Kuala Simpang, 25—30 September 1980.
- Langen, K.F.H. van, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat", *BKJ* 37 (1888).

- Langhout, J., *Economische Staatkunde in Atjeh*, Den Haag: W.P. van Stoc-kum & zoon, 1923.
- Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, *Kumpulan Kertas Kerja Seminar Seja-rah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*, Banda Aceh' 1978.
- , *Kesimpulan Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*, Rantau-Kuala Simpang, 25-30 September 1980.
- Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abd*, Medan: Penerbit Pengarang sendi-ri, 1961.
- Muhammad Ibrahim, *Benteng Batee Iliék dalam Perang Atjeh Belanda, Suatu Tinjauan dalam hubungan dengan Sejarah Pertahanan dan Pendidikan Rakyat Atjeh*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Unsyiah, Darussalam 1970.
- , (Ketua), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, De-partemen P dan K, Banda Aceh: 1977/78.
- , (Ketua), *Sejarah Kebangkitan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, Dep. P dan K: 1978/1979.
- , dan Rusdi Sufi, "Sekelumit Pendapat tentang Proses Islamisasi dan Munculnya Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh," *Santunan*, No. 49, 50, 51 dan 52, Banda Aceh: Nopember, Desember 1980, Januari dan Pe-bruari 1981.
- Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pusta-ka, 1977.
- Nuruddin ar-Raniri, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T. Iskandar, Kuala Lum-pur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, *Risalah Seminar Se-djarah Masuknya Islam ke Indonesia*, Medan: 1963.
- Panitia Hari Jadi ke XV IAIN Jami'ah Ar-Raniri, *15 Tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniri*, Darussalam-Banda Aceh: 1978.
- Piekaar, A.J., *Atjeh en de Oorlog met Japan*, The Hague: van Hoeve, 1949.
- Reid, Anthony, *The Contest for North Sumatra, Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969.
- Siegel, James T., *The Rope of God*, Berkeley: University of California Press, 1969.
- Sulaiman Jalil, Tgk., "Peranan Meunasah sebagai Pusat Pendidikan Desa di Aceh," *Kertas Kerja* Diskusi dalam rangka Peringatan Hari Aksara Inter-nasional di Banda Aceh, 28 Agustus 1980.
- , Staal, J., "De Misigit Raija in Atjeh", *De Indische Gids*, 1882.
- Syamsuddin, T., *Adat Istiadat Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, Depar-temen P dan K, 1977/1978.

- Talsya, T. Alibasyah, *10 Tahun Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh*: Pustaka Putroe Tjanden, 1969.
- Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires, Vol. I*, translated and edited by Annando Cortesao, Printed for the Hakluyt-Society, London, 1944.
- Universitas Syiah Kuala, *Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Darussalam-Banda Aceh: 1972.
- Vorheul, A., "De Meunasah in Pase", *TBG*, LXVII, 1927, 387-434.
- Zainuddin, H.M., *Bungong Rampoe*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965.
- , *Srikandi Atjeh*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Penerbit Monora, 1972.
- , (Keua), *Permainan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek IDKD Departemen P dan K, 1979/1980.

## DAFTAR INFORMAN

**Abdullah Ojong Rimba, Tgk.H.:** lahir pada bulan Maulid 1328 H di Ujong Rimba (Kab. Pidie); jabatan sekarang Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh dan Anggota MPR-RI. Pernah belajar di Dayah Ie Leubeue Meunasah Blang (Pidie, 1336 H) dan Dayah Lamsi (Aceh Besar, tahun 1341). Jabatan yang pernah dipangku, antara lain, Ketua Mahkamah Syariah Propinsi Aceh (1960) dan tahun 1348 H sebagai pembangun Taman Jama'ah Daniyah.

**Ali Hasjmy, Prof.:** lahir 26 Maret 1914 di Montasik (Aceh Besar); jabatan sekarang Rektor IAIN Jami'ah Ar-Raniri. Selama zaman Kebangkitan Nasional aktif berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya, seperti dalam Himpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII) di Padang Panjang (1932-1935), Partai Politik Permi, PUSA/Pemuda PUSA dan lain-lain. Demikian juga selama Revolusi Kemerdekaan, disamping menduduki berbagai jabatan dalam Badan Pemerintahan RI, juga aktif, sebagai Ketua Pesindo, menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1957 sampai tahun 1964 diangkat menjadi Gubernur Aceh, di samping berbagai jabatan lain yang dipangkunya selama waktu itu.

**Ali Keureukon, T.:** pensiunan, bekas Anggota BPH Daerah Aceh.

**Amir Husin Al-Mujahid, Tgk.:** lahir tahun 1901 di Idi (Aceh Timur), bekas Ketua Pemuda PUSA Atjeh, Guru Madrasah Diniyah di Idi, selama Revolusi Kemerdekaan, Staf Umum TRI Komandemen Sumatera, di samping beberapa jabatan lain selama waktu itu.



- A. Muthalib**, lahir tahun 1916 di Julok (Aceh Timur); aktif dalam Pemuda PUSA, Masumi dan Muhammadiyah.
- A. Rani, Tgk**; umur 73 tahun; pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara.
- A. Rasid, H.** lahir di Karang Waru, 17-12-1927; bekas anggota BPH Aceh Timur dan Camat Kuala Simpang, menerima pendidikan, antara lain di Vervolgschool dan Diniyah.
- Djamaluddin Abdullah, Drs.**; jabatan sekarang Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Kanwil Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga sebagai Ketua I PGRI Daerah Aceh.
- Djohan, T**; umur 50 tahun, bekerja pada sekretariat DPRD Kotamadya Banda Aceh.
- Ghazali Yahya, Tgk.**; lahir tahun 1918 di Samadua; pendidikan, Inlandsche School dan perguruan Al-Muslim Matang Geulumpang Dua; pensiunan Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Selatan, aktif dalam Masyumi dan NU.
- Hamzah Ibrahim, H.M.**; Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga sebagai Ketua PGRI Daerah Aceh.
- Hasan Syah, T.**; lahir tahun 1928; tempat tinggal Lhok Seumawe, sekarang anggota MPR-RI, selama Revolusi aktif dalam Pesindo.
- Ibrahim Abduh**, lahir tahun 1917 di Ulim; bekas Bupati Kabupaten Pidie, aktif dalam Pemuda PUSA dan Mujahidin, pernah belajar di Madrasah Sa'adah Abadiyah Sigli dan Normal Islam yang didirikan oleh PUSA di Bireun.
- Imran Umar, Drs.**, jabatan sekarang Kepala Sekolah Menengah Kehewanan Saree-Aceh.
- Ismail Arif**, lahir 7 April 1914 di Kuala Simpang; pendidikan, Inlandschool di Kuala Simpang dan Tsanawiyah di T. Pura; aktif dalam Jamiatul Khairiyah dan guru pada Madrasah Jamiatul Khairiyah Kuala Simpang; dan pernah menjadi anggota DPRD Propinsi Aceh (1957-1959).
- Ismail Usman, H.**: lahir tahun 1920 di Simpang Ulim; pernah menjadi guru pada HIS Muhammadiyah Langsa (1940).
- Kamaruzzaman Ibrahim**, Kepala Sub. Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Kanwil Dep P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Mahmud Harun, Tgk.**, lahir tahun 1919 di Damar Putih; pensiunan Bupati sejak tahun 1971; pernah belajar di Madrasah Ahlussunnah wal Jama'ah Idi dan Madrasah Jadam Motasik.
- Margono**, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Marzuki Abubakar**; Bireun; ex. anggota DPRD Aceh dan anggota Taman Siswa Bireun.
- Muh. Arief Amiruddin**, lahir di Takengon, 26 Nopember 1926; ex. Komando Batalyon IV Resimen III Divisi Rencong Pesindo Aceh Tengah (Selama Revolusi Kemerdekaan) dan pernah menjadi Kepala Japenkab Aceh Tengah Takengon.
- Muhammad Basyah**, lahir tahun 1918 di Idi; jabatan sekarang Guru PGA Langsa; ex. Wartawan Atjeh Sinbun (masa Jepang) dan wartawan Semangat Merdeka (masa Revolusi Kemerdekaan). Pernah menjadi guru di Perguruan Islam Seulimuen (1942–1945) dan Kepala Madmi Idi (1945–1946).
- Muhammad Hasan, Mr. T.**, lahir 4 April 1906 di Sigli, ex Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sumatera. Selama Revolusi Kemerdekaan banyak jabatan yang dipangkunya, antara lain, Gubernur Sumatera, dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- Muhammad Nur Chatib**, lahir di Seuruway, tahun 1910; aktif dalam partai Masyumi sejak tahun 1946 sampai dibubarkan, pernah menjadi guru agama (1952–1958) dan anggota DPRD Aceh Timur (1958–1960).
- Mutiara, A.G.**, lahir di Jangka Buya, tahun 1923, jabatan sekarang Direktur P.T. Parasawita Medan; menerima pendidikan pada Vervolgschool dan Pesantren Jangka Buya. Masa Jepang Staf Pemimpin Redaksi Atjeh Simbun dan selama Revolusi Kemerdekaan Kepala Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatera. Dan pernah menjadi anggota Dewan Kurator IAIN Ar-Raniri.
- Nyak Tjut, Tgk.**; lahir di Meulaboh tahun 1909; belajar pada Inlandschool dan Pesantren di Sibreh; tamat Kweekschool Islamiyah Bukittinggi (1936); jabatan sekarang Ketua Majelis Ulama Aceh Barat; pensiunan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat;
- Syamaun Gaharu, H.**; Mayor Jenderal (Purnawirawan), lahir di Teupin Raya, 10 November 1913; ex Panglima Kodam I Iskandar Muda; pada masa Revolusi Kemerdekaan, antara lain Ketua Markas Daerah API Daerah

Aceh dan sebelumnya pernah menjadi guru Taman Siswa serta guru sekolah (kelas) Pertanian di Gl. Dua.

**Syamsuddin ZA, Drs.;** Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Dep P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**Soegondo Kartoprojo, Ki,** lahir di Yogyakarta, 15 Juli 1908; ex Pembina/pimpinan Taman Siswa Aceh dan pendiri Barisan Pemuda Indonesia; aktif dalam PNI dan sekarang sebagai anggota Perintis Kemerdekaan.

**Soerjoatmodjo, RMD,** lahir di Solo, tahun 1900; ex anggota KNI daerah Aceh mewakili Peureulak, aktif dalam partai Masyumi (1945–1959); bekerja pada Departemen Agama, bidang Penerangan dan Sosial (sekarang sudah pensiun).

**Soetikno Padmo Soemarto;** Banda Aceh; ex Pengurus Taman Siswa Aceh, Anggota Badan Eksekutif KNI Daerah Aceh, Anggota DPR Sumatera (masa Revolusi Kemerdekaan) dan ex Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**Soekirman;** Kepala Sekolah Teknik Industri Menengah Atas (STIMA) Banda Aceh.

**Usman Aziz, Tgk.;** umur 70 tahun; pensiunan Bupati, sekarang tinggal di Lhok Seumawe.

**Ya'qub Ali, Drs. T.H.,** lahir di Meureudu, 25 Maret 1917; pensiunan; ex anggota BPH Kabupaten Pidie; pimpinan Fakultas Syariah Al-Hilal Sigli; bekas pelajar Madrasah Sa'adah Abadiyah Sigli dan aktif dalam pemuda PUSA, disamping mengajar pada beberapa pesantren dan madrasah.

**Yusuf, M.,** lahir tahun 1908 di Tapak Tuan; belajar pada Inlandschool, Sumatera Thawalib Tapak Tuan (1922) dan Normal School Pematang Siantar (1926); pensiunan Inspektur SD pada Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Aceh; sebelumnya menjabat guru dan PSK di Aceh Selatan.

**Zainal Abidin Ibrahim, Drs.,** Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, Kanwil Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

---

Perpust  
Jender